

**LAPORAN INDIVIDU
KEGIATAN
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING**

**Nama Lokasi: SMK Negeri 1 Tempel
Alamat: Jalan Magelang km 17, Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman,
D.I. Yogyakarta**

15 September sampai dengan 15 November 2017

**Disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menempuh
mata kuliah PLT**



Disusun Oleh:

DENI WIDIYATMOKO

14401241024

**PRODI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pembimbing PLT di SMK Negeri 1 Tempel, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Deni Widiyatmoko
NIM : 14401241024
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Telah melaksanakan kegiatan PLT di SMK Negeri 1 Tempel mulai tanggal 15 September 2017 sampai dengan 15 November 2017. Hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini.

Yogyakarta, 15 November 2017

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pembimbing



Dr. Samsuri, S.Pd.,M.Ag.

Y. Suharjana, S.Pd

NIP. 19720619 200212 1 001

NIP. 19660908 200701 1 01

Mengetahui,

Kepala SMK N 1 Tempel

Koordinator PLT



Dra. Nuning Sulastri, M.M.

NIP. 19610828 198803 2 010



Dra. Rr. Ratna Wiwara N.

NIP. 19681005 199412 2 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, sehingga penyusun bisa menyelesaikan kegiatan PLT 2017 di SMK Negeri 1 Tempel dengan lancar. Kegiatan PLT 2017 yang telah dilaksanakan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait pada umumnya dan bagi penyusun sendiri pada khususnya.

Laporan ini disusun sebagai tugas akhir pelaksanaan PLT bagi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta serta merupakan hasil dari pengalaman dan observasi penyusun selama melaksanakan kegiatan PLT di SMK Negeri 1 Tempel.

Penyusun menyadari keberhasilan laporan ini atas bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas kepada mahasiswa berupa kegiatan PLT sebagai media mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan dan mengabdikan ilmu di masyarakat pendidikan.
2. Dra. Nuning Sulastri, M.M., selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tempel yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa PLT selama melaksanakan kegiatan PLT di SMK Negeri 1 Tempel.
3. Dr. Samsuri, S.Pd.,M.Ag. selaku DPL PLT SMK Negeri 1 Tempel yang telah memberikan banyak arahan dan dukungan selama PLT.
4. Dra. Rr. Ratna Wiwara N, selaku koordinator PLT SMK Negeri 1 Tempel yang telah memberikan bimbingan dan bantuan moral maupun material.
5. Bapak Y. Suharjana, S.Pd selaku guru pembimbing PKn yang telah memberikan bimbingan selama melaksanakan kegiatan PLT di SMK Negeri 1 Tempel.

6. Kepala LPPMP UNY beserta stafnya yang telah membantu pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan PLT.
7. Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMK Negeri 1 Tempel yang banyak membantu dalam pelaksanaan PLT.
8. Seluruh peserta didik SMK Negeri 1 Tempel khususnya kelas X AK 1, X AK 2, X AK 3, X AP 1, X AP 2, X AP 3, X PM 1, X PM 2, dan X TKJ yang telah bekerja sama dengan baik.
9. Ibu dan semua keluarga di rumah, atas doa dan segala dorongan baik moral maupun material.
10. Teman–teman seperjuangan PLT di SMK Negeri 1 Tempel yang selalu memberi dukungan dan kerja samanya.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PLT.

Penyusun menyadari bahwa dalam pelaksanaan PLT masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki pada kesempatan selanjutnya. Untuk itu, penyusun mohon maaf jika belum bisa memberikan hasil yang sempurna kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program PLT. Selain itu penyusun juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, penyusun berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 15 November 2017

Penyusun

Deni Widiyatmoko

14401241024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi	2
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT	11
BAB II. PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL	15
A. Persiapan PLT	15
B. Pelaksanaan Program PLT	17
C. Analisis Hasil Pelaksanaan	31
BAB III. PENUTUP	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik PLT
2. Daftar Presensi Siswa
3. Laporan Mingguan PLT
4. Laporan Dana PLT
5. RPP Kelas X
6. Silabus Kelas X
7. Program Semester
8. Kalender Akademik
9. Jadwal Mengajar
10. Soal UTS
11. Kunci Jawaban UTS
12. Soal Penilaian Harian Kelas X
13. Jawaban Penilaian Harian Kelas X
14. Lembar Hasil Penilaian Siswa Kelas X
15. Kartu Bimbingan PLT
16. Jadwal Piket Mahasiswa
17. Dokumentasi Foto
18. Visi dan Misi SMKN 1 TEMPEL

ABSTRAK
LAPORAN
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT)
DI SMK NEGERI 1 TEMPEL

Deni Widiyatmoko

14401241024

Pendidikan Kewarganegaraan/FIS

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) adalah sebagai tempat pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional dan cakap di bidangnya, PLT bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan pengalaman nyata tentang proses belajar mengajar. Dengan kegiatan PLT ini diharapkan mahasiswa memiliki bekal untuk mengembangkan diri sebagai tenaga kependidikan yang profesional.. Salah satu tempat yang menjadi lokasi PLT UNY 2017 adalah SMK Negeri 1 Tempel yang beralamat di Jalan Magelang km 17, Jlegongan, Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

Pelaksanaan PLT di SMK Negeri 1 Tempel dilakukan mulai pada tanggal 15 September sampai dengan 15 November 2017. Sebelum kegiatan dilaksanakan, terlebih dahulu diawali dengan berbagai kegiatan persiapan, di antaranya pengajaran mikro, pembekalan, dan observasi. Pelaksanaan PLT terbagi menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. Dalam Praktek mengajar dilaksanakan pada Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, Bisnis Daring dan Pemasaran, Teknik Komputer dan Jaringan di kelas X Ak 1, 2, 3, X AP 1, 2, 3, X PM 1, 2 dan X TKJ. Selain itu, mahasiswa juga berperan dalam kegiatan persekolahan lainnya seperti mendampingi ekstrakurikuler pramuka, piket Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), piket di ruang piket, piket among siswa, inventarisasi buku-buku perpustakaan, dan lain-lain.

Hasil dari pelaksanaan PLT selama kurang lebih dua bulan di SMK N 1 Tempel program dan kegiatan PLT yang telah dilakukan berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tetap ditemui beberapa hambatan dan dengan bantuan dari berbagai pihak terutama dukungan dan bantuan guru pembimbing semua hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Melalui pelaksanaan PLT tersebut mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam hal pembelajaran di sekolah dan pengelolaan sekolah yang dapat bermanfaat kelak ketika menjadi tenaga pendidik yang baik dan profesional.

Kata Kunci :

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT), SMK Negeri 1 Tempel

BAB I

PENDAHULUAN

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menghasilkan calon tenaga kerja yang berperan dalam pendidikan, yaitu menjadi tenaga pendidik atau guru. Pendidik yang profesional harus mempunyai empat kompetensi yakni kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi kepribadian. Lulusan kependidikan dari UNY diharapkan dapat menguasai dan memiliki empat kompetensi tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan UNY dalam mewujudkan tenaga pendidik yang berkompoten dengan memasukkan program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahapeserta didik UNY.

Pelaksanaan program PLT mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005 khususnya yang berkenaan dengan empat kompetensi guru. Selain itu, program ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya pada Bab V Pasal 26 Ayat 4 yang berbunyi “Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan”. Dipertegas pula pada Bab VI Ayat 1 yang berbunyi “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Program studi atau jurusan kependidikan melaksanakan program KKN KEPENDIDIKAN atau program PLT memiliki visi yakni sebagai wahana pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. Melalui penerjunan mahapeserta didik ke lembaga yang telah ditentukan dalam rangka melaksanakan kedua program tersebut, maka diharapkan visi KKN

KEPENDIDIKAN atau program PLT dapat tercapai sehingga dapat menuju visi UNY pula yakni Ketaqwaan, Kemandirian dan Kecendekiaan.

Sebelum melaksanakan kegiatan PLT ini, mahasiswa sebagai praktikan telah menempuh kegiatan sosialisasi, yaitu pra-PLT melalui mata kuliah Pembelajaran Mikro dan Observasi di SMK Negeri 1 Tempel. Dalam pelaksanaan PLT di SMK Negeri 1 Tempel terdiri dari mahasiswa yang berasal dari berbagai jurusan sebagai berikut:

No	Nama Mahasiswa	Jurusan	Fakultas
1	Irena Puspitaningratri	P. Akuntansi	Ekonomi
2	Noviana Nur Vatoni	P. Akuntansi	Ekonomi
3	Ulfa Nur Ikawati	P. Akuntansi	Ekonomi
4	Siti Khotimah	P. Akuntansi	Ekonomi
5	Fransisca Vera D	P. ADP	Ekonomi
6	Isna Nur Khasanah	P. ADP	Ekonomi
7	Tiyas Sari Martianingsih	P. ADP	Ekonomi
8	Ari Sucipto	P. ADP	Ekonomi
9	Dwiki Puspita W	P. Kewarganegaraan	Ilmu Sosial
10	Deni Widiyatmoko	P. Kewarganegaraan	Ilmu Sosial
11	Fadhillah Khoirurrosyid	P.Teknik Informatika	Teknik
12	Aditya Harist Ari F	P.Teknik Informatika	Teknik
13	Ananda Misael Ardika	P. Seni Musik	Bahasa dan Seni

A. Analisis Situasi

1. Letak Geografis

SMK Negeri 1 Tempel merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan Bidang Studi Keahlian Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran dan Teknik Komputer & Jaringan Sekolah ini berlokasi di Jalan

Magelang Km 17, Margorejo, Tempel, Sleman 55552. Telp./Fax. (0274) 869068

2. Kondisi Sekolah

SMK Negeri 1 Tempel memiliki gedung dan tanah yang cukup luas untuk menampung 21 kelas yang masing-masing kelas sebanyak 32 peserta didik. Total keseluruhan peserta didik 853 peserta didik yang terdiri dari 4 Kompetensi Keahlian yaitu Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, Bisnis Daring dan Pemasaran, Teknik Komputer dan Jaringan

SMK Negeri 1 Tempel memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi :

Menghasilkan Tamatan yang Kompeten, Berkarakter dan Berwawasan Lingkungan

b. Misi :

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan *scientific learning*.
2. Menciptakan semangat meraih prestasi secara kompetitif dan komparatif.
3. Membentuk tamatan yang inovatif, kreatif dan responsif.
4. Menanamkan jiwa disiplin, mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia.
5. Meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan.
6. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan Institusi Pasangan dalam pengembangan sekolah
7. Menanamkan adat budaya jawa, kebangsaan, gemar membaca, pola hidup bersih dan sehat serta peduli terhadap lingkungan alam sekitar dengan merawat tanaman, mengelola sampah, menghemat air, energi dan kertas, serta melaksanakan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).

Untuk Tahun Ajaran 2017/2018 SMK Negeri 1 Tempel menerima 9 kelas yang masing – masing kelas memiliki daya tampung 32 peserta didik dan terdiri dari 4 program keahlian, yakni:

- a. Jurusan Administrasi Perkantoran (3 kelas)
- b. Jurusan Akuntansi (3 kelas)
- c. Jurusan Pemasaran (2 kelas)
- d. Jurusan Teknologi Komputer dan Jaringan (1 kelas)

3. Potensi Fisik Sekolah

SMK N 1 Tempel memiliki sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang cukup lengkap. Adapun secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Fasilitas Fisik yang tersedia:

1) Ruang Teori (a) Terdiri dari 25 ruang belajar teori	2) Ruang Praktik (a) Laboratorium (1) Lab. Komputer (2) Lab. Bahasa (3) Lab. Mengetik (4) Lab. Komputer Akuntansi (5) Lab. Adm. Perkantoran (6) Lab. Penjualan (7) Lab. Multimedia (b) Perpustakaan (c) <i>Bussiness center</i> (1) Pertokoan (2) Copy center (3) Koperasi peserta didik (4) Kafetaria	3) Ruang Pendukung (a) Ruang kepala sekolah (b) Ruang Guru (c) Ruang wakasek (d) Ruang BK (e) Ruang TU (f) Ruang pertemuan (g) Ruang Satpam (h) Ruang UKS (i) Ruang OSIS (j) Ruang BKK (k) Ruang Agama (l) Ruang Kesenian (m) TPSA (n) Halaman sekolah (o) Lapangan Upacara (p) Tempat parkir (q) Kamar Mandi (r) Gudang Olahraga (s) Mushola
---	--	--

		(t) Kantin
--	--	------------

b) Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar

- 1) Modul belajar
- 2) Media pembelajaran
- 3) Buku paket
- 4) LCD
- 5) Komputer

c) Peralatan Praktik yang tersedia

- 1) Komputer
- 2) Mesin hitung
- 3) Mesin cash register
- 4) Mesin ketik elektronik

d) Peralatan Komunikasi

- 1) Telepon
- 2) Papan pengumuman
- 3) Majalah dinding
- 4) Pengeras suara
- 5) Internet/ Wifi

e) Sarana dan prasarana Olahraga

- 1) Lapangan (voli, basket, bulutangkis, lompat jauh)
- 2) Bola (tendang, voli, basket, tenis, kasti).
- 3) Lembing alumunium, lembing bambu
- 4) Raket bulutangkis
- 5) Tongkat (estafet)
- 6) Pemukul (kasti, softball)
- 7) Net (voli, bulutangkis, tenis meja)
- 8) Cakram putra, cakram putri
- 9) Peluru putra, peluru putri
- 10) Mistar
- 11) Bad tenis meja
- 12) Matras (busa, sepet)

- 13) Tape/Radio
- 14) Box target
- 15) Body protector
- 16) Head protector
- 17) Pelindung kemaluan
- 18) Hand target
- 19) Rompi
- 20) Gawang futsal

4. Bidang Akademis

SMK Negeri 1 Tempel telah banyak meraih berbagai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik bukan hanya di tingkat kabupaten, dan tingkat propinsi bahkan tingkat nasional pun SMK Negeri 1 Tempel juga memiliki prestasi yang cukup membanggakan. SMK Negeri 1 Tempel termasuk sekolah unggulan yang mengutamakan kedisiplinan.

Proses belajar mengajar intrakurikuler di SMK Negeri 1 Tempel dimulai pada pukul 06.55 WIB sampai dengan 14.00 WIB untuk kelas XII karena masih menggunakan kurikulum 2006 (KTSP) sedangkan kelas X dan XI yang menggunakan kurikulum 2013 berakhir pada pukul 14.45 WIB. Hari Senin kegiatan belajar mengajar berakhir pukul 15.30, hari Jum'at kegiatan belajar mengajar serentak berakhir pukul 11.30 WIB dan hari Sabtu berakhir pukul 14.00 WIB. Sebelum kegiatan intrakurikuler dimulai setiap harinya selama 20 menit dari pukul 06.55 – 07.15 diadakan kegiatan membaca Al Quran dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya untuk peserta didik yang beragama muslim dan kegiatan doa untuk peserta didik yang beragama non-muslim.

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah pulang sekolah pada hari Jumat untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan, sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib kelas X, XI (Mentoring) dilaksanakan pada hari Jumat dan ekstrakurikuler wajib kelas X (Pamuka) dilaksanakan pada hari Sabtu.

5. Potensi Peserta didik

SMK Negeri 1 Tempel memiliki empat program keahlian yaitu Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, Bisnis Daring dan Pemasaran, Teknik Komputer dan Jaringan dengan jumlah peserta didik seluruhnya mencapai 854 peserta didik. Apabila dilihat dari segi kualitas input, SMK Negeri 1 Tempel memiliki kualitas masukan yang sangat baik, terbukti dari banyaknya peminat yang mendaftar di SMK Negeri 1 Tempel. Selain itu sekolah ini juga melengkapi kegiatan peserta didik dengan mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler baik dalam bidang seni maupun olahraga seperti: Pramuka (ekstra wajib), Mentoring (ekstra wajib kelas XI), Seni Tari, Tata Boga, TONTI, PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Seni Baca Al Quran, *English Study Club* (ESC), Olah Raga Futsal, Seni Batik, Tata Busana, Olah Raga Bela Diri (Pencak Silat)

6. Potensi Guru dan Karyawan

SMK N 1 Tempel dipimpin oleh seorang kepala sekolah dengan empat wakil kepala sekolah yaitu wakasek kurikulum, wakasek sarana prasarana, wakasek kepeserta didikan dan wakasek hubungan industri dan masyarakat, masing-masing wakasek memiliki ranah kerja yang saling berkaitan. Jumlah tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Tempel terdiri dari 53 orang yang terdiri dari 43 guru berpendidikan S1, 8 guru berpendidikan sarjana muda, 1 guru berpendidikan D1, dan 1 guru berpendidikan D3. Di samping itu untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar, SMK Negeri 1 Tempel didukung oleh 15 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang sebagai Kepala TU, 1 orang bendahara PUMC, 2 orang kesiswaan, 1 orang pemegang kas, 1 orang bendahara komite, 1 orang di bagian persuratan, 1 orang di bagian PGD, 1 orang di bagian inventaris, 1 orang di bagian perpustakaan, 1 orang di bagian kepegawaian, dan 4 orang dibagian kebersihan dan keamanan.

Sebelum melaksanakan kegiatan PLT, terlebih dahulu dilaksanakan pra PLT melalui mata kuliah pengajaran mikro dan observasi lingkungan sekolah khususnya pembelajaran untuk memahami lingkungan tempat

praktik. Hal-hal yang telah diobservasi meliputi lingkungan fisik sekolah, perilaku atau keadaan peserta didik, administrasi sekolah dan lain-lain.

Adapun hasil observasi adalah sebagai berikut:

1. Proses Pembelajaran

- a. Kurikulum 2013 (K-13)** Kurikulum yang saat ini dipakai oleh sekolah adalah Kurikulum 2013 untuk kelas X dan XI sedangkan KTSP digunakan untuk kelas XII. Sekolah menyusun materi pelajaran berdasarkan kebutuhan, tetapi materi pokok telah ditentukan pusat.
- b. Silabus** Semua guru yang mengampu masing-masing mata pelajaran membuat silabus untuk masing-masing mata pelajaran kejuruan di awal tahun ajaran baru digunakan sebagai acuan proses pembelajaran selama 1 tahun.
- c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)** RPP dibuat dengan berdasarkan silabus yang telah disusun di awal tahun ajaran. Guru membuat RPP sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dikelas. RPP disusun dengan memasukkan nilai-nilai dan norma-norma yang harus ditanamkan dalam masing-masing indikator.

2. Proses Pembelajaran

a. Membuka Pelajaran

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam kepada peserta didik, yang kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Guru juga menyampaikan keterkaitan materi yang disampaikan dengan materi sebelumnya.

b. Penyampaian Materi

Guru menyampaikan materi dengan runtut sesuai dengan acuan yang ada disilabus. Untuk membantu peserta didik memahami materi, guru menyiapkan modul yang berisi pembahasan materi juga latihan soal.

Setiap peserta didik masing-masing mendapatkan satu modul dan soal latihan.

c. Metode Pembelajaran

Guru menggunakan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan materi yang akan disampaikan, beberapa metode yang digunakan adalah ceramah, latihan soal, tanya jawab, diskusi, games . Setelah guru menyampaikan materi, peserta didik mengerjakan tugas yang di berikan oleh guru

d. Penggunaan Bahasa

Guru menggunakan bahasa yang formal dalam menyampaikan materi, selain itu diselingi juga dengan humor agar peserta didik tidak merasa bosan dengan materi yang disampaikan. Artikulasi jelas, ada penekanan pada materi yang penting.

d. Penggunaan Waktu dan Gerak

Guru menjelaskan materi pada jam 1 dan jam ke 2 lalu dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal. Guru menggunakan gerak verbal dan non verbal. Verbal dengan lisan atau pengucapan dan non verbal dengan mimik, gerak tubuh.

e. Cara Memotivasi Peserta didik

Guru memotivasi peserta didik dengan memuji hasil pekerjaan peserta didik dan tidak memarahi pekerjaan peserta didik yang salah. Guru menggunakan kata bagus, betul, pintar sekali, untuk memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah berani menjawab.

f. Teknik Bertanya

Guru akan menawarkan dulu kepada peserta didik untuk materi yang belum jelas. Apabila semua telah jelas, guru memperdalam penguasaan teori dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai apa yang telah disampaikan. Apabila tidak ada peserta didik yang mau menjawab, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Apabila peserta didik tidak bisa menjawab, guru memberikan pertanyaan yang mengarahkan peserta didik pada jawaban yang dikehendaki.

g. Teknik Penguasaan Kelas

Guru dapat mengelola kelas dengan baik, terkadang guru menegur beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan. Selain itu, guru menghampiri semua peserta didik pada saat mengerjakan latihan dan melihat hasil pekerjaan peserta didik.

h. Penggunaan Media

Guru menggunakan modul dan lembar latihan peserta didik serta menggunakan komputer, LCD , papan tulis, spidol, dan sebagainya.

i. Bentuk dan cara evaluasi

Guru mengevaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan memberikan soal-soal latihan yang harus dikerjakan oleh masing-masing peserta didik, lalu dibahas secara bersama-sama.

j. Menutup Pelajaran

Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan secara bersama-sama atas materi yang telah disampaikan dan menyinggung sedikit materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya.

3. Perilaku Peserta Didik

a. Perilaku peserta didik dalam kelas

Peserta didik aktif dalam proses pembelajaran meskipun terkadang ada beberapa yang bercerita dengan temannya. Sebagian besar peserta didik memperhatikan guru saat menjelaskan dan mengajukan pertanyaan atas materi yang belum dipahami. Peserta didik mampu mengerjakan soal latihan yang diberikan baik secara individu maupun secara kelompok.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas yaitu penggunaan metode belum bervariasi sehingga ada beberapa peserta didik yang bosan dan media yang sering digunakan jarang bervariasi hanya memaksimalkan fasilitas sekolah.

Potensi pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Tempel secara umum cukup baik, karena proses pembelajaran telah direncanakan secara matang. Potensi guru dalam menyampaikan materi di kelas sudah sangat

baik. Selain itu lingkungan sekolah sudah tertata dengan rapi dan bersih yang sangat mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan.

b. Perilaku peserta didik diluar kelas

Peserta didik berperilaku sopan dan ramah terhadap orang luar yang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Peserta didik selalu menyapa ketika bertemu dengan bapak atau ibu guru dan karyawan dengan menundukan kepala, salam atau berjabat tangan.

B. Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PLT

Kegiatan PLT di sekolah untuk meningkatkan potensi bakat dan minat peserta didik guna menunjang proses belajar mengajar, meningkatkan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Pelaksanaan kegiatan PLT di SMK Negeri 1 Tempel ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya:

1. Bagi kepala sekolah akan membantu meningkatkan pengelolaan sarana belajar mengajar yang efektif.
2. Bagi guru akan lebih membantu terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif, lebih aktif, dan inovatif.
3. Bagi peserta didik dapat menyalurkan dan mengembangkan kreativitas serta minat dan bakat lebih berkembang.
4. Bagi penyusun dengan program PLT diharapkan dapat membantu jiwa profesionalisme seorang tenaga kependidikan.
5. Bagi sekolah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam mendukung kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas sekolah secara akademik maupun non akademik.

Rancangan kegiatan PLT yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tempel adalah program PLT ini merupakan bagian dari mata kuliah sebesar 3 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa kependidikan. Materi yang ada meliputi program mengajar teori dan praktek di kelas dengan dikontrol oleh guru pembimbing masing-masing. Pelaksanaan program Praktik Lapangan Terbimbing dimulai dari tanggal 15 September 2017 & sampai 15 November 2017. Kegiatan PLT dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan praktik kependidikan dan persekolahan yang sudah terjadwal.

Rancangan kegiatan PLT ini disusun setelah mahasiswa melakukan observasi di kelas sebelum penerjunan PLT yang bertujuan untuk mengamati kegiatan guru, peserta didik di kelas dan lingkungan sekitar dengan maksud agar pada saat PLT nanti mahasiswa benar-benar siap diterjunkan untuk praktik mengajar. Di bawah ini akan dijelaskan rencana kegiatan PLT:

1. Persiapan di Kampus
 - Pengajaran Mikro
 - Pembekalan PLT
2. Observasi pembelajaran di kelas
3. Konsultasi dengan guru pembimbing
4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
5. Persiapan materi pembelajaran
6. Penyusunan administrasi guru
7. Melaksanakan praktik mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas X AK 1, X AK 2, X AK 3, X AP 1, X AP2, X AP 3, X PM 1, X PM 2, X TKJ
8. Evaluasi pembelajaran
9. Menyusun laporan PLT

1) Observasi Pra PLT

a. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2017 secara berkelompok setelah adanya pengumuman daftar peserta PLT sekaligus penempatan PLT, tanggal 18 September 2017 secara individu oleh setiap peserta PLT di SMK Negeri 1 Tempel. Kegiatan ini bertujuan agar sebelum praktik mengajar di kelas dapat mengetahui sarana di dalam kelas. Selain itu dalam kegiatan observasi bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi lapangan sebelum praktik mengajar. Beberapa hal yang diamati dalam proses observasi sekolah di SMK Negeri 1 Tempel di antaranya:

- a) Kondisi Fisik Sekolah
- b) Potensi Guru
- c) Potensi Karyawan

- d) Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar atau Media
- e) Perpustakaan
- f) Laboratorium
- g) Bimbingan Konseling
- h) Bimbingan Belajar
- i) Ekstrakurikuler
- j) Organisasi dan Fasilitas OSIS
- k) Organisasi dan Fasilitas UKS
- l) Administrasi (karyawan)
- m) Koperasi Sekolah
- n) Mushola atau Tempat Ibadah
- o) Kesehatan Lingkungan

b. Observasi Proses Belajar

Observasi proses belajar mengajar dilaksanakan di ruang kelas atau ruang teori. Observasi ini bertujuan agar mahasiswa PLT melihat dan mengamati secara langsung bagaimana proses belajar mengajar berlangsung di SMK Negeri 1 Tempel. Beberapa hal yang perlu dilakukan pada saat observasi di antaranya:

- a) Kelengkapan Administrasi Guru
- b) Cara membuka pelajaran
- c) Cara guru menyampaikan materi
- d) Cara guru memotivasi peserta didik dalam belajar
- e) Usaha guru mengaktifkan peserta didik
- f) Penggunaan waktu
- g) Metode yang digunakan guru dalam mengajar
- h) Media pembelajaran
- i) Penampilan guru dan penguasaan bahasa guru
- j) Cara Guru menutup pembelajaran

c. Praktik Mengajar

Kegiatan praktik mengajar dimulai pada tahun ajaran baru 2017/2018 Setiap mahasiswa bertugas untuk mengampu mata pelajaran sesuai dengan jurusan atau kompetensi mengajar masing-

masing dan mempunyai kewajiban mengajar minimal 8 kali pertemuan. Kegiatan PLT ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa PLT bersama guru pembimbingnya atau hingga kegiatan PLT di SMK Negeri 1 Tempel berakhir

d. Penyusunan Laporan PLT

Setelah mahasiswa selesai melaksanakan kegiatan PLT, tugas selanjutnya adalah penyusunan laporan kegiatan PLT. Kegiatan penyusunan laporan dilaksanakan di minggu terakhir sebelum mahasiswa PLT di SMK Negeri 1 Tempel ditarik dari lokasi.

BAB II

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL

A. Persiapan

Kegiatan PLT ini dilaksanakan selama kurang lebih waktu aktif dua bulan, terhitung mulai tanggal 15 September sampai dengan 15 November 2017. Selain itu terdapat juga alokasi waktu untuk observasi sekolah dan observasi kelas yang dilaksanakan sebelum PLT dimulai. Program yang direncanakan untuk dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tempel untuk Program Individu meliputi persiapan, pelaksanaan dan analisis hasil. Untuk mempersiapkan mahasiswa dalam melaksanakan PLT baik yang dipersiapkan berupa persiapan fisik maupun mental untuk dapat mengatasi permasalahan yang akan muncul selanjutnya dan sebagai sarana persiapan program apa yang akan dilaksanakan nantinya, maka sebelum diterjunkan ke lokasi PLT, Universitas Negeri Yogyakarta membuat berbagai program persiapan sebagai bekal mahasiswa dalam melaksanakan PLT. Persiapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengajaran Mikro (*Microteaching*)

Guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan profesionalitasnya (Depdiknas, 2004:8). Guru adalah sebagai pendidik, pengajar pembimbing, pelatihan, pengembangan program, pengelolaan program dan tenaga professional. Tugas dan fungsi guru tersebut menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional. Oleh karena itu, para guru harus mendapatkan bekal yang memadai agar dapat menguasai sejumlah kompetensi yang diharapkan tersebut, baik melalui *preservice* maupun *inservice training*. Salah satu bentuk *preservice training* bagi guru tersebut adalah dengan melalui pembentukan kemampuan mengajar (*teaching skill*) baik secara teoritis

maupun praktis. Secara praktis bekal kemampuan mengajar dapat dilatihkan melalui kegiatan *microteaching* atau pengajaran mikro.

Program ini dilaksanakan dengan dimasukkan dalam mata kuliah yang wajib tempuh bagi mahasiswa yang akan mengambil PLT pada semester berikutnya. Persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa yang telah menempuh minimal semester VI. Dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa diberikan materi tentang bagaimana mengajar yang baik dengan disertai praktek untuk mengajar dengan peserta yang diajar adalah teman sekelompok atau *peer teaching*. Keterampilan yang diajarkan dan dituntut untuk dimiliki dalam pelaksanaan mata kuliah ini adalah berupa ketrampilan-ketrampilan yang berhubungan dengan persiapan menjadi seorang calon guru atau pendidik.

2. Pembekalan PLT

Pembekalan PLT dilaksanakan baik oleh pihak fakultas maupun jurusan masing-masing dari setiap mahasiswa praktikan. Khusus untuk mahasiswa praktikan di Fakultas Ilmu Sosial pembekalan PLT dilaksanakan pada tanggal 11 September 2017 bertempat di ruang KHD FIS UNY dengan materi yang disampaikan antara lain Mekanisme Pelaksanaan PLT di sekolah maupun di lembaga, Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Rencana Pembangunan Pendidikan, Dinamika Sekolah serta Norma dan Etika Pendidik/Tenaga Kependidikan.

Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah pembelajaran mikro dan mengikuti pembekalan PLT dari masing-masing jurusan maka sudah diperbolehkan untuk melaksanakan program PLT di sekolah. Pelaksanaan PLT di sekolah terlebih dahulu dilakukan persiapan yang meliputi observasi kelas, konsultasi persiapan mengajar dan menyusun perangkat administrasi guru.

3. Observasi Pembelajaran di Kelas

Kegiatan observasi di dalam kelas bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran sehingga mahasiswa praktikan dapat merencanakan bagaimana praktik mengajar yang hendak dilakukan. Hal-hal yang diamati dalam observasi kelas antara lain perangkat dan proses

pembelajaran, cara mengajar guru, alat atau media pembelajaran, dan perilaku peserta didik.

4. Konsultasi dengan Guru Pembimbing

Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan dengan tujuan memberikan bekal bagi mahasiswa agar lebih siap dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kegiatan konsultasi dilakukan sebelum praktik mengajar dikelas, baik konsultasi mengenai penyusunan RPP dan kegiatan praktik dikelas. Mahasiswa diberikan bimbingan untuk membuat perangkat administrasi guru seperti program semester, program tahunan, rencana pembelajaran, alokasi waktu, Kriteria Ketuntasan Minimum, Evaluasi.

5. Menyusun perangkat administrasi guru

Penyusunan perangkat administrasi guru dilakukan agar mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pengalaman merencanakan kegiatan pembelajaran secara keseluruhan seperti program semester, program tahunan, rencana pembelajaran, alokasi waktu, Kriteria Ketuntasan Minimum, Evaluasi.

B. Pelaksanaan PLT

Pelaksanaan praktik mengajar selama masa PLT menggantikan mata pelajaran yang diampu oleh guru pembimbing. Mata pelajaran yang diampu adalah Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Mata pelajaran ini diberikan di kelas X semua jurusan, yang terdiri dari 9 kelas yakni X AK 1, X AK 2, X AK 3, X AP 1, X AP 2, X AP 3, X PM 1, X PM 2 dan X TKJ. Kegiatan PLT dilaksanakan dengan:

1. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sebelum melaksanakan praktik mengajar dikelas, mahasiswa terlebih dahulu menyusun silabus sesuai dengan kurikulum dan karakteristik sekolah. Silabus yang telah disusun dibuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang akan digunakan selama praktik mengajar di kelas. RPP disusun berdasarkan silabus yang mencakup nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik. RPP mencakup informasi mengenai standar kompetensi, kompetensi dasar yang harus dicapai, indikator,

tujuan, materi pelajaran, metode, sumber bahan dan langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Mahasiswa mendapat bimbingan dari guru pembimbing mengenai cara distribusi jam efektif ke setiap indikator dalam penyusunan silabus dan RPP.

Adapun format yang tercantum dalam RPP sebagai berikut:

- 1) Nama Sekolah
- 2) Kompetensi Keahlian
- 3) Mata Pelajaran/Kompetensi
- 4) Kelas/Semester
- 5) Alokasi Waktu
- 6) Standar Kompetensi
- 7) Kompetensi Dasar
- 8) Indikator
- 9) Tujuan Pembelajaran
- 10) Materi Pembelajaran
- 11) Metode/Pendekatan Pembelajaran
- 12) Langkah-langkah Pembelajaran
- 13) Sumber Pembelajaran
- 14) Penilaian
- 15) Latihan Soal
- 16) Pengamatan Sikap

2. Pelaksanaan Praktik Mengajar

Kegiatan pembelajaran berlangsung Sembilan kali tatap muka selama 2 jam pelajaran per minggu untuk 9 kelas. Jadi, praktik mengajar dilaksanakan 9 kali tatap muka dengan 18 jam pelajaran tiap minggunya. Terdapat dua kategori dalam pelaksanaan praktik mengajar sebagai berikut.

a. Praktik Mengajar Terbimbing

Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar yang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, mahasiswa ditunggu dan diamati oleh guru pembimbing. Guru pembimbing mendampingi

mahasiswa praktikan dalam proses pembelajarannya sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap cara mengajar mahasiswa praktikan. Selain itu, praktikan juga berdiskusi dengan guru pembimbing terkait permasalahan-permasalahan dalam mengajar. Umpan balik dari guru pembimbing di antaranya:

- (a) Masukan tentang penyusunan RPP
 - (b) Masukan tentang cara menyampaikan materi pembelajaran
 - (c) Masukan tentang cara mengajar praktikan
 - (d) Masukan tentang media pembelajaran yang dibuat praktikan
- Masukan tentang teknik penguasaan dan pengelolaan kelas

b. Praktik Mengajar Mandiri

Praktik mengajar mandiri adalah praktik mengajar yang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, mahasiswa melaksanakan sendiri proses pembelajaran tanpa ditunggu dan diamati.

Praktikan berusaha menerapkan seluruh keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, menerapkan teori yang didapat di kampus serta menyesuaikan diri dengan lingkungan pembelajaran di SMK Negeri 1 Tempel untuk memberikan yang terbaik. Metode pembelajaran sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penentuan metode yang akan digunakan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Pelaksanaan pembelajaran dilalui melalui tahap:

a. Membuka pelajaran

Tujuan membuka pelajaran adalah agar peserta didik siap untuk melakukan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik secara fisik maupun secara mental. Membuka pelajaran meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
- 2) Mengetahui kondisi peserta didik dan mempresensi peserta didik
- 3) Mengecek persiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran
- 4) Melakukan apersepsi materi terkait
- 5) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik

b. Menyampaikan materi pelajaran

Penyampaian materi diawali dengan menjelaskan materi secara umum kepada peserta didik, lalu peserta didik menggali informasi tentang materi melalui buku pegangan yang dimiliki. Setelah itu, dilakukan konfirmasi pemahaman peserta didik dengan penjelasan praktikan lalu peserta didik mengerjakan soal latihan dalam buku pegangan masing-masing.

c. Penggunaan bahasa

Selama mengajar, praktikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti peserta didik tanpa meninggalkan ejaan baku bahasa Indonesia.

d. Penggunaan waktu

Waktu pembelajaran dikelas disesuaikan dengan alokasi waktu yang telah dirancang dalam RPP yang terdiri dari kegiatan awal, inti dan penutup.

e. Gerak

Praktikan tidak hanya berdiri di depan untuk menjelaskan materi, tetapi praktikan juga berjalan ke belakang atau ke samping mendekati peserta didik untuk mengecek pekerjaan peserta didik.

f. Cara memotivasi peserta didik

Cara memotivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar adalah dengan memberikan pujian, kata-kata positif dan memberikan apresiasi terhadap peserta didik yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat, juga dengan menciptakan suasana yang nyaman. Motivasi juga diberikan diawal kegiatan pembelajaran dengan menceritakan suatu hal atau peristiwa yang dapat membangkitkan peserta didik untuk semangat belajar

g. Teknik bertanya

Teknik bertanya yang digunakan adalah dengan memberikan pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian baru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab, ketika tidak ada

yang bersedia maka guru menunjuk salah satu dari mereka untuk menjawab pertanyaan tersebut.

h. Teknik penguasaan kelas

Teknik penguasaan kelas yang dilakukan oleh praktikan adalah dengan berjalan keliling dan meneliti satu-persatu hasil pekerjaan yang telah dibuat oleh peserta didik, baik individu maupun kelompok. Dengan demikian diharapkan praktikan bisa memantau apakah peserta didik dikelas konsentrasi mengikuti pelajaran atau tidak. Ketika praktikan menjelaskan dan peserta didik kurang memperhatikan maka praktikan menegur peserta didik yang bersangkutan.

i. Evaluasi

Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan

Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam praktik mengajar adalah sebagai berikut:

a. Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi yang memerlukan uraian atau penjelasan dan menjelaskan konsep-konsep atau pengertian.

b. Diskusi Kelompok

Peserta didik secara berkelompok memecahkan suatu masalah dan mempresentasikan serta ditanganpi oleh peserta didik lain.

c. Metode pemecahan (Problem Solving)

Masalah menurut Sudirman, dkk. (1991 : 146) adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa.

d. Mind Mapping

Mind mapping merupakan pembelajaran dengan peta konsep. Metode ini dapat membantu peserta didik menguasai materi dengan lebih mudah dengan memahami alur dari konsep materi yang harus dikuasai.

e. Discovery learning

Memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi. Proses tersebut disebut *cognitive process* sedangkan discovery itu sendiri adalah *the mental process of assimilating concepts and principles in the mind* (Robert B. Sund dalam Malik,2001:219).

f. Metode active debate

Merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra. Siswa dibagi ke dalam dua kelompok dan setiap kelompok terdiri dari tiga orang atau lebih. Di dalam kelompoknya, siswa mengambil posisi pro dan tiga orang/ lebih yang lainnya dalam posisi kontra) melakukan perdebatan tentang topik yang ditugaskan. Laporan masing-masing kelompok yang menyangkut kedua posisi pro dan kontra diberikan kepada guru. Selanjutnya guru dapat mengevaluasi setiap siswa tentang penguasaan materi yang meliputi kedua posisi tersebut dan mengevaluasi seberapa efektif siswa terlibat dalam proses pembelajaran active debate (Zaini, Hisyam, dkk., Yogyakarta: 2008).

g. Metode ceramah plus adalah metode mengajar yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah gabung dengan metode lainnya. Dalam hal ini penulis akan menguraikan tiga macam metode ceramah plus yaitu Metode ceramah plus tanya jawab dan tugas (CPTT). Metode ini adalah metode mengajar gabungan antara ceramah dengan tanya jawab dan pemberian tugas.

h. Latihan Soal dan Penugasan

Metode ini digunakan untuk memperdalam pengetahuan peserta didik dan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik.

Di dalam praktik mengajar ini, secara teori mahasiswa praktikan diwajibkan melaksanakan pembelajaran minimal sebanyak 8 (delapan) pertemuan. Praktik mengajar berlangsung di kelas X AK 1, X AK 2, X AK

3, X AP 1, X AP 2, X AP 3, X PM 1, X PM 2 dan X TKJ, mulai tanggal 15 September 2017 sampai dengan 15 November 2017. Adapun rincian kegiatan mengajar yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

No.	Hari/ tanggal	Kelas	Jam ke	Materi Pelajaran dan Hasil Kegiatan
1	Rabu, 20 September 2017	X AK 3	6 – 7	Penjelasan kompetensi dasar dan indikator tentang menelaah Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
2	Sabtu, 23 September 2017	X PM 1	1 – 2	Penjelasan kompetensi dasar dan indikator tentang menelaah Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
3	Senin, 2 Oktober 2017	X AP 1 X AP 2 X TKJ	4-5 6-7 9-10	Penjelasan Materi tentang Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing
4	Rabu, 4 Oktober 2017	X AP 3 X AK 3	1-2 6-7	Penjelasan Materi tentang Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing

5	Kamis, 05 Oktober 2017	X AK 2 X PM 2	1-2 3-4	Penjelasan Materi tentang Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing
6	Jumat, 06 Oktober 2017	X AK 1	1-2	Penjelasan Materi tentang Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing
7	Sabtu, 07 Oktober 2017	X PM 1	1-2	Penjelasan Materi tentang Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing
8	Senin, 09 Oktober 2017	X AP 2 X TKJ	6-7 9-10	Penjelasan Materi tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan diakhiri dengan evaluation test (kuis)
9	Rabu, 10 Oktober 2017	X AP 3 X AK 3	1-2 6-7	Penjelasan Materi tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun

				1945 kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan diakhiri dengan evaluation test (kuis)
10	Kamis, 11 Oktober 2017	X AK 2 X PM 2	1-2 3-4	Penjelasan Materi tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan diakhiri dengan evaluation test (kuis)
11	Jumat, 12 Oktober 2017	X AK 1	1-2	Penjelasan Materi tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan diakhiri dengan evaluation test (kuis)
12	Sabtu, 14 Oktober 2017	X PM 1 X AP 1	1-2 5-6	Penjelasan Materi tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan diakhiri dengan evaluation test (kuis)
13	Senin, 16 Oktober 2017	X AP 2	6-7 9-10	Penjelasan Materi tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi

		X TKJ		Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi kemudian Presentasi mengenai materi yang dibagi perkelompok
14	Rabu, 18 Oktober 2017	X AP 3 X AK 3	1-2 6-7	Penjelasan Materi tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi kemudian Presentasi mengenai materi yang dibagi perkelompok
15	Kamis, 19 Oktober 2017	X AK 2 X PM 2	1-2 3-4	Penjelasan Materi tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi kemudian Presentasi mengenai materi yang dibagi perkelompok
16	Jumat, 20 Oktober 2017	X AK 1	1-2	Penjelasan Materi tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi kemudian Presentasi mengenai materi

				yang dibagi berkelompok
17	Sabtu, 21 Oktober 2017	X PM 1 X AP 1	1-2 5-6	Penjelasan Materi tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi kemudian Presentasi mengenai materi yang dibagi berkelompok
18	Senin, 23 Oktober 2017	X AP 2 X TKJ	6-7 9-10	ULANGAN HARIAN KD 3.3
19	Rabu, 25 Oktober 2017	X AP 3 X AK 3	1-2 6-7	ULANGAN HARIAN KD 3.3
20	Kamis, 26 Oktober 2017	X AK 2 X PM 2	1-2 3-4	ULANGAN HARIAN KD 3.3
21	Jumat, 27 Oktober 2017	X AK1	1-2	ULANGAN HARIAN KD 3.3
22	Sabtu, 28 Oktober 2017	X PM 1	1-2	ULANGAN HARIAN KD 3.3

		X AP 1	5-6	
23	Senin, 30 Oktober 2017	X AP 2 X TKJ	6-7 9-10	Penjelasan Materi tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI dan Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dan Presentasi sesuai materi yang dibagi
24	Rabu, 01 Oktober 2017	X AP 3 X AK 3	1-2 6-7	Penjelasan Materi tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dan Presentasi sesuai materi yang dibagi
25	Kamis, 02 November 2017	X AK 2 X PM 2	1-2 3-4	Penjelasan Materi tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dan Presentasi sesuai materi yang dibagi
26	Jumat, 03 November 2017	X AK1	1-2	Penjelasan Materi tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dan Presentasi sesuai materi yang

				dibagi
27	Sabtu, 04 November 2017	X PM 1 X AP 1	1-2 5-6	Penjelasan Materi tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dan Presentasi sesuai materi yang dibagi
28	Senin, 06 November 2017	X AP 2 X TKJ	6-7 9-10	Presentasi materi Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah dan Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan kelompok yang sudah dibagi per materi dipertemuan sebelumnya
29	Rabu, 08 November 2017	X AP 3 X AK 3	1-2 6-7	Penjelasan Materi tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dan Presentasi sesuai materi yang dibagi
30	Kamis, 09 November 2017	X AK 2 X PM 2	1-2 3-4	Penjelasan Materi tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dan Presentasi sesuai materi yang dibagi

31	Jumat, 10 November 2017	X AK 1	1-2	Penjelasan Materi tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dan Presentasi sesuai materi yang dibagi
32	Sabtu, 11 November 2017	X PM 1 X AP 1	1-2 5-6	Penjelasan Materi tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian peserta didik di arahkan untuk berdiskusi dan Presentasi sesuai materi yang dibagi

3. Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa praktikan dalam proses penyampaian materi dan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi yang telah diajarkan.

4. Membuat Perangkat Pembelajaran

Sebelum praktik mengajar, praktikan terlebih dahulu membuat perangkat pembelajaran yang diperlukan, seperti menyiapkan materi, membuat media yang akan digunakan, dan sebagainya.

5. Membuat Soal Ulangan Harian

Praktikan menyusun soal ulangan harian untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sesuai materi yang telah diajarkan, materi ulangan untuk kelas X AK 1, X AK 2, X AK 3, X AP 1, X AP 2, X AP 3, X PM 1, X PM 2 dan X TKJ. yaitu KD 3.3

6. Pelaksanaan Ulangan Harian

Ulangan harian dilaksanakan di kelas kelas X AK 1, X AK 2, X AK 3, X AP 1, X AP 2, X AP 3, X PM 1, X PM 2 dan X TKJ. Pada tanggal 23 –

28 Oktober 2017, dan di ikuti oleh seluruh peserta didik di kelas tersebut sebanyak 32 anak.

7. Mengoreksi

Kegiatan mengoreksi dilakukan ketika peserta didik mengerjakan tugas, dan ulangan harian. Setelah pengoreksi, praktikan melakukan analisis dan menyimpulkan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Hasil pengoreksian tugas peserta didik digunakan sebagai bahan evaluasi bagi praktikan untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. Hasil ulangan harian digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap seluruh materi yang diajarkan..

8. Umpan Balik dari Pembimbing

Umpan balik dilakukan oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing setelah praktik mengajar. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa PLT dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan selama mahasiswa melakukan proses belajar mengajar di kelas sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai bekal pengalaman dan evaluasi ini untuk perbaikan mahasiswa praktikan.

9. Praktik Persekolahan

Praktik persekolahan bertujuan agar praktikan mampu melaksanakan tugas-tugas sekolah selain mengajar. Kegiatan yang dilakukan praktikan dalam praktik persekolahan antara lain membantu among peserta didik (Piket Simpatik), guru piket, dan inventarisasi buku-buku perpustakaan. Dalam Kegiatan among peserta didik, mahasiswa praktikan bertugas menjadi among peserta didik di depan pintu masuk sekolah setiap pagi hari. Dalam kegiatan piket guru, mahasiswa praktikan bertugas menerima tamu, melakukan presensi peserta didik masing-masing kelas, mencatat peserta didik yang izin masuk atau meninggalkan pelajaran dan mahasiswa praktikan juga menyampaikan penugasan guru yang berhalangan hadir kepada peserta didik.

C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi

1. Analisis Keterkaitan Program dan Pelaksanaanya

Keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan dari perencanaan proses pembelajaran yang tercermin dari penyusunan RPP. Sebelum melaksanakan kegiatan praktik mengajar di kelas, mahasiswa praktikan mengkonsultasikan RPP yang akan digunakan dalam praktik mengajar di kelas. Mahasiswa praktikan mendapat bimbingan penuh dalam menyusun perangkat pembelajaran, praktik mengajar di kelas dan evaluasi.

2. Faktor Pendukung

Kelancaran pelaksanaan PLT di SMK Negeri 1 Tempel didukung oleh berbagai faktor yaitu:

- b) Dosen Pembimbing lapangan (DPL) PLT yang sangat profesional dalam bidang pendidikan, serta memiliki keahlian untuk melakukan bimbingan yang baik dalam bidang studi terkait, sehingga mahasiswa praktikan diberikan pengalaman, masukan, arahan dan saran dalam kegiatan proses pembelajaran menuju ke arah yang lebih baik.
- c) Guru pembimbing yang sangat perhatian, sehingga kekurangan-kekurangan praktikan pada waktu proses pembelajaran dapat diketahui dan dapat sekaligus diberikan masukan serta bimbingan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga diberikan saran dan kritik untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya.
- d) Peserta didik yang sangat kooperatif dan interaktif serta aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga menciptakan kondisi yang kondusif dalam proses KBM.
- e) Sarana dan prasarana di kelas yang memadai, seperti adanya media pembelajaran, LCD, layar proyektor, dan lain sebagainya. Serta lingkungan sekolah yang kondusif dan relatif aman serta nyaman untuk belajar.

Faktor pendukung tersebut dapat memberikan bekal pengalaman untuk mahasiswa praktikan. Pengalaman belajar dan mengajar yang sebenarnya inilah yang membuat kompetensi mahasiswa praktikan sebagai calon pendidik menjadi lebih matang. Pengetahuan dan pengalaman baru sangat banyak ditemukan dalam pelaksanaan program PLT baik di dalam kelas ataupun di luar kelas.

3. Faktor Penghambat

Pelaksanaan kegiatan PLT juga menemui beberapa kendala. Hal tersebut menjadikan hambatan bagi mahasiswa praktikan, antara lain:

- a. Terdapat peserta didik yang memiliki berbagai tingkah dan perilaku yang kurang sesuai dengan peraturan sekolah dan pembelajaran sehingga membuat mahasiswa praktikan harus memberikan perhatian lebih terhadap peserta didik tersebut.
- b. Terdapat beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran
- c. Tingkat pemahaman peserta didik dalam menerima materi dan keterampilan dalam mengerjakan soal beragam.
- d. Terdapat beberapa peserta didik yang masih menyalahgunakan Laptop untuk menonton Film ketika pembelajaran berlangsung sehingga membuat mahasiswa praktikan harus memberikan perhatian lebih terhadap peserta didik tersebut.

Adapun usaha yang dilakukan mahasiswa praktikan antara lain:

- a. Memberikan nasehat kepada peserta didik yang memiliki perilaku yang kurang sesuai dengan peraturan sekolah dan pembelajaran secara tegas tapi bersifat jauh dari kekerasan. Selain itu praktikan juga senantiasa memelihara hubungan baik dengan peserta didik, dengan tetap menjaga kewibawaan sebagai pengajar.
- b. Mahasiswa praktikan mengubah metode yang digunakan dari ceramah menjadi games, kuis, atau latihan. Pemilihan ketiga metode tersebut dapat meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi serta meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
- c. Mahasiswa praktikan berusaha menyampaikan materi se jelas mungkin dan mengulang materi yang belum jelas. Selain itu mahasiswa praktikan juga memberikan banyak latihan soal agar peserta didik terampil.
- d. Mahasiswa praktikan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk dapat belajar lebih giat dan disiplin.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama melaksanakan Program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMK Negeri 1 Tempel baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PLT di sekolah merupakan salah satu bentuk perwujudan pengabdian Mahasiswa kepada masyarakat sekolah, dan dengan kegiatan ini mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasainya ke dalam praktik keguruan atau praktik kependidikan
2. Melalui PLT, sebagai praktikan kami dapat memperoleh gambaran-gambaran tentang situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Tempel secara langsung. Selain itu, kami dapat melihat bahwa tugas guru tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu tetapi lebih ditekankan lagi pada mendidik para peserta didik agar menjadi manusia yang bermanfaat.
3. Dalam praktik persekolahan hubungan vertikal, yaitu mahasiswa praktikan menjaga hubungan yang baik dengan dosen pembimbing, kepala sekolah dan guru pembimbing agar semua kegiatan yang termasuk dalam rangkaian kegiatan PLT di SMK N 1 Tempel dapat berjalan sukses.
4. PLT sebagai sarana dalam peningkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh calon guru atau tenaga pendidik yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian.
5. Selama kegiatan PLT mahasiswa praktikan harus memahami betul kode etik seorang guru di dalam kelas maupun di luar kelas.
6. PLT merupakan program pembekalan bagi mahasiswa menuju dunia pendidikan yang sebenarnya yakni belajar menjadi calon pendidik sebagai lulusan kependidikan.

7. Dengan adanya program PLT, praktikan dapat belajar mengenal seluk-beluk sekolah dengan segala permasalahannya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan mahasiswa praktikan guna peningkatan pelaksanaan PLT di SMK Negeri 1 Tempel yakni sebagai berikut:

1. Untuk Mahasiswa PLT yang Akan Datang

- a. Mahasiswa hendaknya lebih aktif dalam melakukan konsultasi dengan Guru Pembimbing dan Dosen Pembimbing.
- b. Perlu menggunakan metode mengajar yang bervariasi agar peserta didik mampu menyerap materi secara maksimal.
- c. Sebaiknya persiapan mengajar lebih ditingkatkan terkait persiapan administrasi, mental maupun materi yang akan disampaikan agar ketika pelaksanaan dapat berjalan lancar.
- d. Hendaknya mahasiswa tidak menunda pekerjaan, sehingga tugas tidak menumpuk terlalu banyak.

2. Untuk Pihak Sekolah (SMK Negeri 1 Tempel)

- a. Kerjasama dengan mahasiswa PLT hendaknya dipertahankan dan lebih ditingkatkan.
- b. Perlu adanya keterbukaan informasi antara pihak sekolah dengan mahasiswa PLT, sehingga informasi yang diperlukan untuk kepentingan perbaikan kualitas kegiatan PLT dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara guru dan mahasiswa PLT sehingga dapat tercipta suasana PLT yang lebih kondusif
- d. Disiplin seluruh warga sekolah yang sudah terlaksana dengan baik seharusnya selalu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga seluruh kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Untuk Pihak LPPMP

- a. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara LPPMP, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan sekolah tempat mahasiswa PLT melakukan praktik mengajar.
- b. Perlu adanya penjelasan mengenai teknik persiapan dan pelaksanaan PLT.
- c. Pihak LPPMP hendaknya meningkatkan kejelasan informasi terkait dengan kegiatan PLT.
- d. Kunjungan dan pengarahan dari pihak LPPMP tetap diperlukan secara berkala agar praktikan dapat lebih terkontrol dalam kegiatan praktiknya.
- e. Koordinasi setiap fakultas sebaiknya ditingkatkan sehingga mempermudah birokrasi.
- f. LPPMP hendaknya menciptakan mekanisme yang lebih baik dalam pemberian bantuan perlengkapan kegiatan PLT
- g. Pembekalan kegiatan PLT sebaiknya lebih dimaksimalkan

DAFTAR PUSTAKA

Panduan Magang III Terintegrasi dengan Praktik Lapangan Terbimbing 2017.

Unit Program Praktek Lapangan Terbimbing Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta

LAMPIRAN

1. MATRIK PLT



**MATRIKS PROGRAM KERJA PLT UNY
SEMESTER GANJIL TAHUN 2017/2018**

D013

**Kelompok
Mahasiswa**





Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMK Negeri 1 Tempel
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Magelang km 17,5, Jlegongan,
 Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta
GURU PEMBIMBING : Y. Suharjana, S.Pd.

NAMA MAHASISWA : Deni Widiyatmoko
NO. MAHASISWA : 14401241024
FAK/ PRODI : FIS/ PKn
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Samsuri, S.Pd.,M.Ag.

No	Program/Kegiatan	Jumlah jam per minggu								Jumlah jam
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
1.	Pembuatan Program PLT									
	a. Persiapan/ Observasi	6								6
	b. Menyusun program PLT	2		1						3
	c. Menyusun matriks Program PLT	1					2	2		5
2.	Koordinasi/ Bimbingan Rutin									
	a. Kelompok PLT	2	2	1	2	1	2	2	1	11
	b. Guru Pembimbing	4	3			1	2	1		9
	c. Dosen Pembimbing								2	2
3.	Administrasi Pembelajaran									
	a. Buku referensi	1		1	2					4
	b. Daftar hadir siswa	3								3
	c. Daftar nilai siswa	3								3
	d. Jadwal kegiatan mengajar	3								3
4.	Kegiatan Mengajar Terbimbing									
	a. Persiapan									
	1) Konsultasi	1.5		1		1				4.5
	2) Mengumpulkan Materi	2	3		1		1			7
	3) Membuat RPP	2	3		2	2	3	2		11
	4) Menyiapkan/membuat media		1	2	3	2	3	3		11
	5) Menyusun materi	1.5				1	1			4.5
	b. Mengajar									
	1) Praktik Mengajar di Kelas	4		18	18	18	18	18	20	114
	2) Penilaian dan evaluasi			8			8	8		24

Pembelajaran Ekstrakurikuler									
a. Pramuka					2				2
b. Futsal	2								2
6. Program Kelompok									
a. Pembantuan Persiapan Adiwiyata Sekolah				7	4				11
7. Kegiatan Sekolah									
a. Jalan sehat					2				2
b. Upacara Bendera Hari Senin	1			1	1	1	1	1	7
c. senam jumat			2						2
d. Literasi					1	1	1	1.5	4.5
8. Kegiatan Tambahan									
a. Piket pagi/Piket simpatik		1	1	1	1		1		5
b. Piket Harian		6	6	5	5	4	4		30
c. Tadarus rutin		1	1	1	1	1			5
d. Inventaris Buku Perpus			2.5			2	1		5.5
e. Persiapan PTS	6								6
f. Menjaga PTS		25							25
9. Penyusunan Laporan							3	13	16
JUMLAH	42	45	45	45	44	43	42	42	348

Mengetahui / Menyetujui			
Kepala Sekolah	Guru Pembimbing	Dosen Pembimbing	Mahasiswa
 Dra. Nuning Sulastri, M.M.	 Y. Suharjana, S.Pd	 Dr. Samsuri S.P.d, M.A.g	 Deni Widiyatmoko

2. Daftar Presensi Siswa

DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
Semester ... 1 Tahun Pelajaran 2017/2018

 Mata Pelajaran : PPKn

Wali Kelas :

Urut	Nomor	Nama Peserta Didik	Tanda Kehadiran KBM Pada Pertemuan Ke-..... Tanggal																				% tase Hadir	Ketr.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		X-AK1																						
1	11081	Amanda Egi Adisti	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
2	11082	Anggita Dwi Cahyaningrum	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
3	11083	Ani Nur Velani	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
4	11084	Asri Nur Fidiyawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
5	11085	Desinta Ramadha Ajeng Setyawati	✓	✓	✓	✓	S	✓																
6	11086	Desy Savitri	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
7	11087	Dita Nur Shabrina	S	✓	✓	✓	✓	✓																
8	11088	Echa Jessica Putri	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
9	11089	Fajarini Idha Sulistyowati	✓	✓	S	✓	✓	✓																
10	11090	Febriana Mega Utami	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
11	11091	Findiana Tri Astuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
12	11092	Fylma Cantik	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
13	11093	Indah Septiana	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
14	11094	Indrayani	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
15	11095	Iswati	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
16	11096	Juli Rachmawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
17	11097	Karen Alda Afraliana	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
18	11098	Kurnia Sari	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
19	11099	Lailatun Nihayah	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
20	11100	Laras Siti Nurhayati	✓	✓	✓	✓	S	✓																
21	11101	Linda Tri Astuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
22	11102	Meysa Nabila Sulistyowati	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
23	11103	Mia Rahmawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
24	11104	Nina Annisa	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
25	11105	Novitasari Putri Iswahyudi	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
26	11106	Putri Neva Sasa Khoirida	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
27	11107	Rani Dea Safitri	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
28	11108	Riska Septiyani	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
29	11109	Uzzatul Qarinah	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
30	11110	Wulan Fitri Rahayu	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
31	11111	Yuliana Liska Savitri	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
32	11112	Zeni Pupita Sari	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
Jumlah Tidak Hadir			1	-	1	-	2	-																
S : Sakit			1	-	1	-	2	-																
I : Ijin			-	-	-	-	-	-																
T : Tugas Sekolah			-	-	-	-	-	-																
A : Tanpa Keterangan			-	-	-	-	-	-																

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 1 Tempel

WKS 1

Tempel,

Guru Mata Pelajaran,

Dra. Nuning Sulastri, M.M.
NIP 19610828 198803 2 010

Dra. Rr. Ratna Wiwara N.
NIP 19681005 199412 2 006

Y. Suharjana, S Pd
NIP 19660908200701 10 11

DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
Semester ... 1 Tahun Pelajaran 2017/2018

Mata Pelajaran Ppkn Wali Kelas :

Urt	Induk	Nama Peserta Didik	Tanda Kehadiran KBM Pada Pertemuan Ke-..... Tanggal.....																				% tase Hadir	Ketr.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		X-AK2	10/10/16	17/10/16	24/10/16	31/10/16	7/11/16	14/11/16																
1	11113	Ade Fitria	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
2	11114	Arifah Eka Oktaviani	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
3	11115	Aryani Dyah Puspaningrum	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
4	11116	Ayu Vida Nurlia	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
5	11117	Azlina Eka Putri	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
6	11118	Binta Mutabaroh	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
7	11119	Desiana Alfian Rahayu	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
8	11120	Desti Azzahra	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
9	11121	Devi Ayuk Anjaswari	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
10	11122	Duwi Dita Ayu Lestari	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
11	11123	Enggar Arista Widiastuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
12	11124	Erika Febriani	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
13	11125	Fathika Yulianti	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
14	11126	Febri Fitria Ningrum	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
15	11127	Fitri Wulan Sari	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
16	11128	Hani Devitasari	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
17	11129	Khoirul Bariyah	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
18	11130	Laela Sabana Rani	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
19	11131	Lela Safitri	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
20	11132	Oktaviana Dwi Lestari	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
21	11133	Putri Cahyaningsih	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
22	11134	Ria Nur Indriana	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
23	11135	Riris Anjani	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
24	11136	Riska Julia Cahyani	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
25	11137	Risti Kurnia Putri	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
26	11138	Shofi Putri Ekadewi	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
27	11139	Tania Duwi Lestari	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
28	11140	Tri Wahyuningsih	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
29	11141	Vita Kurniawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
30	11142	Wahyu Setya Ningrum	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
31	11143	Wulan Dwi Astuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
32	11144	Wulan Yuliana Putri	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
Jumlah Tidak Hadir			-	-	-	-	-	-																
S : Sakit			-	-	-	-	-	-																
I : Ijin			-	-	-	-	-	-																
T : Tugas Sekolah			-	-	-	-	-	-																
A : Tanpa Keterangan			-	-	-	-	-	-																

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 1 Tempel WKS 1

Tempel,
Guru Mata Pelajaran,

Dra. Nuning Sulastri, M.M. Dra. Rr. Ratna Wiwara N. Y. Suharjana, S.Pd
NIP 19610828 198803 2 010 NIP 19681005 199412 2 006 NIP 19660908200701 10 11

DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018

Mata Pelajaran : Pkn Wali Kelas :

Urt	Induk	Nama Peserta Didik	Tanda Kehadiran KBM Pada Pertemuan Ke- :																				Tanggal	% tase Hadir	Ketr.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		X-TKJ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
1	10889	Aprillita Kronia Puspitawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	10890	Ari Damayanti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	10891	Bagas Wahyu Ramadhan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	10892	Danisa Cahya Utami	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	10893	Dheanika Putri Rachmadani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6	10894	Diah Ayu Rahmawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7	10895	Dian Pratiwi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8	10896	Dyah Putri Ayu Rahmadani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9	10897	Eksa Hafiz Fawzan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10	10898	Ervin Risnawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11	10899	Farellia Ayu Madakuri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12	10900	Fauzan Ghany Saputra	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
13	10901	Fitrah Erfa Ramadhani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14	10902	Iqwa Anisa Nawangsari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
15	10903	Irfan Mustofa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
16	10904	Khoirul Nurmalasari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
17	10905	Kholifatul Feby	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
18	10906	Mirna Wulandari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
19	10907	Motista Agustina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
20	10908	Muhammad Itagus Sugiantoro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
21	10909	Muhammad Ikhwan Maulana Saputra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
22	10910	Novi Nur Hanifah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
23	10911	Riekamas Raka Shiwi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
24	10912	Riski Ayu Uswatun Khasanah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
25	10913	Safitri Oktavia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
26	10914	Sahrul Amir Romadhon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
27	10915	Selviana Eka Wulandari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
28	10916	Siti Shafiatun Marfungah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
29	10917	Suranti Ika Lestari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
30	10918	Vina Febriana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
31	10919	Weni Wulandari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
32	10920	Wulan Anggraeni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Jumlah Tidak Hadir			-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
S : Sakit			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I : Ijin			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
T : Tugas Sekolah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
A : Tanpa Keterangan			-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 1 Tempel

WKS 1

Tempel,

Guru Mata Pelajaran,

Dra. Nuning Sulastri, M.M.
NIP 19610828 198803 2 010

Dra. Rr. Ratna Wiwara N.
NIP 19681005 199412 2 006

Y. Suharjana, S.Pd
NIP 19660908200701 10 11

3. Laporan Mingguan PLT



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
CATATAN HARIAN PLT
SMK NEGERI 1 TEMPEL, Jl. Magelang km 17,5 Jlegongan, Margorejo, Tempel,
Sleman, Yogyakarta

TAHUN: 2017

NAMA MAHASISWA : Deri Widiyatmoko
NO. MAHASISWA : 14401241024
FAK/JUR/PR.STUDI : FIS / PknH / Pkn

NAMA SEKOLAH : SMKN 1 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH : Jalan Magelang Km 17,5
Jlegongan, Margorejo, Sleman

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
1	Jumat, 15 Sept 2017	09.00 - 10.30	Penerjuran Mahasiswa PLT	Sebanyak 13 Mahasiswa PLT diterjunkan ke SMKN 1 TEMPEL dengan didampingi oleh Bapak Dosen Pamong BP Piji dan LPPMP.	
		10.45 - 11.30	Bimbingan PLT	Berkonultasi dengan Guru Pembimbing terkait dengan teknis mengajar yang meliputi jumlah jam mengajar, RPP, materi pembelajaran dan kondisi arah-arah SMKN 1 TEMPEL	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
2.	Sabtu, 16 Sept 2017	09.00-09.00	Rapat Koordinasi mahasiswa PLT	Jumlah 13 Mahasiswa PLT melakukan Rapat Koordinasi mengenai Jadwal Piket-harian, Piket fimpakt Ekstrakurikuler, Seragam Mengajar.	
		09.10-12.00	Periapan Ujian Tengah Semester	Mahasiswa PLT secara bersama-sama melakukan Periapan Ujian Tengah Semester yang meliputi Pendaftaran Sima dan Simi, sesuai dengan ruang dan nomor uniknya. dan Pendaftaran Karbu sesuai dengan Panitia	
		12.00-13.00	Bimbingan PLT	Konsultasi dengan Guru Pembimbing terkait dengan metode dan media pembelajaran yang baik.	



No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
3	Jenin, 18 Sept 2017	06.15-06.55	Piket Jimpantik	Mahasiswa PLT sebanyak 4 orang melaksanakan piket jimpantik dengan Para siswa dengan saling berjabat tangan dan budayakan 5S.	
		06.55-08.00	UPacara Bendera	Mahasiswa PLT bersama dengan segenap guru karyawan dan murid SMKN 1 TEMPEL melaksanakan upacara Bendera setiap hari Senin Pagi	
		08.00-12.00	Observasi kelas	Mahasiswa PLT sesuai dengan bidang jurusan masing-masing melaksanakan Observasi kelas dan pendekatan dengan murid di kelas X dan XI guna mengetahui kondisi murid di kelas serta mengetahui cara mengajar guru di kelas.	
		13.00-14.30	Persiapan Ujian Tengah Semester	Mahasiswa PLT sebanyak 6 orang membantu guru dalam membeli AMPUP Ujian dan Perumahan ruang ujian	




No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
4	Selasa 19 Sept 2017	07.30-10.00	Kuliah	Sebanyak 2 mahasiswa mengikuti kuliah dengan memahami materi dari dosen.	
		10.00 - 12.00	Melebeli Buku revisi K13 2017	Sebanyak 3 mahasiswa ikut membantu pegawai Perpustakaan untuk melebeli buku revisi K13 2017	
		13.00 - 14.45	Piket	Sebanyak 4 mahasiswa melaksanakan piket jaga di ruang Piket.	
5	Rabu, 20 Sept 2017	07.00 - 11.15	Piket	Sebanyak 4/5 mahasiswa melaksanakan piket jaga di ruang piket	
		11.15 - 13.15	Mengajar dikelas	melaksanakan pengajaran dikelas (menggantikan guru yang sedang ada acara). Perkenalan, Presentasi, dan penyampaian Kisi-kisi serta tugas.	
		13.50-14.00	Pendampingan mengajar	Mendampingi mahasiswa dalam mengajar, dokumentasi dan berkenalan dengan siswa.	


No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
6	Jumat, 22 Sept 2017	06.55-08.15	Senam Sehat	telah terlaksana Senam Sehat bersama seluruh warga SMKAS 1 TEMPEL dengan Instruktur dari luar.	
		08.15-09.45	Jasa Piket	telah terlaksana Piket harian yang diikuti oleh 4 orang mahasiswa.	
		10.00-13.00	Persiapan UTS	Mahasiswa ikut membantu guru-guru mempersiapkan UTS	
7	Sabtu, 23 Sept 2017	07.15-08.45	Mengajar di kelas	melaksanakan Praktek Pengajaran di kelas X Pm ¹	
		08.45-13.30	Persiapan Mid Semester	Persiapan Mid semester dilakukan oleh 12 Mahasiswa PLT bersama dg Guru dan karyawan yang meliputi tugas Persortiran Sosial dan jawaban MID semester, Penampilan karbu Persora Ujian dimasing-masing ruangan dan kerja bakti	


No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
8	Senin, 25 Sept 2017	07.15 - 07.30	Tadarus Rutin	Tadarus Rutin dilaksanakan bersama dengan anak-anak kelas ... berjumlah 32 siswa dengan membaca Ayat suci Al-Quran	
		07.30 - 08.30	Pendampingan UTS	kegiatan Pendampingan UTS / mengawasi UTS dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan bagian kelas masing-masing dengan jumlah siswa perkelas ada 32. Kegiatan Pendampingan UTS berjalan dengan tertib	
		09.00 - 12.00	Pendampingan UTS	kegiatan Pendampingan UTS / mengawasi UTS dilaksanakan bersama dgn Anggota mahasiswa PDL. kegiatan ini meliputi menjaga waktu ujian. kegiatan ini berjalan dengan tertib.	



No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
9	Selasa, 26 Septe 2017	07.15-07.30	Tadarus Rutin	Tadarus Rutin dilakukan kan bersama dengan siswa jumlah 32 siswa Kegiatan ini berjalan dengan lancar	
		07.30-12.00	Pendampingan UTS	Kegiatan Pendampingan UTS dilaksanakan secara bersama-sama jumlah 10 mahasiswa PLT sesuai dengan bagian kelas meeting- manis dengan Pendampingan guru yang siswanya Per Kelas 32 siswa. Kegiatan ini berjalan lancar.	
10	Rabu, 27 Septe 2017	07.15-07.30	Tadarus Rutin	Tadarus Rutin dilakukan kan bersama dengan siswa kelas X dan XI dengan jumlah siswa 32. Kegiatan ini berjalan dengan lancar Kemudian dilanjutkan dengan menyanyi lagu Kebangsaan	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
ii	Kamis, 28 Jene 2017	09:30 - 12.00	Pendampingan UTS	Kegiatan Pendampingan UTS dilakukan dengan mendampingi 4 siswa - siswa (mengawasi) dgn sejumlah mahasiswa dan guru. Sesuai dengan beban kelas masing - masing yg perkakas lsm, 32 siswa. Kegiatan ini berjalan lancar	
		07.15 - 07.30	Tadris Rutin	Tadris Rutin dilaksanakan secara bersama - sama dengan siswa kelas x dengan jumlah 32 siswa. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan tujuan meningkatkan karakter bertaqwa dan bertakwa para siswa.	
		07:30 - 12:00	Pendampingan UTS	Pendampingan UTS dilakukakan secara berdamai dengan guru dan mahasiswa PLT sejumlah 13 orang	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
12	Jumat, 29 Sept 2017	07.15 - 07.30	Tadarus Rutin	Tadarus rutin dilaksanakan secara bersama-sama dengan siswa kelas XII dengan jumlah 32 siswa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tujuan meningkatkan karakter beriman dan bertakwa Para Siswa	
		07.30 - 11.30	Pendampingan UTS	Pendampingan UTS dilakukan secara pendampingan dengan guru Pengawas Insi dan Mahasiswa PLT secara bergantian sejumlah 13 SDahasiswa	
13	Sabtu, 30 Sept 2017	07.15 - 07.30	Tadarus Rutin	tadarus rutin dilaksanakan secara bersama-sama dengan siswa kelas X dan XII dengan jumlah 32 siswa kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan tujuan meningkatkan karakter beriman dan bertakwa Para Siswa	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
		07.30-12.00	Pendampingan UTS	Pendampingan UTS dilak sakan dengan bersama guru dan mahasiswa 13 kegiatan ini berjalan lancar	
		12.00-14.00	Kerja bakti	Kerja bakti dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua warga SMkn 1 TEMPEL yang meliputi Keb. membersihkan kelas, men buat Biodori, menata ruangan dan membuat kerapian atri.	
14.	Minggu, 1 oktober 2017	07.00-08.00	Upacara Hari Keningatan Kesaktian Pancasila	Upacara Peringatan Kesak tian Pancasila dilakui oleh seluruh warga SMkn 1 Tempel. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati hari kesaktian Pancasila Pusca 6305 pki	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
15	Senin, 02 Oktober 2017	06.55-07.30	Tadarus Rutin	Tadarus Rutin di laksanakan secara bersama-sama dengan kelas XI sejumlah 32 siswa	
		07.30-08.00	Pendampingan Gerakan Literasi	Pendampingan Gerakan Literasi dilakukan oleh 2 mahasiswa PGT di kelas XI Ak2 siswa bersama-sama membaca buku.	
		08.00-08.45	Pendampingan Praktek Mengajar	mendampingi mengajar di kelas XI Ak2 kegiatan membahas soal-soal UTS.	
		09.45-13.15	Praktek mengajar	Melaksanakan Praktek mengajar. Kegiatan ini dilaksanakan meliputi Pembahasan soal dan mengoreksi jawaban dengan 32 siswa perkelas.	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
15.		Pukul 14.00 - 15.30	Melaksanakan Praktek Mengajar	Melaksanakan Praktek mengajar dikelas X Tkj. dengan kegraban membahas soal UTS sekaligus mengoreksi jawaban	
16	Selasa, 03 Oktober 2017	06.55 - 12.00	Jaga piket	melaksanakan kegiatan menjaga piket di ruang piket dengan mahasiswa.	
		12.00 - 14.00	Kerja bakti	melaksanakan kerja bakti untuk persiapan lomba Adi Wiyata.	
17	Rabu, 04 Oktober	06.55 - 07.15	Tadarus Rutin	Tadarus Rutin dilaksanakan secara bersama-sama dengan siswa kelas X Ap 3. yg berjumlah 32 siswa	
		07.15 - 08.45	Praktek mengajar	Melaksanakan Praktek mengajar dikelas X Ap 3 yang berjumlah 32 siswa. kegraban hari ini membahas soal-soal	




No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
17				UTS dan mengoreksi jawaban UTS.	
17		11.15 - 13.15	Praktek mengajar	melaksanakan Praktek mengajar dikelas XAK3. Kegiatan dikelas ini diikuti oleh 32 siswa, hari membahas soal-soal UTS dan mengoreksi jawaban UTS.	
		13.15 - 14.45	Jaga piket	melaksanakan kegiatan Jaga Piket dengan beberapa mahasiswa sebanyak 4 siswa.	
18	Kamis, 05 Oktober 2017	06.55 - 07.15	Tadarus Al-Quran	melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Quran dilaksanakan di kelas XAK2 diikuti sebanyak 32 siswa.	
		07.15 - 10.30	Praktek mengajar	melaksanakan kegiatan Praktek Mengajar dikelas XAK2 dan XAK2. Kegiatan dikelas ini	



No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
18				Adalah memeriksa soal-soal UTS dan Mengeriksa Jawaban UTS. Kegiatan diikuti oleh 26 siswa	
		10.30-14.45	Jaga Piket dan Koreksi Soal UTS	Melaksanakan kegiatan Jaga Piket dan Pengkoreksi dan soal UTS	
19	Jumate, 6 oktober 2017	06.55-07.15	Tadarus Pulin	Melaksanakan kegiatan Pembacaan Tadarus Al-Quran	
		07.15-08.15	Kerja bakti lingkungan Sekolah	Letih terlaksana kegiatan bersih-bersih di lingkungan Sekolah SMK N 1 TEMPI	
		08.15-09.45	Jaga piket	Melaksanakan kegiatan Jaga Piket	
		09.45-11.30	Koreksi Soal UTS	Melaksanakan kegiatan Pengkorekohan Soal UTS Kelas X AK1	




No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
20	Sabtu, 7 oktober 2017	06.55-07.15	Tadarus Putri	telah terlaksana kegiatan tadarus Al-Quran dengan siswa kelas X Pm1	
		07.15-08.45	Kegiatan Praktek Pembelajaran	Melaksanakan Praktek Pembelajaran di kelas X Pm1	
		10.30-12.00	Kegiatan Praktek Pembelajaran Terbimbing	Melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran Terbi mbing di kelas X Pm1	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
21	Senin, 09 oktober 2017	06.10 - 06.55 06.55 - 11.15 11.15 - 15.30	Piket Sampah Jaga piket Praktek mengajar	Melaksanakan kegiatan Piket Sampah yang dilaku kan oleh 2 mahasiswa. Melaksanakan kegiatan Jaga piket sebanyak 4 mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X Apz dan X Tkj	
22	Selasa, 10 oktober 2017	06.55 - 10.00 10.00 - 15.30	Jaga Piket Penyapan Sekolah Sehat dan Adiwiyata	Melaksanakan Kegiatan Jaga piket dengan sebanyak 4 mahasiswa Mahasiswa PLT membantu pelaksanaan Sekolah Sehat dengan membuat nama tersebut, seperti di Sekitar sekolah	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
23	Rabu, 11 Okt 2017	06.55 - 07.15	Tadarus Rutin	melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Quran dengan siswa kelas X Aps	
		07.15 - 08.45	Praktek Pembelajaran dikelas	melaksanakan Praktek Pembelajaran dikelas X Aps	
		08.45 - 10.00	Pembuatan Ppp	melaksanakan kegiatan Pembelajaran dengan pembuatan Ppp bab 3	
		11.15 - 13.15	Praktek Pembelajaran dikelas	melaksanakan kegiatan Praktek mengajar dikelas X Aps	
24	Kamis, 12 Okt 2017	06.55 - 07.15	Tadarus Rutin	melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Quran dengan siswa kelas X Aps	
		07.15 - 10.30	Praktek Pembelajaran dikelas	melaksanakan kegiatan Pembelajaran dikelas dengan X Aps dan X Pm 2	




No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
		10.50-15.30	Perستapan LSS dan Sekolah Adiwiyata	Sekonyah 13 Mahasiswa PLT membantu Ukur Sertu dalam Pelaksanaan sekolah Sehat dan Sekolah Adiwiyata meliputi: Penanaman tanaman, Pembuatan desain poster, Spanduk, Stogan	
25	Jumat, 13 okt 2017	07.30-11.30	Kerja Baku Perستapan Lomba Sekolah Sehat dan Adiwiyata	Sekonyah 13 Mahasiswa PLT membantu Ukur Sertu dalam Sekolah Sehat meliputi kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah.	
26	Sabtu, 14 oktober 2017	06.55-14.00	Kerja Baku Perستapan LSS dan adiwiyata	Sekonyah 13 mahasiswa PLT Ukur Sertu dalam Perستapan LSS dan adiwiyata. Selain itu juga piket sekolah	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
27	Senin, 16 Okt 2017	06.15 - 06.45	Piket Simpatik	Melaksanakan kegiatan piket simpatik sebanyak 2 mahasiswa	
		06.55 - 11.15	Jaga piket dan Petriapan CSJ serta Adwiyata	Melaksanakan kegiatan jaga piket dan Perotapan membantu CSJ/Adi Wiyata	
		11.15 - 13.15	Melaksanakan Praktek Pembelajaran	Melaksanakan Kegiatan Praktek pembelajaran dikelas X Mp2	
		14.00 - 15.30	Praktek Pembelajaran	Melaksanakan Praktek Pembelajaran dikelas X Tkj	
28	Selasa, 17 Okt 2017	07.30 - 09.30	Perotapan Adwiyata	Sebanyak 13 Mahasiswa PLT ikut serta dalam Perotapan fakultas adwiyata	
		09.45 - 14.45	Pengerjaan Perotapan Adwiyata	Sebanyak 15 mahasiswa membantu dalam Perotapan fakultas adwiyata meliputi Penanaman tanaman	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
29	Rabu, 18 okt 2017	06.55- 07.15	Tadarus Al-Quran	melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Quran sebanyak 1 kali X Ak 3	
		07.15- 08.45	Praktek Pembelajaran	melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dengan siswa kelas X Ak 3	
		09.00 -10.50	Pembuatan Rpp	melaksanakan kegiatan Pembuatan RPP Pembelajaran	
		11.15- 13.15	Praktek Pembelajaran	melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dengan siswa kelas X Ak 3	
		13.15 - 14.50	Jaga Piket	melaksanakan kegiatan Jaga piket sebanyak 5 mahorim	



No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
30	Kamis, 19 okt 2017	06.55-07.15 07.15-10.30 10.50-12.00 12.30-14.45	Tadarus Al-Quran Praktek Pembelajaran Pembuatan Rpp Jaga Piket	Melaksanakan Praktek kegiatan pembelajaran kegiatan Tadarus Al-Quran di kelas X Ak1 melaksanakan kegiatan Praktek pembelajaran di kelas X Ak2 dan X Pm1 Melaksanakan Pembuatan Rpp Bab 3 sub bab Cd melaksanakan kegiatan Jaga piket bersama 4 mahasiswa lainnya	
31	Jumat, 20 okt 2017	06.55-07.15 07.15-08.15	Tadarus Al-Quran Kegiatan Literasi membaca Buku	melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Quran dengan kelas X Ak1 melaksanakan kegiatan Literasi dengan X Ak1	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
31		08.15-09.45	Praktek Pembelajaran	Melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dengan siswa kelas X Ak1	
		09.45-11.30	Jaga piket dan Pembuatan media Pembelajaran	Melaksanakan kegiatan Pembuatan media Pembelajaran	
32	Sabtu, 20 Okt 2017	06.55-07.15	Tadarus Al-Quran	Melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Quran bersama kelas X Pm1	
		07.15-12.00	Praktek Pembelajaran	Melaksanakan Praktek Pembelajaran di kelas X Pm1 dan X Ap1	
		12.30-14.00	Jaga piket	Melaksanakan kegiatan jaga piket dengan 3 mahasiswa	





No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
33	Senin, 23-10-2017	06.15-06.55	Piket Simpatik	melaksanakan kegiatan Piket Simpatik. bersama guru dan siswa-siswi	
		06.55-07.15	Tadarus Al-Quran	Melaksanakan kegiatan Tadarus dengan mahasiswa dan Para siswa	
		07.15-11.00	Pembuatan RPP dan media Belajar	Melaksanakan kegiatan Pembuatan RPP dan media belajar Bab 4	
		11.15-13.15	Praktek Pembelajaran	melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X Apr2	
		14.00-15.30	Praktek Pembelajaran	Melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X Tkj	



No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
34	Selasa, 24-10-2017	10.00-14.45	Jaga Piket dan Pembuatan RPP	Melaksanakan kegiatan Jaga piket bersama 3 mahasiswa dan membuat RPP bab 4	
35	Rabu, 25-10-2017	06.55-07.15	Tadarus Al-Quran	Melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Quran dikelas X Aps	
		07.15-08.45	Praktek Pembelajaran dikelas	Melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X Aps	
		08.50-11.00	Pembuatan RPP	melanjutkan Pembuatan RPP bab 4	
		11.15-13.15	Praktek Pembelajaran dikelas	Melaksanakan kegiatan Pembelajaran dikelas dengan X Aps	



No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
		13.20-14.45			
36	Kamis, 26-10-2017	06.55-07.15	Tadarus Rutin Al-Quran	Melaksanakan kegiatan Tadaruz Al-Quran dengan kelas X AKZ	
		07.15-10.30	Praktek Pembelajaran di kelas	Melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran di kelas X AKZ dan di kelas X Amz	
		10.40-14.45	Jaga Piket	melaksanakan Jaga Piket sebanyak 3 Mahasiswa	
37	Jumat, 27-10-2017	06.55-07.15	Tadarus Rutin	melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Quran	
		07.15-08.15	Jalan Sehat	melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama seluruh warga Oskoh dan seluruh mahasiswa PKP	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
38	Sabtu, 28 Oktober 2017	08.15 - 09.45	Praktek Pembelajaran	Metaksanakan Praktek Pembelajaran di kelas X Ak1	
		09.50 - 11.30	Pembuatan media	Metaksanakan kegiatan Pembuatan media Pembelajaran	
		06.55 - 07.15	Tadarus Al Quran	Metaksanakan kegiatan Tadarus Al-Quran di kelas X Pmi1	
		07.15 - 08.45	Praktek Pembelajaran di kelas	Metaksanakan Praktek Pembelajaran di kelas X Pmi1	
		09.00 - 10.20			
		10.30 - 12.00	Praktek Pembelajaran di kelas	metaksanakan Praktek Pembelajaran di kelas X Ap1	
		12.00 - 14.00	Pembuatan Ppp	Metaksanakan kegiatan Pembuatan Ppp	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
39	Senin, 30-10-2017	06.15 - 06.55	Piket Simpatik	melaksanakan kegiatan Piket Simpatik bersama 2 mahasiswa dan Asra - Anni SMK N 1 Tempa	
		06.55. 08.00	Upacara Bendera	Melaksanakan upacara Bendera bersama seluruh Mahasiswa PLS dan seluruh warga SMK N 1 Tempa.	
		08.00 - 11.00	Konsultasi Guru Pembimbing	Melaksanakan konsultasi dengan guru pembimbing terkait Ppp semana	
		11.15 - 13.15	Praktek Pembelajaran di kelas X Ap 2	Melaksanakan Praktek Pembelajaran di kelas XAp2	
		14.00 - 15.30	Praktek Pembelajaran di kelas X Tkj	Melaksanakan Praktek Pembelajaran di kelas X Tkj	



No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
40	Selasa, 31-10-2017	08.00-10.00	Jaga piket	melaksanakan Jaga piket bersama 4 mahasiswa	
		11.00-12.00	Pembuatan RPP	Melaksanakan kegiatan Pembuatan RPP bersama Mahasiswa lainnya.	
		12.00-14.45	Jaga piket	melaksanakan kegiatan Jaga piket dikawatir bersama 3 mahasiswa	



No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
40	Rabu, 01-11-2017	06.55-07.15	Tadaruz Al-Quran	Melaksanakan Tadaruz Al-Quran di X AP3	
		07.15-08.45	Praktek Pembelajaran Terbimbing	Melaksanakan Praktek Pembelajaran Terbimbing dikelas X AP3	
		09.00 - 11.00	Konsultasi dengan Guru Pamung	Melaksanakan Kegiatan Konsultasi dengan guru Pamung terkait pembelajaran dan Praktek.	
		11.15-13.15	Praktek Pembelajaran	Melaksanakan Kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X Ak3	



No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
42	Kamis, 2-11-2017	06.55-07.15	Tadaruz Al-Quran	Melaksanakan Kegiatan Tadaruz Al-Quran dikelas X Akz	
		07.15-08.45	Praktek Pembelajaran dikelas X Akz	Melaksanakan Kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X Akz	
		08.45-10.30	Praktek Pembelajaran dikelas X Amz	Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dikelas X Amz	
		10.40-12.00	mengerjakan RPP	Melaksanakan kegiatan Pembelajaran ditatar Pembuatan RPP	
		12.30-14.40	Jaga piket	Melaksanakan kegiatan Jaga piket bersama 4 mahasiswa lainnya	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
43	Jumat, 3-11-2017	06.55-07.15	Tadaruz Rutin	Melaksanakan kegiatan Tadaruz Rutin dikelas X Ak1	
		07.15-08.15	Kegiatan Literasi	mendampingi kegiatan Literasi di kelas X Ak1	
		08.15-09.45	Praktek Pembelajaran	Melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran di kelas X Ak1	
		09.50-11.30	Pembuatan media Pembelajaran	Melaksanakan kegiatan Pembuatan media Pembelajaran	
44	Sabtu, 04-11-2017	06.55-07.15	Tadaruz Rutin	Melaksanakan kegiatan Tadaruz Al-Quran bersama kelas X Pm1	
		07.15-12.00	Praktek Pembelajaran	Melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X Pm1 dan X Ak1	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
45	Senin, 06-11-2017	12.30-14.00	Jaga Piket dan Pembuatan media Pembelajaran	Melaksanakan kegiatan Jaga Piket dan melen Jurkan Pembuatan Media Pembelajaran	
		06.15-06.55	Piket Simpatik	Melaksanakan Kegiatan Piket Simpatik bersama siswa sebanyak 10 dan mahasiswa 2 orang	
		06.55-07.40	Upacara Bendera	Melaksanakan upacara bendera bersama seluruh warga sekolah; Kegiatan Himn Per Pelaksanaan	
		08.15-11.00	Jaga Piket dan Pembuatan RPP	Melaksanakan Kegiatan Jaga Piket dan Pembuatan RPP	
		11.15-15.30	Praktek Pembelajaran	Melaksanakan Pembelajaran dikelas X A ₁ dan X TKJ	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
46.	Selasa, 07-11-2017	07.15 - 09.00	Jaga Piket	melaksanakan kegiatan Jaga Piket bersama 2 mahasiswa	
		09.00 - 11.00	Pembuatan media Pembelajaran	melaksanakan kegiatan pembuatan media Pembelajaran.	
		12.00 - 14.45	Jaga Piket	melaksanakan kegiatan Jaga Piket bersama 2 mahasiswa	
47.	Rabu, 08-11-2017	06.55 - 07.15	Tadaruz Rutin	melaksanakan kegiatan Tadaruz Rutin dikelas X A3	
		07.15 - 08.45	Praktek Pembelajaran	melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X A3	
		08.50 - 11.00	Pembuatan RPP	meranjutkan Pembuatan Rpp	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
48.	Kamis, 09-11-2017	11.15-13.15	Praktek Pembelajaran	melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X AK3	
		13.30-14.45	Inventaris Buku Perpus	membantu menginventaris Buku Perpus sebanyak 4 mahasiswa	
		06.55-07.15	Tadarus Rutin	melaksanakan kegiatan Tadarus Rutin dengan siswa X AK2	
		07.15-10.30	Praktek Pembelajaran	melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X AK2 dan kelas X AK2	
		10.40-12.00	Pembuatan Laporan	membuat laporan hasil kegiatan PLT	
		13.00-14.45	Inventaris Buku Perpus	melanjutkan Inventaris Buku Perpus sebanyak 2 mahasiswa	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
49	Jumat, 10-11-2017	06.55-07.45	Upacara Bendera dalam rangka "Hari Pahlawan"	Melaksanakan kegiatan upacara bersama seluruh warga sekolah dan 13 mahasiswa	
		08.15-09.45	Praktek Pembelajaran	melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X.Atk1	
		10.00-11.30	Pembuatan Laporan PLT	melaksanakan kegiatan Pembuatan Praktek Belajar Pembuatan Laporan PLT	
50	Sabtu, 11-11-2017	06.55-07.15	Tadaruz Quran	melaksanakan kegiatan Tadaruz Al Quran	
		07.15-12.00	Praktek Pembelajaran	melaksanakan kegiatan Praktek Pembelajaran dikelas X Pml dan X Api	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
51	Senin, 13-11-2017	12.30-14.00	Pembuatan Laporan PLT	melaksanakan Kegiatan Pembuatan Laporan PLT	
		06.15-06.55	Piket Simpatik	melaksanakan kegiatan Piket Simpatik bersama Siswa sebanyak 10 dan mahasiswa 2 orang	
		06.55-07.40	UPacara Bendera	melaksanakan upacara Bendera bersama seluruh Warga Sekolah sekalgus Pamtsan	
		08.15-11.00	Pembuatan Laporan PLT	melaksanakan Pembuatan Laporan PLT	
		11.15-13.15	Praktek Pembekajaran	melaksanakan Pembekajaran diker X Ap2	
		13.20-15.30	Pembuatan Laporan PLT	melaksanakan Pembuatan Laporan PLT	

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
52	Selasa, 14-11-2017	06.55-07.15	Tadarus Rutin	melaksanakan kegiatan Tadarus Rutin	
		07.15-09.00	Jaga Piket	melaksanakan Jaga Piket sebanyak 3 mahasiswa	
		09.00-10.45	Pembuatan Laporan PLT	melanjutkan melaksanakan kegiatan Pembuatan Laporan.	
53	Rabu, 15-11-2017	06.55-07.15	Tadarus Rutin	melaksanakan kegiatan Tadarus Rutin	
		07.15-10.00	Pembuatan Laporan PLT dan Jaga Piket	melaksanakan kegiatan Pembuatan Laporan PLT	
		11.00-12.00	Persiapan Penarikan PLT	menyapkan Persiapan Untuk Penarikan PLT	
		12.00-13.30	Penarikan PLT	Kegiatan Pelaksanaan Penarikan PLT oleh DPL bersama kerabat fakultas dan Para Guru.	

4.LAPORAN DANA



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN DANA PELAKSANAAN PLT
2017

F03
Untuk Mahasiswa

NAMA SEKOLAH : SMK Negeri 1 Tempel
ALAMAT SEKOLAH : Jalan Magelang KM 17, Tempel, Sleman
GURU PEMBIMBING : Y. Suharjana, S.Pd.

NAMA MAHASISWA : Deni Widiyatmoko
NIM : 14401241024
FAK/PRODI : FIS/ PKnH
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Samsuri, S.Pd.,M.Ag.

No	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif / Kuantitatif	Serapan Dana (Dalam Rp)				
			Swadaya/ Sekolah/ Lembaga	Mahasiswa	Pemda Kab.	Sponsor/ Lembaga lainnya	Jumlah
1	Mencetak RPP Pertemuan Pertama	Kualitatif: RPP dicetak beserta materi Kuantitatif: Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan pertama		Rp 10.000,00			Rp 10.000,00
2	Mencetak RPP Pertemuan Kedua	Kualitatif: RPP dicetak beserta materi Kuantitatif: Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan kedua		Rp 7.000,00			Rp 7.000,00

3	Mencetak RPP Pertemuan Ketiga	Kualitatif: RPP dicetak beserta materi . Kuantitatif: Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan ketiga		Rp 11.000,00			Rp 11.000,00
4	Mencetak RPP Pertemuan Keempat	Kualitatif: RPP dicetak beserta materi Kuantitatif: Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan keempat		Rp 6.000,00			Rp 6.000,00
5	Mencetak RPP Pertemuan Kelima	Kualitatif: RPP dicetak beserta materi Kuantitatif: Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan kelima		Rp 7.000,00			Rp 7.000,00
6	Mencetak RPP Pertemuan Keenam	Kualitatif: RPP dicetak beserta materi Kuantitatif: Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan keenam		Rp 9.000,00			Rp 9.000,00
7	Mencetak RPP Pertemuan Ketujuh	Kualitatif: RPP dicetak beserta materi Kuantitatif: Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan ketujuh		Rp 6.000,00			Rp 6.000,00
8	Mencetak RPP	Kualitatif:		Rp 4.000,00			Rp 4.000,00

	Pertemuan Kedelapan	RPP dicetak beserta materi Kuantitatif: Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan kedelapan					
Jumlah							Rp 60.000,00

Mengetahui:

Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga

Dosen Pembimbing Lapangan

Mahasiswa

Dra. Nuning Sulastri, M.M
NIP. 19610828 198803 2 010

Dr. Samsuri, S.Pd.,M.Ag
NIP. 19720619 200212 1 001

Deni Widiyatmoko
NIM. 14401241024

5. RPP KELAS X

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Tahun Pelajaran : 2017/ 2018

Nama Sekolah	:	SMK Negeri 1 Tempel		
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Nomor RPP	02
Kelas	:	X (sepuluh)	Semester	Ganjil
Materi Pokok	:	Menganalisis ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.		
Kriteria Ketuntasan Minimal / KKM	:	75	(Tujuh puluh lima)	
Alokasi Waktu	:	2 x 45 menit		
Pertemuan ke	:	2		
Topik pertemuan ini	:	2. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia		

A. Kompetensi Inti (KI)

Kelas X

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi.

No.	Kompetensi Dasar	No.	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.2	Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.	1.2.1	Membangun nilai-nilai menghargai secara adil ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
2.2	Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan .	1.2.2	Membangun nilai-nilai kerja sama secara adil ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
3.2	Menganalisis ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan	3.2.1.	Mengidentifikasi Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia meliputi batas wilayah darat dan laut

	dan keamanan.		
		3.2.2.	<u>Menjelaskan dan membedakan Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, asas umum kewarganegaraan naturalisasi istimewa dan biasa.</u>
		3.2.3	Meganalisis kemerdekaan beragama, berkepercayaan di Indonesia dan sistem pertahanan dan keamanan RI
4.2	Menyaji hasil analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	4.2.1	Menyaji hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.
		4.2.2	Mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ke 2

Kompetensi sikap Spiritual

1. Peserta didik mampu melaksanakan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran tentang Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut agama masing-masing dengan khusyu'.
2. Peserta didik dapat menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas kedudukan warga Negara dan penduduk dengan tulus.

Kompetensi Sikap Sosial

1. Peserta didik mampu menampilkan sikap tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran.
2. Peserta didik dapat menampilkan sikap kerja keras dan menyelesaikan setiap tugas pembelajaran dengan semangat pantang menyerah.
3. Peserta didik mampu melaksanakan gotong-royong dalam menyelesaikan tugas bersama dengan penuh kebersamaan.
4. Menampilkan sikap peduli terhadap teman yang membutuhkan bantuan dengan tulus.

Kompetensi Pengetahuan

1. Peserta didik mampu menguraikan status warga Negara Indonesia dengan baik dan benar.
2. Peserta didik mampu menguraikan asas-asas kewarganegaraan Indonesia dengan baik dan benar.
3. Peserta didik mampu menguraikan syarat-syarat menjadi warga Negara Indonesia dengan baik dan benar.
4. Peserta didik mampu menguraikan penyebab hilangnya kewarganegaraan indonesia dengan baik dan benar.

Kompetensi Keterampilan

1. Peserta didik mampu Menyaji hasil analisis tentang kenapa seseorang bisa memiliki status kewarganegaraan ganda dengan tepat dan sistematis
2. Peserta didik mampu menyaji hasil analisis tentang kenapa seseorang tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda dengan tepat dan sistematis

3. Peserta didik mampu menyaji hasil analisis tentang kenapa seseorang WNA bisa memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tanpa upaya hukum dengan tepat dan sistematis
4. Peserta didik mampu menyaji hasil analisis tentang kenapa seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya dengan tepat dan sistematis

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini terbagi menjadi tiga jenis, antara lain Materi Pembelajaran Reguler, Materi Pembelajaran Pengayaan, dan Materi Pembelajaran Remedial.

1. Materi Pembelajaran Reguler

Materi Pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran reguler adalah sebagai berikut:

- a. Status Warga Negara Indonesia
- b. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia
- c. Syarat-syarat menjadi warga Negara Indonesia
- d. Penyebab hilangnya kewarganegaraan indonesia

2. Materi Pembelajaran Remedial

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang belum atau kesulitan menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyajikan kembali pengertian status warga Negara Indonesia, asas-asas kewarganegaraan, syarat-syarat menjadi WNI dan penyebab hilangnya kewarganegaraan.
- b. Membuat pertanyaan mengenai bagian dari materi pembelajaran Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia yang dianggap sulit dimengerti atau dikuasai, kemudian cari informasi, bertanya kepada teman atau ahli untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun tersebut (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 3).

3. Materi Pembelajaran Pengayaan

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan hasil elaborasi peserta didik.
- b. Menganalisis contoh kasus hilangnya kewarganegaraan seseorang (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2).

E. Pendekatan, Model dan Metode

1. Pendekatan : Saintifik
2. Model : Discovery Learning dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok
3. Metode : Diskusi, Presentasi, dan penugasan

F. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media Pembelajaran
Power Point tentang Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia, dan Video terkait Kewarganegaraan.
2. Alat dan Bahan Pembelajaran
Laptop, LCD, Spidol, Penghapus, *Whiteboard*.

G. Sumber Belajar :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014 Pendidikan Pancasila dan
2. Kewarganegaraan Buku Peserta Didik SMA/MA/SMK/MAK Kelas X , Jakarta .
3. R.M Setiadi dkk, 2012 Pendidikan Kewarganegaraan , Erlangga
4. Bambang Tri Purwanto dkk, 2010 Kewarganegaraan kelas X ,Platinum Tiga Serangkai
5. Sekretariat Jendral MPR .RI, 2007 Materi sosialisasi UUD NRI tahun 1945, Jakarta

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	Kegiatan Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik	15 menit

	<p>untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Guru memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. 3. Peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan menjelaskan tujuan dari menyanyikan lagu tersebut. 4. Guru melakukan apersepsi materi sebelumnya 5. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. (<i>Terlampir</i>) 	
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengamati <ul style="list-style-type: none"> • Guru menayangkan Power Point terkait Status WNI, asas-asas kewarganegaraan, syarat-syarat menjadi WNI, dan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia kemudian siswa diminta untuk mengamati materi tersebut. • Guru memutar Video yang terkait dengan materi Status kewarganegaraan Indonesia kemudian siswa diminta untuk mengamati tayangan video yang diputarkan oleh guru. b. Menanya <ul style="list-style-type: none"> • Guru meminta peserta didik mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin diketahui setelah mengamati sub bab materi mengenai Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia yang telah dijelaskan oleh Guru didepan kelas. 	60 menit

	<p>c. Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membentuk 4 kelompok masing-masing berjumlah 8 orang kemudian guru membagikan tema diskusi untuk perkelompok sesuai dengan materi yang telah disampaikan. • Peserta didik mencari informasi secara kelompok melalui sumber-sumber informasi yang relevan, antara lain buku, jurnal, koran, dan surat kabar. <p>d. Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menalar atau menyusun jawaban atau alternatif pemecahan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dari buku atau internet; video, media sosial lainnya. <p>e. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara random (perwakilan kelompok) hasil dari diskusi kelompok dengan dibimbing oleh guru. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil pekerjaan peserta didik. 	
3.	<p>Penutup</p> <p>a. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia”.</p> <p>b. Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan materi “Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia” yang telah di bahas, sebagai refleksi.</p>	15 menit

	<p>c. Guru memberikan tugas untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia”</p> <p>d. Guru mengakhiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.</p>	
--	---	--

Penilaian

1. Teknik Penilaian.

a. Sikap Spiritual

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 5	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran

b. Sikap Sosial

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 6	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran

c. Pengetahuan

No	Teknik	Bentuk	Butir	Waktu	Keterangan
----	--------	--------	-------	-------	------------

		Instrumen	Instrumen	Pelaksanaan	
1.	Tertulis	Soal Pilihan Ganda (<i>Multiple Choice</i>)	Lihat Lampiran 4	Setelah pembelajaran usai	Penilaian pencapaian pembelajaran

d. Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Praktik	Tugas (Keterampilan)	Lihat Lampiran 7	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian pencapaian pembelajaran

2. Pembelajaran Remedial

Bagi peserta didik yang kesulitan dan memperoleh nilai kurang baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas remedial berupa pembelajaran ulang. Tugas pembelajaran remedial secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 3.

3. Pembelajaran Pengayaan

Bagi peserta didik yang memperoleh nilai baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas pengayaan berupa analisis contoh Kasus hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Tugas pembelajaran pengayaan secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 2.

LAMPIRAN 1

MATERI PEMBELAJARAN REGULER

A. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

1. Status Warga Negara Indonesia,

Rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :

- Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (pasal 26 ayat 1)
- Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal Indonesia. (pasal 26 ayat 2)
- Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. UU Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Yang disahkan oleh Presiden Sulilo Bambang Yudoyono tanggal 1 Agustus 2006

2. Perbedaan antar Warga negara, Penduduk dan Rakyat .

- a) Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara.
Bukan penduduk :orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
- b) Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara,
Bukan warga negara :orang asing atau warga negara asing.
- c) Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara

Menurut UU No. 12 tahun 2006 yang menjadi warga negara :

- a) Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.
- b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
- c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.

- d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- e) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
- f) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
- g) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
- h) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- i) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- j) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- k) Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
- l) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

B. Asas umum untuk menentukan kewarganegaraan sesuai UU No. 12 tahun 2006 di Indonesia :

- a) Asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- b) Asas *ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
- c) Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

- d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

C. Pengertian bipatride dan apatride .

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas *ius soli* maupun *ius sanguinis*, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk.

- a) Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas *ius soli* lahir di negara B yang menganut asas *ius sanguinis*. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
- b) Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara A yang menganut asas *ius soli*. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya.

D. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut :

- a) Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (*naturalisasi biasa*) diatur dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006,
- b) Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (*naturalisasi istimewa*). Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut :

- a) Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- b) Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

E. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
- c) Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
- d) Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.
- e) Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
- f) Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
- g) Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
- h) Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- i) Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara. Tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

TUGAS PENGAYAAN

A. Mencermati dan menyajikan kembali Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
- c) Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
- d) Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.
- e) Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
- f) Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
- g) Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
- h) Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- i) Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara. Tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis

B. Analisis Kasus hilangnya kewarganegaraan indonesia

Dari pencermatan kembali penyebab hilangnya kewarganegaraan indonesia, cobalah untuk menganalisis contoh Kasus hilangnya kewarganegaraan Indonesia.

LAMPIRAN 3

TUGAS REMIDIAL

Untuk membantu memahami kembali materi Kedudukan warga Negara dan penduduk Indonesia, kerjakanlah tugas berikut ini!

1. Jelaskan pengertian dari status warga Negara Indonesia, asas-asas kewarganegaraan, syarat-syarat menjadi WNI dan penyebab hilangnya kewarganegaraan indonesia !
2. Buatlah pertanyaan mengenai bagian dari materi Kedudukan warga Negara dan penduduk Indonesia yang menurutmu sulit dipahami dan dikuasai, kemudian carilah sumber informasi, atau bertanya kepada teman maupun ahli untuk membantu menyusun jawaban dari pertanyaan yang telah disusun. Tuangkanlah dalam format berikut ini!

No	Pertanyaan	Sumber Informasi	Jawaban
1	(misal: buku, harus dituliskan judul buku, penulis/pengarang dan penerbit.) (Jika ahli atau teman, tuliskan identitas temanmu dan jawaban/tanggapan yang diberikan) (diisi jawaban yang telah disusun berdasar pemikiranmu dan dari sumber informasi.)
2

LAMPIRAN 4

KUIS TOPIK Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

(Tes Formatif)

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum mengerjakan kuis
2. Pilihlah jawaban yang menurut anda tepat dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban, A, B, C, D, atau E yang tersedia.
3. Kerjakan secara mandiri
4. Dilarang membuka buku catatan, buku teks atau sumber informasi lainnya dalam menjawab kuis, dan bertanya kepada orang lain.

SOAL

1. Asas kewarganegaraan yang berdasarkan pada pertalian darah yaitu
 - a) apatride
 - b) opsi
 - c) ius sanguinis
 - d) ius soli
 - e) bipatride
2. Yang dimaksud dengan warga negara yaitu
 - a) orang yang tinggal sejak berdirinya negara
 - b) penduduk suatu negara
 - c) orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara
 - d) penghuni suatu negara
 - e) orang yang secara sah tinggal di suatu Negara

3. Dalam proses pewarganegaraan ketika seseorang dianggap menjadi warga negara dengan melakukan tindakan hukum menganut ketentuan

- a) hak opsi
- b) stelsel aktif
- c) naturalisasi
- d) stelsel pasif
- e) hak repudiasi

4. Berikut ini yang bukan merupakan cara untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU No. 12 tahun 2006, yaitu....

- a) permohonan
- b) kelahiran
- c) pembelian
- d) perkawinan
- e) pemberian

Kunci Jawaban

Nomor 1 = C

Nomor 2 = C

Nomor 3 = B

Nomor 4 = C

SKOR = JUMLAH BETUL X 25

LAMPIRAN 5

Instrumen penilaian sikap spiritual

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Adi)	(misal: Suka rela memimpin doa saat sebelum pelajaran dimulai)	(misal: percaya diri)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas kesukarelaannya memimpin berdoa sebelum pelajaran dimulai)

LAMPIRAN 6

Instrumen penilaian sikap sosial

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Rechel)	(misal: aktif membantu teman-teman sekelasnya membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)	(misal: Gotong Royong)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas keaktifannya daalm membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)

LAMPIRAN 7

Instrumen Penilaian Keterampilan

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / Satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Nama peserta didik / nama kelompok	Skor untuk				Jumlah Skor	Nilai
		Pendahuluan	Inti	Penutup	Penyusunan hasil telaah		
1							
2							
3							

Mengetahui
Guru Pembimbing

Yustinus Suharjana, S.Pd.
NIP 19660908 200701 1 01

Sleman, 28 Mei 2017

Guru PLT Mata Pelajaran

Deni Widiyatmoko
14401241024

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Tahun Pelajaran : 2017/ 2018

Nama Sekolah	:	SMK Negeri 1 Tempel		
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Nomor RPP	03
Kelas	:	X (sepuluh)	Semester	Ganjil
Materi Pokok	:	Menganalisis kewenangan Lembaga-Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
Kriteria Ketuntasan Minimal / KKM	:	75	(Tujuh puluh lima)	
Alokasi Waktu	:	2 x 45 menit		
Pertemuan ke	:	1		
Topik pertemuan ini	:	Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia		

B. Kompetensi Inti (KI)

Kelas X

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi.

No.	Kompetensi Dasar	No.	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.3	Mengorganisasi nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil	1.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		1.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.3	Mengorganisasikan nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.3	Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.3.1	Mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia
		3.3.2	Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945
		3.3.3	Menganalisis impeachment dalam Ketatanegaraan RI
		3.3.4	

		3.3.5	Menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI
4.3	Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3.1 4.3.2	Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ke 2

Kompetensi sikap Spiritual

3. Peserta didik mampu melaksanakan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran tentang Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia menurut agama masing-masing dengan khusyu'.
4. Peserta didik dapat menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia dengan tulus.

Kompetensi Sikap Sosial

5. Peserta didik mampu menampilkan sikap tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran.

6. Peserta didik dapat menampilkan sikap kerja keras dan menyelesaikan setiap tugas pembelajaran dengan semangat pantang menyerah.
7. Peserta didik mampu melaksanakan gotong-royong dalam menyelesaikan tugas bersama dengan penuh kebersamaan.
8. Menampilkan sikap peduli terhadap teman yang membutuhkan bantuan dengan tulus.

Kompetensi Pengetahuan

5. Peserta didik mampu menguraikan Suprastruktur Politik dengan baik dan benar.
6. Peserta didik mampu menguraikan Infrastruktur Politik dengan baik dan benar.
7. Peserta didik mampu mengidentifikasi Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia dengan baik dan benar.

Kompetensi Keterampilan

5. Peserta didik mampu menelaah hasil telaah isi analisis tentang Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia dengan tepat dan sistematis
6. Peserta didik mampu menyaji hasil analisis tentang Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia dengan penuh semangat dan tanggung jawab

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini terbagi menjadi tiga jenis, antara lain Materi Pembelajaran Reguler, Materi Pembelajaran Pengayaan, dan Materi Pembelajaran Remedial.

4. Materi Pembelajaran Reguler

Materi Pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran reguler adalah sebagai berikut:

- a. Suprastruktur Politik
- b. Infrastruktur Politik

5. Materi Pembelajaran Remedial

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang belum atau kesulitan menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- c. Menyajikan kembali pengertian Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
- d. Membuat pertanyaan mengenai bagian dari materi pembelajaran Suprastruktur dan Infrastruktur Politik yang dianggap sulit dimengerti atau dikuasai, kemudian cari informasi, bertanya kepada teman atau ahli untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun tersebut (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 3).

6. Materi Pembelajaran Pengayaan

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- c. Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa pengertian dari para ahli mengenai infrastruktur dan suprastruktur politik berdasarkan hasil elaborasi peserta didik.
- d. Menganalisis contoh peranan organisasi Infrastruktur Politik dalam sistem politik di Indonesia (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2).

E. Pendekatan, Model dan Metode

- 4. Pendekatan : Saintifik
- 5. Model : Discovery Learning dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok
- 6. Metode : Diskusi, Presentasi, dan penugasan

F. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar

- 3. Media Pembelajaran
Power Point tentang Infrastruktur dan Suprastruktur Politik dan Video terkait Infrastruktur dan Suprastruktur Politik
- 4. Alat dan Bahan Pembelajaran
Laptop, LCD, Spidol, Penghapus, *Whiteboard*.

G. Sumber Belajar :

- 6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014 Pendidikan Pancasila dan
- 7. Kewarganegaraan Buku Peserta Didik SMA/MA/SMK/MAK Kelas X , Jakarta .
- 8. R.M Setiadi dkk, 2012 Pendidikan Kewarganegaraan , Erlangga
- 9. Bambang Tri Purwanto dkk, 2010 Kewarganegaraan kelas X ,Platinum Tiga Serangkai

10. Sekretariat Jendral MPR .RI, 2007 Materi sosialisasi UUD NRI tahun 1945,
 Jakarta

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	<p>Kegiatan Pendahuluan</p> <p>6. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar.</p> <p>7. Guru memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar siswa.</p> <p>8. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan sub materi yang sudah diberikan pertemuan sebelumnya tentang Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia</p> <p>9. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Infrastruktur dan Suprastruktur Politik” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. <i>(Terlampir)</i></p>	15 menit
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>f. Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru menayangkan Power Point terkait pengertian mengenai Infrastruktur dan Suprastruktur Politik kemudian siswa diminta untuk mengamati materi tersebut. • Guru memutarakan Video yang terkait dengan materi Infrastruktur dan Suprastruktur Politik kemudian siswa diminta untuk mengamati tayangan video yang diputarakan oleh guru. 	60 menit

	<p>g. Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru meminta peserta didik mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin diketahui setelah mengamati sub bab materi mengenai Infrastruktur dan Suprastruktur Politik yang telah dijelaskan oleh Guru didepan kelas. <p>h. Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membentuk 4 kelompok masing-masing berjumlah 8 orang kemudian guru membagikan tema diskusi untuk perkelompok sesuai dengan materi yang telah disampaikan. • Peserta didik mencari informasi secara kelompok melalui sumber-sumber informasi yang relevan, antara lain buku, jurnal, koran, dan surat kabar. <p>i. Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menalar atau menyusun jawaban atau alternatif pemecahan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dari buku atau internet; video, media sosial lainnya. <p>j. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara random (perwakilan kelompok) hasil dari diskusi kelompok dengan dibimbing oleh guru. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil pekerjaan peserta didik. 	
3.	Penutup	15 menit

	<p>e. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Infrastruktur dan Suprastruktur Politik”.</p> <p>f. Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan materi “Infrastruktur dan Suprastruktur Politik” yang telah di bahas, sebagai refleksi.</p> <p>g. Guru memberikan tugas untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945”</p> <p>h. Guru mengakhiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.</p>	
--	---	--

Penilaian

4. Teknik Penilaian.

e. Sikap Spiritual

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 5	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran

f. Sikap Sosial

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 6	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian

					pembelajaran
--	--	--	--	--	--------------

g. Pengetahuan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Tertulis	Soal Pilihan Ganda (<i>Multiple Choice</i>)	Lihat Lampiran 4	Setelah pembelajaran usai	Penilaian pencapaian pembelajaran

h. Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Praktik	Tugas (Keterampilan)	Lihat Lampiran 7	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian pencapaian pembelajaran

5. Pembelajaran Remedial

Bagi peserta didik yang kesulitan dan memperoleh nilai kurang baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas remedial berupa pembelajaran ulang. Tugas pembelajaran remedial secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 3.

6. Pembelajaran Pengayaan

Bagi peserta didik yang memperoleh nilai baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas pengayaan berupa analisis contoh peranan organisasi Infrastruktur Politik dalam sistem politik di Indonesia Tugas pembelajaran pengayaan secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 2.

LAMPIRAN 1

MATERI PEMBELAJARAN REGULER

Materi pertemuan 1

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

1. Suprastruktur

Pengertian Sistem Politik

Sistem adalah *suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional.*

Politik : *semua kegiatan yang menghasilkan suatu keputusan*

Beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat *interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.*
- b. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup *dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.*
- c. Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai *pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat* tersebut.

- d. Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik *merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.*

Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain:

1. Daya jangkauanya *universal*, meliputi semua anggota masyarakat.
2. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik.
3. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah.
4. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

2. **Infrastruktur**

Infrastruktur politik adalah *kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif.*

Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan sebagai berikut.

1. **Partai Politik**, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.(PPP,PDIP, GOLKAR, GERINDRA) dll



2. **Kelompok Kepentingan (*interest group*)**, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. (Ormas, serikat dagang, serikat buruh) dll.

3. **Kelompok Penekan (*pressure group*)**, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka (LSM, LBH, YLKI) dll

4. **Media komunikasi politik**, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak

seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.

LAMPIRAN 2

TUGAS PENGAYAAN

C. Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa pengertian dari para ahli mengenai infrastruktur dan suprastruktur politik

Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

1. Suprastruktur

Pengertian Sistem Politik

Sistem adalah *suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional.*

Politik : *semua kegiatan yang menghasilkan suatu keputusan*

Beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, di antaranya adalah sebagai berikut :

- e. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat *interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.*
- f. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup *dua*

hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.

- g.** Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai *pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat* tersebut.
- h.** Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik *merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.*

Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain:

- 5. Daya jangkauanya *universal*, meliputi semua anggota masyarakat.
- 6. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik.
- 7. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah.
- 8. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

2. Infrastruktur

Infrastruktur politik adalah *kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif.*

D. Analisis Contoh peranan organisasi Infrastruktur Politik dalam sistem politik di Indonesia

Dari pencermatan kembali contoh peranan organisasi Infrastruktur Politik dalam sistem politik di Indonesia

LAMPIRAN 3

TUGAS REMIDIAL

Untuk membantu memahami kembali materi Kedudukan warga Negara dan penduduk Indonesia, kerjakanlah tugas berikut ini!

3. Jelaskan pengertian mengenai Suprastruktur dan Infrastruktur Politik !
4. Buatlah pertanyaan mengenai bagian dari materi Suprastruktur dan Infrastruktur Politik yang menurutmu sulit dipahami dan dikuasai, kemudian carilah sumber informasi, atau bertanya kepada teman maupun ahli untuk membantu menyusun jawaban dari pertanyaan yang telah disusun. Tuangkanlah dalam format berikut ini!

No	Pertanyaan	Sumber Informasi	Jawaban
1	(misal: buku, harus dituliskan judul buku, penulis/pengarang dan penerbit.) (Jika ahli atau teman, tuliskan identitas temanmu dan jawaban/tanggapan yang diberikan) (diisi jawaban yang telah disusun berdasar pemikiranmu dan dari sumber informasi.)
2

LAMPIRAN 4

KUIS TOPIK Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

(Tes Formatif)

Petunjuk:

5. Berdoalah sebelum mengerjakan kuis
6. Pilihlah jawaban yang menurut anda tepat dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban, A, B, C, D, atau E yang tersedia.
7. Kerjakan secara mandiri
8. Dilarang membuka buku catatan, buku teks atau sumber informasi lainnya dalam menjawab kuis, dan bertanya kepada orang lain.

SOAL

1. Pemisahan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif disebut....
 - a. Bicameral
 - b. Kabinet ministerial
 - c. Kabinet presidensial
 - d. Trias politica
 - e. Moncreameal
2. Fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi....
 - a. legislatif
 - b. pengawasan
 - c. kontrol
 - d. anggaran
 - e. pengambilan keputusan
3. Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama disebut....

- a. kelompok penekan
- b. kelompok kepentingan
- c. partai politik
- d. media komunikasi politik
- e. pers

4. Berikut adalah lembaga-lembaga yang termasuk di dalam supra struktur politik Indonesia, kecuali....

- a. Mahkamah konstitusi
- b. Badan Pemeriksa Keuangan
- c. Partai politik
- d. Pemerintah Daerah
- e. Dewan Perwakilan Rakyat

Kunci Jawaban

Nomor 1 = D

Nomor 2 = A

Nomor 3 = C

Nomor 4 = C

SKOR = JUMLAH BETUL X 25

LAMPIRAN 5

Instrumen penilaian sikap spiritual

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Adi)	(misal: Suka rela memimpin doa saat sebelum pelajaran dimulai)	(misal: percaya diri)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas kesukarelaannya memimpin berdoa sebelum pelajaran dimulai)

LAMPIRAN 6

Instrumen penilaian sikap sosial

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Rechel)	(misal: aktif membantu teman-teman sekelasnya membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)	(misal: Gotong Royong)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas keaktifannya daalm membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)

LAMPIRAN 7

Instrumen Penilaian Keterampilan

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / Satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Nama peserta didik / nama kelompok	Skor untuk				Jumlah Skor	Nilai
		Pendahuluan	Inti	Penutup	Penyusunan hasil telaah		
1							
2							
3							

Mengetahui
Guru Pembimbing

Yustinus Suharjana, S.Pd.
NIP 19660908 200701 1 01

Sleman, 30 September 2017

Guru PLT Mata Pelajaran

Deni Widiyatmoko
14401241024

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Tahun Pelajaran : 2017/ 2018

Nama Sekolah	:	SMK Negeri 1 Tempel		
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Nomor RPP	03
Kelas	:	X (sepuluh)	Semester	Ganjil
Materi Pokok	:	Menganalisis kewenangan Lembaga-Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
Kriteria Ketuntasan Minimal / KKM	:	75	(Tujuh puluh lima)	
Alokasi Waktu	:	2 x 45 menit		
Pertemuan ke	:	2		
Topik pertemuan ini	:	Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945		

C. Kompetensi Inti (KI)

Kelas X

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

2.3	Mengorganisasikan nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.3	Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.3.1	Mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia
		3.3.2	Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945
		3.3.3	Menganalisis impeachment dalam Ketatanegaraan RI
		3.3.4	Menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik

		3.3.5	Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI
4.3	Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3.1	Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		4.3.2	Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ke 2

Kompetensi sikap Spiritual

5. Peserta didik mampu melaksanakan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran tentang Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 menurut agama masing-masing dengan khusyu'.
6. Peserta didik dapat menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 dengan tulus.

Kompetensi Sikap Sosial

9. Peserta didik mampu menampilkan sikap tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran.
10. Peserta didik dapat menampilkan sikap kerja keras dan menyelesaikan setiap tugas pembelajaran dengan semangat pantang menyerah.

11. Peserta didik mampu melaksanakan gotong-royong dalam menyelesaikan tugas bersama dengan penuh kebersamaan.
12. Menampilkan sikap peduli terhadap teman yang membutuhkan bantuan dengan tulus.

Kompetensi Pengetahuan

8. Peserta didik mampu menguraikan pengertian Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 dengan baik dan benar.
9. Peserta didik mampu menguraikan Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 dengan baik dan benar.

Kompetensi Keterampilan

7. Peserta didik mampu menelaah hasil telaah isi analisis tentang Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 dengan tepat dan sistematis
8. Peserta didik mampu menyaji hasil analisis tentang Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 dengan penuh semangat dan tanggung jawab

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini terbagi menjadi tiga jenis, antara lain Materi Pembelajaran Reguler, Materi Pembelajaran Pengayaan, dan Materi Pembelajaran Remedial.

7. Materi Pembelajaran Reguler

Materi Pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran reguler adalah sebagai berikut:

- c. Pengertian Lembaga-lembaga Negara
- d. Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara

8. Materi Pembelajaran Remedial

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang belum atau kesulitan menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- e. Menyajikan kembali pengertian dari Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945
- f. Membuat pertanyaan mengenai bagian dari materi pembelajaran Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap sulit dimengerti atau dikuasai, kemudian cari informasi, bertanya kepada teman atau ahli untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun tersebut (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 3).

9. Materi Pembelajaran Pengayaan

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- e. Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa dari tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan hasil elaborasi peserta didik.
- f. Menganalisis contoh tugas dan wewenang salah satu dari Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2).

E. Pendekatan, Model dan Metode

7. Pendekatan : Saintifik
8. Model : Discovery Learning dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok
9. Metode : Diskusi, Presentasi, dan penugasan

F. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar

5. Media Pembelajaran
Power Point tentang Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 dan Foto yang terkait dengan materi Lembaga-lembaga Negara di Indonesia
6. Alat dan Bahan Pembelajaran
Laptop, LCD, Spidol, Penghapus, *Whiteboard*.

G. Sumber Belajar :

11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014 Pendidikan Pancasila dan
12. Kewarganegaraan Buku Peserta Didik SMA/MA/SMK/MAK Kelas X , Jakarta .
13. R.M Setiadi dkk, 2012 Pendidikan Kewarganegaraan , Erlangga
14. Bambang Tri Purwanto dkk, 2010 Kewarganegaraan kelas X ,Platinum Tiga Serangkai
15. Sekretariat Jendral MPR .RI, 2007 Materi sosialisasi UUD NRI tahun 1945, Jakarta

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	<p>Kegiatan Pendahuluan</p> <p>10. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar.</p> <p>11. Guru memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar siswa.</p> <p>12. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan sub materi yang sudah diberikan pertemuan sebelumnya tentang Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia</p> <p>13. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. (<i>Terlampir</i>)</p>	15 menit
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>k. Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru menayangkan Power Point terkait pengertian mengenai Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 	60 menit

1945 kemudian siswa diminta untuk mengamati materi tersebut.

- Guru menampilkan Foto yang terkait dengan materi Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 kemudian siswa diminta untuk mengamati foto yang ditampilkan oleh guru.

l. Menanya

- Guru meminta peserta didik mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin diketahui setelah mengamati sub bab materi mengenai Foto yang terkait dengan materi Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 yang telah dijelaskan oleh Guru didepan kelas.

m. Mengumpulkan Informasi

- Peserta didik membentuk 8 kelompok masing-masing berjumlah 4 orang kemudian guru membagikan tema diskusi untuk perkelompok sesuai dengan materi yang telah disampaikan.
- Peserta didik mencari informasi secara kelompok melalui sumber-sumber informasi yang relevan, antara lain buku, jurnal, koran, dan surat kabar.

n. Mengasosiasi

- Peserta didik menalar atau menyusun jawaban atau alternatif pemecahan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber

	<p>dari buku atau internet; video, media sosial lainnya.</p> <p>o. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara random (perwakilan kelompok) hasil dari diskusi kelompok dengan dibimbing oleh guru. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil pekerjaan peserta didik. 	
3.	<p>Penutup</p> <p>i. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945”.</p> <p>j. Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan materi “Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945” yang telah di bahas, sebagai refleksi.</p> <p>k. Guru memberikan tugas untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia”</p> <p>l. Guru mengakhiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.</p>	15 menit

Penilaian

7. Teknik Penilaian.

i. Sikap Spiritual

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 5	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran

j. Sikap Sosial

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 6	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran

k. Pengetahuan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Tertulis	Soal Pilihan Ganda (<i>Multiple Choice</i>)	Lihat Lampiran 4	Setelah pembelajaran usai	Penilaian pencapaian pembelajaran

l. Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Praktik	Tugas	Lihat	Saat Pembelajaran	Penilaian pencapaian

		(Keterampilan)	Lampiran 7	berlangsung	pembelajaran
--	--	----------------	------------	-------------	--------------

8. Pembelajaran Remedial

Bagi peserta didik yang kesulitan dan memperoleh nilai kurang baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas remedial berupa pembelajaran ulang. Tugas pembelajaran remedial secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 3.

9. Pembelajaran Pengayaan

Bagi peserta didik yang memperoleh nilai baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas pengayaan berupa menganalisis contoh tugas dan wewenang salah satu dari lembaga-lembaga Negara (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2). Tugas pembelajaran pengayaan secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 2.

LAMPIRAN 1

MATERI PEMBELAJARAN REGULER

Materi pertemuan 2

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- a. anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (pasal 2 (1) UUD 1945)
- b. anggota MPR sebanyak 550 anggota DPD dan 4 X Jumlah propinsi anggota DPD (UU No. 22 tahun 2003)
- c. MPR adalah lembaga negara bukan lembaga tertinggi negara
- d. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (pasal 3 (1,2,3) UUD 1945).
- e. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2) Presiden

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (pasal 6 A(1) UUD 1945).
- b. syarat menjadi Presiden lainnya diatur lebih lanjut dalam undang-undang pasal 6 (2) UUD 1945 amandemen.
- c. Kekuasaan Presiden meliputi menurut UUD 1945 amandemen adalah :
 - 1) Membuat undang-undang bersama DPR (pasal 5 (1) dan Pasal 20)
 - 2) Menetapkan peraturan pemeriontah (pasal 5 (2))
 - 3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (pasal 10)
 - 4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11)
 - 5) Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
 - 6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13)
 - 7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 (1))
 - 8) Memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 (2))
 - 9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15)

- 10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Presiden (pasal 16)
- 11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17)
- 12) Mengajukan RUU APBN (pasal 23)

3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (pasal 19 (1) UUD 1945).
- b. Anggota DPR sebanyak 550 orang (UU No. 22 tahun 2003).
- c. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (pasal 20 (1) UUD 1945).
- d. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (pasal 20A (2) UUD 1945).
- e. Hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas (pasal 20A (3) UUD 1945).

4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal 23E (1) UUD 1945).
- b. Hasil pemeriksaan BPK di serahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (pasal 23E (2) UUD 1945).

5) Mahkamah Agung (MA).

- a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 (2) UUD 1945).
- b. MA membawahi peradilan di Indonesia (pasal 24 (2) UUD 1945).
- c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (pasal 24 (1) UUD 1945).

6) Mahkamah Konstitusi

- a. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :
 - 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik.

- 4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C (1) UUD 1945)
 - 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (pasal 24C (2) UUD 1945).
- b. Mahkamah konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

7) Komisi Yudisial (KY).

- a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 24B (3) UUD 1945).
- b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (pasal 24 (1) UUD 1945).

8) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- a. DPD merupakan bagian keanggotan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap propinsi.
- b. DPD merupakan wakil-wakil propinsi.
- c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibukota negara RI (UU No. 22 tahun 2003).
- d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

LAMPIRAN 2

TUGAS PENGAYAAN

E. Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa dari tugas dan wewenang Lembaga-lembaga Negara NRI menurut UUD 1945 berdasarkan hasil elaborasi peserta didik

F. Analisis contoh tugas dan wewenang salah satu dari lembaga-lembaga Negara

Dari pencermatan kembali contoh tugas dan wewenang salah satu dari lembaga-lembaga Negara di Indonesia

LAMPIRAN 3

TUGAS REMIDIAL

Untuk membantu memahami kembali materi Kedudukan warga Negara dan penduduk Indonesia, kerjakanlah tugas berikut ini!

5. Jelaskan pengertian mengenai Lembaga-lembaga NRI menurut UUD 1945 !
6. Buatlah pertanyaan mengenai bagian dari materi Lembaga-lembaga NRI menurut UUD 1945 yang menurutmu sulit dipahami dan dikuasai, kemudian carilah sumber informasi, atau bertanya kepada teman maupun ahli untuk membantu menyusun jawaban dari pertanyaan yang telah disusun. Tuangkanlah dalam format berikut ini!

No	Pertanyaan	Sumber Informasi	Jawaban
1	(misal: buku, harus dituliskan judul buku, penulis/pengarang dan penerbit.) (Jika ahli atau teman, tuliskan identitas temanmu dan jawaban/tanggapan yang diberikan) (diisi jawaban yang telah disusun berdasar pemikiranmu dan dari sumber informasi.)
2

LAMPIRAN 4

KUIS TOPIK

Lembaga-Lembaga NRI Menurut UUD NRI 1945

(Tes Formatif)

Petunjuk:

9. Berdoalah sebelum mengerjakan kuis
10. Pilihlah jawaban yang menurut anda tepat dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban, A, B, C, D, atau E yang tersedia.
11. Kerjakan secara mandiri
12. Dilarang membuka buku catatan, buku teks atau sumber informasi lainnya dalam menjawab kuis, dan bertanya kepada orang lain.

SOAL

1. Kedudukan Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah
 - A. lebih tinggi DPR daripada Presiden
 - B. Lebih tinggi Presiden daripada DPR
 - C. kedudukan Presiden dan DPR sejajar
 - D. Presiden bertanggung jawab kepada DPR
 - E. DPR dapat menjatuhkan kedudukan Presiden
2. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
 1. memilih Presiden dan wakil presiden
 2. mengubah dan menetapkan UUD
 3. melantik presiden dan wakil presiden
 4. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya.

Yang merupakan tugas dan wewenang MPR adalah

- A. 1,2,3
- B. 1,2,4
- C. 1,3,4
- D. 2,3,4
- E. 1,2,3,4

3. Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh

- A. MPR
- B. DPR
- C. PRESIDEN
- D. DPA
- E. MA

4. Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali

- A. memutus pembubaran partai politik
- B. memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- C. memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum
- D. menguji UUD terhadap Undang-Undang
- E. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

5. Kewenangan lembaga Komisi Yudisial adalah berwenang....

- A. mengusulkan pengangkatan hakim agung
- B. mengusulkan pengangkatan Mahkamah Agung
- C. Bersama Presiden mengangkat jaksa agung
- D. bersama presiden mengangkat hakim agung
- E. bersama DPR memberhentikan hakim agung

Kunci Jawaban

Nomor 1 = C

Nomor 2 = D

Nomor 3 = C

Nomor 4 = D

Nomor 5 = A

SKOR = JUMLAH BETUL 5 X 20

LAMPIRAN 5

Instrumen penilaian sikap spiritual

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Adi)	(misal: Suka rela memimpin doa saat sebelum pelajaran dimulai)	(misal: percaya diri)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas kesukarelaannya memimpin berdoa sebelum pelajaran dimulai)

LAMPIRAN 6

Instrumen penilaian sikap sosial

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Rechel)	(misal: aktif membantu teman-teman sekelasnya membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)	(misal: Gotong Royong)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas keaktifannya daalm membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)

LAMPIRAN 7

Instrumen Penilaian Keterampilan

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / Satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Nama peserta didik / nama kelompok	Skor untuk				Jumlah Skor	Nilai
		Pendahuluan	Inti	Penutup	Penyusunan hasil telaah		
1							
2							
3							

Mengetahui
Guru Pembimbing

Yustinus Suharjana, S.Pd.
NIP 19660908 200701 1 01

Sleman, 14 Oktober 2017

Guru PLT Mata Pelajaran

Deni Widiyatmoko
14401241024

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Tahun Pelajaran : 2017/ 2018

Nama Sekolah	:	SMK Negeri 1 Tempel		
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Nomor RPP	03
Kelas	:	X (sepuluh)	Semester	Ganjil
Materi Pokok	:	Menganalisis kewenangan Lembaga-Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
Kriteria Ketuntasan Minimal / KKM	:	75	(Tujuh puluh lima)	
Alokasi Waktu	:	4 x 45 menit		
Pertemuan ke	:	3 dan 4		
Topik pertemuan ini	:	1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 2. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia		

D. Kompetensi Inti (KI)

Kelas X

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

- KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi.

No.	Kompetensi Dasar	No.	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.3	Mengorganisasi nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil	1.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		1.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.3	Mengorganisasikan nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.3	Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.3.1	Mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia
		3.3.2	Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945
		3.3.3	Menganalisis impeachment dalam Ketatanegaraan RI
		3.3.4	Menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik

		3.3.5	Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI
4.3	Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3.1	Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		4.3.2	Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ke 3 dan 4

Kompetensi sikap Spiritual

7. Peserta didik mampu melaksanakan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia menurut agama masing-masing dengan khusyu'.
8. Peserta didik dapat menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia dengan tulus.

Kompetensi Sikap Sosial

13. Peserta didik mampu menampilkan sikap tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran.

14. Peserta didik dapat menampilkan sikap kerja keras dan menyelesaikan setiap tugas pembelajaran dengan semangat pantang menyerah.
15. Peserta didik mampu melaksanakan gotong-royong dalam menyelesaikan tugas bersama dengan penuh kebersamaan.
16. Menampilkan sikap peduli terhadap teman yang membutuhkan bantuan dengan tulus.

Kompetensi Pengetahuan

10. Peserta didik mampu menguraikan pengertian Tata Kelola pemerintahan yang baik dengan baik dan benar
11. Peserta didik mampu menguraikan pengertian Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia dengan baik dan benar.
12. Peserta didik mampu menguraikan mengenai ciri, unsur dan syarat-syarat tata kelola pemerintahan yang baik dengan baik dan benar.

Kompetensi Keterampilan

9. Peserta didik mampu menelaah hasil telaah isi analisis tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia dengan tepat dan sistematis
10. Peserta didik mampu menyaji hasil analisis tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia dengan penuh semangat dan tanggung jawab

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini terbagi menjadi tiga jenis, antara lain Materi Pembelajaran Reguler, Materi Pembelajaran Pengayaan, dan Materi Pembelajaran Remedial.

10. Materi Pembelajaran Reguler

Materi Pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran reguler adalah sebagai berikut:

- e. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

f. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

11. Materi Pembelajaran Remedial

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang belum atau kesulitan menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- g. Menyajikan kembali penjelasan menurut pendapat masing-masing siswa mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia
- h. Membuat pertanyaan mengenai bagian dari materi pembelajaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia yang dianggap sulit dimengerti atau dikuasai, kemudian cari informasi, bertanya kepada teman atau ahli untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun tersebut (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 3).

12. Materi Pembelajaran Pengayaan

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- g. Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa dari bagaimana Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berdasarkan hasil elaborasi peserta didik.
- h. Menganalisis contoh Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2).

E. Pendekatan, Model dan Metode

- 10. Pendekatan : Saintifik
- 11. Model : Discovery Learning dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok
- 12. Metode : Diskusi, Presentasi, dan penugasan

F. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar

- 7. Media Pembelajaran
Power Point dan Foto mengenai materi yang disampaikan
- 8. Alat dan Bahan Pembelajaran
Laptop, LCD, Spidol, Penghapus, *Whiteboard*.

G. Sumber Belajar :

16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014 Pendidikan Pancasila dan
17. Kewarganegaraan Buku Peserta Didik SMA/MA/SMK/MAK Kelas X , Jakarta .
18. R.M Setiadi dkk, 2012 Pendidikan Kewarganegaraan , Erlangga
19. Bambang Tri Purwanto dkk, 2010 Kewarganegaraan kelas X ,Platinum Tiga Serangkai
20. Sekretariat Jendral MPR .RI, 2007 Materi sosialisasi UUD NRI tahun 1945, Jakarta

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan ke 3 :

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	<p>Kegiatan Pendahuluan</p> <p>14. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar.</p> <p>15. Guru memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar siswa.</p> <p>16. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan sub materi yang sudah diberikan pertemuan sebelumnya tentang “Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945”</p> <p>17. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. (<i>Terlampir</i>)</p>	15 menit
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>p. Mengamati</p>	60 menit

	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menayangkan Power Point terkait pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik kemudian siswa diminta untuk mengamati materi tersebut. • Guru menampilkan Foto yang terkait dengan materi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik kemudian siswa diminta untuk mengamati foto yang ditampilkan oleh guru. <p>q. Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru meminta peserta didik mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin diketahui setelah mengamati sub bab materi mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang telah dijelaskan oleh Guru didepan kelas. <p>r. Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membentuk 8 kelompok masing-masing berjumlah 4 orang kemudian guru membagikan tema diskusi untuk perkelompok sesuai dengan materi yang telah disampaikan. • Peserta didik mencari informasi secara kelompok melalui sumber-sumber informasi yang relevan, antara lain buku, jurnal, koran, dan surat kabar. <p>s. Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menalar atau menyusun jawaban atau alternatif pemecahan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dari buku atau internet; video, media sosial 	
--	--	--

	lainnya. t. Mengkomunikasikan <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara random (perwakilan kelompok) hasil dari diskusi kelompok dengan dibimbing oleh guru. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil pekerjaan peserta didik. 	
3.	Penutup m. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. n. Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan materi “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” yang telah di bahas, sebagai refleksi. o. Guru memberikan tugas untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” p. Guru mengakhiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.	15 menit

Pertemuan ke 4 :

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	Kegiatan Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar. 2. Guru memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat	

	<p>belajar siswa.</p> <p>3. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan sub materi yang sudah diberikan pertemuan sebelumnya tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”</p> <p>4. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. <i>(Terlampir)</i></p>	15 menit
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>a. Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru menayangkan Power Point terkait “Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” kemudian siswa diminta untuk mengamati materi tersebut. • Guru menampilkan Video yang terkait dengan materi “Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” kemudian siswa diminta untuk mengamati Video yang ditampilkan oleh guru. <p>b. Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru meminta peserta didik mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin diketahui setelah mengamati sub bab materi mengenai “Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” yang telah dijelaskan oleh Guru didepan kelas. <p>c. Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membentuk 8 kelompok masing-masing berjumlah 4 orang kemudian guru membagikan tema diskusi untuk perkelompok 	60 menit

	<p>sesuai dengan materi yang telah disampaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mencari informasi secara kelompok melalui sumber-sumber informasi yang relevan, antara lain buku, jurnal, koran, dan surat kabar. <p>d. Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menalar atau menyusun jawaban atau alternatif pemecahan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dari buku atau internet; video, media sosial lainnya. <p>e. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara random (perwakilan kelompok) hasil dari diskusi kelompok dengan dibimbing oleh guru. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil pekerjaan peserta didik. 	
3.	<p>Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” b. Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan materi “Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” yang telah di bahas, sebagai refleksi. c. Guru memberikan tugas untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI” d. Guru mengakhiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa. 	15 menit

--	--	--

Penilaian

10. Teknik Penilaian.

m. Sikap Spiritual

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 5	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran

n. Sikap Sosial

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 6	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran

o. Pengetahuan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Tertulis	Soal Essay (<i>Essay Test</i>)	Lihat Lampiran 4	Setelah pembelajaran usai	Penilaian pencapaian pembelajaran

p. Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Praktik	Tugas (Keterampilan)	Lihat Lampiran 7	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian pencapaian pembelajaran

11. Pembelajaran Remedial

Bagi peserta didik yang kesulitan dan memperoleh nilai kurang baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas remedial berupa pembelajaran ulang. Tugas pembelajaran remedial secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 3.

12. Pembelajaran Pengayaan

Bagi peserta didik yang memperoleh nilai baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas pengayaan berupa analisis Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan contoh Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia. Tugas pembelajaran pengayaan secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 2.

LAMPIRAN 1

MATERI PEMBELAJARAN REGULER

Materi pertemuan 1

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dalam tatakelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis, yaitu:

1. unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu
2. unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan public
3. unsur warga masyarakat (*stakeholders*).

Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada *stakeholders*. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi
- 2) Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas
- 3) Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), dimana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi
- 4) Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), di mana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama
- 5) Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup antara lain:

- 1) Hubungan antara pemerintah dengan pasar
- 2) Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya
- 3) Hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan
- 4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat borokrat)
- 5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan
- 6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif
- 7) Hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional.

Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik, dengan antara lain memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
- 2) Terwujudnya akuntabilitas publik, dalam arti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
- 3) Tersedianya perangkat hukum yang memadai, yakni peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik
- 4) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM
- 5) Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik adalah adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

Materi pertemuan 2 :

Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Menurut **Verba**, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung

bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkan.

Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri:

- a. selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah
- b. memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat
- c. memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan
- d. memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat
- e. memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja
- f. dapat menerima perbedaan pendapat
- g. memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa
- h. memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya
- i. memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan
- j. menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara
- k. memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara
- l. patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum
- m. membangun budaya politik yang demokratis
- n. menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan
- o. mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik
- p. memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air

Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku adalah :

1. Di lingkungan sekolah

Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui:

- 1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
- 2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti
- 3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah

2. Di lingkungan masyarakat

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Forum warga
- 2) Pemilihan ketua RT, RW, Kepala Desa, Ketua organisasi Masyarakat dan sebagainya
- 3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya

Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis kepada melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan, maka harus diperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku, seperti:

- 1) Pancasila dan UUD RI 1945
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang parpai politk dan sebagainya.
- 3) Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-Rw, Peraturan Desa dan sebagainya.
- 4) Norma-norma sosial yang berlaku

3. Di lingkungan negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya melalui kegiatan:

- a. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan Presiden
- b. Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkadal)
- c. Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun

Sedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dalam:

- a. Pancasila
- b. UUD RI 1945
- c. Undang-Undang seperti Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2002 tentang Pemilu, Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya
 - 1) Peraturan Pemerintah
 - 2) Keputusan Presiden
 - 3) Peraturan daerah

Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik diatas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

LAMPIRAN 2

TUGAS PENGAYAAN

G. Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa dari bagaimana Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berdasarkan hasil elaborasi peserta didik.

H. Analisis contoh Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Dari pencermatan kembali contoh Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

LAMPIRAN 3

TUGAS REMIDIAL

Untuk membantu memahami kembali materi Kedudukan warga Negara dan penduduk Indonesia, kerjakanlah tugas berikut ini!

7. Jelaskan menurut pendapat anda mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia!
8. Buatlah pertanyaan mengenai bagian dari materi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia yang menurutmu sulit dipahami dan dikuasai, kemudian carilah sumber informasi, atau bertanya kepada teman maupun ahli untuk membantu menyusun jawaban dari pertanyaan yang telah disusun. Tuangkanlah dalam format berikut ini!

No	Pertanyaan	Sumber Informasi	Jawaban
1	(misal: buku, harus dituliskan judul buku, penulis/pengarang dan penerbit.) (Jika ahli atau teman, tuliskan identitas temanmu dan jawaban/tanggapan yang diberikan) (diisi jawaban yang telah disusun berdasar pemikiranmu dan dari sumber informasi.)
2

LAMPIRAN 4

KUIS TOPIK

(Tes Formatif)

Petunjuk:

13. Berdoalah sebelum mengerjakan kuis
14. Kerjakan secara mandiri
15. Dilarang membuka buku catatan, buku teks atau sumber informasi lainnya dalam menjawab kuis, dan bertanya kepada orang lain.

SOAL

1. Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia, Apakah sudah baik ? Jelaskan menurut pendapat Anda !

LAMPIRAN 5

Instrumen penilaian sikap spiritual

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Adi)	(misal: Suka rela memimpin doa saat sebelum pelajaran dimulai)	(misal: percaya diri)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas kesukarelaannya memimpin berdoa sebelum pelajaran dimulai)

LAMPIRAN 6

Instrumen penilaian sikap sosial

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Rechel)	(misal: aktif membantu teman-teman sekelasnya membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)	(misal: Gotong Royong)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas keaktifannya daalm membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)

LAMPIRAN 7

Instrumen Penilaian Keterampilan

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / Satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Nama peserta didik / nama kelompok	Skor untuk				Jumlah Skor	Nilai
		Pendahuluan	Inti	Penutup	Penyusunan hasil telaah		
1							
2							
3							

Mengetahui
Guru Pembimbing

Yustinus Suharjana, S.Pd.
NIP 19660908 200701 1 01

Sleman, 14 Oktober 2017

Guru PLT Mata Pelajaran

Deni Widiyatmoko
14401241024

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Tahun Pelajaran : 2017/ 2018

Nama Sekolah	:	SMK Negeri 1 Tempel		
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Nomor RPP	04
Kelas	:	X (sepuluh)	Semester	Ganjil
Materi Pokok	:	Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah		
Kriteria Ketuntasan Minimal / KKM	:	75	(Tujuh puluh lima)	
Alokasi Waktu	:	4 x 45 menit		
Pertemuan ke	:	1 dan 2		
Topik pertemuan ini	:	1. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks NKRI 2. Kedudukan Peran Pemerintah Pusat		

E. Kompetensi Inti (KI)

Kelas X

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi.

No.	Kompetensi Dasar	No.	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.4	Menghormati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		1.4.2	Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.4	Menunjukkan nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2.4.2	Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.4	Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	<p>Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Mengidentifikasi Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat.</p> <p>Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah</p> <p>Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah</p>
4.4	Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4.1 4.4.2	<p>Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ke 1 dan 2

Kompetensi sikap Spiritual

9. Peserta didik menampilkan sikap religius dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI serta Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat menurut agama masing-masing dengan khusyu'.
10. Peserta didik dapat menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI serta Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dengan tulus.

Kompetensi Sikap Sosial

17. Peserta didik mampu menampilkan sikap tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran.
18. Peserta didik dapat menampilkan sikap kerja keras dan menyelesaikan setiap tugas pembelajaran dengan semangat pantang menyerah.
19. Peserta didik mampu melaksanakan gotong-royong dalam menyelesaikan tugas bersama dengan penuh kebersamaan.
20. Menampilkan sikap peduli terhadap teman yang membutuhkan bantuan dengan tulus.

Kompetensi Pengetahuan

13. Peserta didik mampu menguraikan Pengertian Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks NKRI dengan baik dan benar.
14. Peserta didik mampu menguraikan Kedudukan dan Peran Pemerintah pusat dengan baik dan benar.

Kompetensi Keterampilan

11. Peserta didik mampu menelaah hasil telaah isi analisis tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks NKRI dengan tepat dan sistematis
12. Peserta didik mampu menyaji hasil analisis tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah pusat dengan penuh semangat dan tanggung jawab

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini terbagi menjadi tiga jenis, antara lain Materi Pembelajaran Reguler, Materi Pembelajaran Pengayaan, dan Materi Pembelajaran Remedial.

13. Materi Pembelajaran Reguler

Materi Pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran reguler adalah sebagai berikut:

- g. Pengertian Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI
- h. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

14. Materi Pembelajaran Remedial

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang belum atau kesulitan menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- i. Menyajikan kembali pengertian dari Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI dan Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
- j. Membuat pertanyaan mengenai bagian dari materi pembelajaran pengertian dari Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI dan Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat yang dianggap sulit dimengerti atau dikuasai, kemudian cari informasi, bertanya kepada teman atau ahli untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun tersebut (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 3).

15. Materi Pembelajaran Pengayaan

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- i. Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa dari kelebihan dan kelemahan Desentralisasi berdasarkan hasil elaborasi peserta didik.
- j. Menganalisis bagaimana Kedudukan dan Peran Pemerintahan Pusat (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2).

E. Pendekatan, Model dan Metode

13. Pendekatan : Saintifik

14. Model : Discovery Learning dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok
15. Metode : Diskusi, Presentasi

F. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar

9. Media Pembelajaran
Power Point & Video terkait pembelajaran
10. Alat dan Bahan Pembelajaran
Laptop, LCD, Spidol, Penghapus, *Whiteboard*.

G. Sumber Belajar :

21. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014 Pendidikan Pancasila dan
22. Kewarganegaraan Buku Peserta Didik SMA/MA/SMK/MAK Kelas X , Jakarta .
23. R.M Setiadi dkk, 2012 Pendidikan Kewarganegaraan , Erlangga
24. Bambang Tri Purwanto dkk, 2010 Kewarganegaraan kelas X ,Platinum Tiga Serangkai
25. Sekretariat Jendral MPR .RI, 2007 Materi sosialisasi UUD NRI tahun 1945, Jakarta

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan ke 1 :

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	<p>Kegiatan Pendahuluan</p> <p>18. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar.</p> <p>19. Guru memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar siswa.</p> <p>20. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan sub materi</p>	15 menit

	<p>yang sudah diberikan pertemuan sebelumnya tentang “Partisipasi warga Negara dalam sistem politik di Indonesia”</p> <p>21. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks NKRI” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. (<i>Terlampir</i>)</p>	
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>u. Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik memperhatikan guru dalam menjelaskan mengenai materi Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks NKRI • Peserta Didik mengamati Video terkait dengan materi Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks NKRI yang ditampilkan oleh Guru <p>v. Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Didik mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin diketahui setelah mengamati sub bab materi mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks NKRI yang telah dijelaskan oleh Guru didepan kelas. • Peserta Didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan setelah mengamati video yang ditampilkan oleh Guru <p>w. Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membentuk 8 kelompok masing-masing berjumlah 4 orang kemudian guru membagikan tema diskusi untuk perkelompok sesuai dengan materi yang telah disampaikan. 	60 menit

	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mencari informasi secara kelompok melalui sumber-sumber informasi yang relevan, antara lain buku, jurnal, koran, dan surat kabar. <p>x. Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menalar atau menyusun jawaban atau alternatif pemecahan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dari buku atau internet; video, media sosial lainnya. <p>y. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara random (perwakilan kelompok) hasil dari diskusi kelompok dengan dibimbing oleh guru. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil pekerjaan peserta didik. 	
3.	<p>Penutup</p> <p>q. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks NKRI”.</p> <p>r. Dengan bimbingan guru Peserta Didik membuat Kesimpulan mengenai materi “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks NKRI” yang telah di bahas, sebagai refleksi.</p> <p>s. Guru memberikan tugas untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat”</p> <p>t. Guru mengakhiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.</p>	15 menit

--	--	--

Pertemuan ke 2 :

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	<p>Kegiatan Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar. 2. Guru memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. 3. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan sub materi yang sudah diberikan pertemuan sebelumnya tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks NKRI” 4. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. <i>(Terlampir)</i> 	15 menit
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengamati <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik memperhatikan guru dalam menjelaskan mengenai materi Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat • Peserta Didik mengamati Video terkait dengan materi Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat yang ditampilkan oleh Guru b. Menanya <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Didik mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin diketahui setelah mengamati 	60 menit

	<p>sub bab materi mengenai Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat yang telah dijelaskan oleh Guru didepan kelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan setelah mengamati video yang ditampilkan oleh Guru <p>c. Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membentuk 8 kelompok masing-masing berjumlah 4 orang kemudian guru membagikan tema diskusi untuk perkelompok sesuai dengan materi yang telah disampaikan. • Peserta didik mencari informasi secara kelompok melalui sumber-sumber informasi yang relevan, antara lain buku, jurnal, koran, dan surat kabar. <p>d. Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menalar atau menyusun jawaban atau alternatif pemecahan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dari buku atau internet; video, media sosial lainnya. <p>e. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara random (perwakilan kelompok) hasil dari diskusi kelompok dengan dibimbing oleh guru. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil pekerjaan peserta didik. 	
3.	Penutup	15 menit

	<p>a. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat”.</p> <p>b. Dengan bimbingan Guru peserta didik membuat kesimpulan terkait materi “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat” yang telah di bahas, sebagai refleksi.</p> <p>c. Guru memberikan tugas untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah”</p> <p>d. Guru mengakhiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.</p>	
--	---	--

Penilaian

13. Teknik Penilaian.

q. Sikap Spiritual

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 5	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran

r. Sikap Sosial

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan

1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 6	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran
----	-----------	--------	---------------------	-------------------------------------	--

s. Pengetahuan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Tertulis	Soal Pilihan Ganda (<i>Multiple Choice</i>)	Lihat Lampiran 4	Setelah pembelajaran usai	Penilaian pencapaian pembelajaran

t. Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Praktik	Tugas (Keterampilan)	Lihat Lampiran 7	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian pencapaian pembelajaran

14. Pembelajaran Remedial

Bagi peserta didik yang kesulitan dan memperoleh nilai kurang baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas remedial berupa pembelajaran ulang. Tugas pembelajaran remedial secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 3.

15. Pembelajaran Pengayaan

Bagi peserta didik yang memperoleh nilai baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas pengayaan berupa Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa dari kelebihan dan

kelemahan desentralisasi berdasarkan hasil elaborasi peserta didik dan Menganalisis bagaimana Kedudukan dan Peran Pemerintahan Pusat (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2). Tugas pembelajaran pengayaan secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 2.

LAMPIRAN 1

MATERI PEMBELAJARAN REGULER

Materi pertemuan 1 :

A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *de* yang berarti lepas, dan *center* yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.

Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonstrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif.

Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonstrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonstrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata.

Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

Menurut ahli ilmu tata negara, dekonstrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.

Dekonstrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

Menurut Amran Muslimin (2009:120), desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian.

1. Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

- a) Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat.
- b) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.
- c) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
- d) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a) Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat.
- b) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.

- c) Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
- d) Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
- e) Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
- g) Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
- h) Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
- i) Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi.
- j) Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu.
- k) Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.

Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
- b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
- c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
- d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
- e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

2. Otonomi Daerah

Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah di antaranya adalah sebagai berikut.

- a) C. J. Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusanurusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.
- b) J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.
- c) Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
- d) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.

3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya

4. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- c) Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- g) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- i) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- j) Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- l) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- m) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia..

- a) Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (Eenheidstaat), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
- b) Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Berkaitandengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.

Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

1. Dimensi Politik, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.
2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
3. Kabupaten/kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

- a) Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah.
- b) Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
- c) Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Selain itu terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Prinsip Kesatuan

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

2. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab

Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.

3. Prinsip Penyebaran

Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya.

4. Prinsip Keserasian

Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.

5. Prinsip Pemberdayaan

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunann dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Materi pertemuan 2:

B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi.

a. Fungsi Layanan(Servicing Function)

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

b. Fungsi Pengaturan(Regulating Function)

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

Sementara itu ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.

1. Menyediakan infrastruktur ekonomi

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

2. Menyediakan barang dan jasa kolektif

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

3. Menjembatani konflik dalam masyarakat

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

4. Menjaga kompetisi

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.

5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

6. Menjaga stabilitas ekonomi

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

c. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.

Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut.

- a) Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
- b) Dana perimbangan keuangan.
- c) Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
- d) Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- e) Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
- f) Konservasi dan standarisasi nasional.

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Memperhatikan pemerataan dan keadilan.
3. Menciptakan demokratisasi.
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya.
5. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
6. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya.
7. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

LAMPIRAN 2

TUGAS PENGAYAAN

- I. Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa dari kelebihan dan kelemahan desentralisasi berdasarkan hasil elaborasi peserta didik.**
- J. Menganalisis bagaimana Kedudukan dan Peran Pemerintahan Pusat yang ada di Indonesia**

LAMPIRAN 3

TUGAS REMIDIAL

Untuk membantu memahami kembali materi Kedudukan warga Negara dan penduduk Indonesia, kerjakanlah tugas berikut ini!

9. Menyajikan kembali pengertian dari Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI dan Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
10. Buatlah pertanyaan mengenai bagian dari materi Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI dan Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat yang menurutmu sulit dipahami dan dikuasai, kemudian carilah sumber informasi, atau bertanya kepada teman maupun ahli untuk membantu menyusun jawaban dari pertanyaan yang telah disusun. Tuangkanlah dalam format berikut ini!

No	Pertanyaan	Sumber Informasi	Jawaban
1	(misal: buku, harus dituliskan judul buku, penulis/pengarang dan penerbit.) (Jika ahli atau teman, tuliskan identitas temanmu dan jawaban/tanggapan yang diberikan) (diisi jawaban yang telah disusun berdasar pemikiranmu dan dari sumber informasi.)
2

LAMPIRAN 4

KUIS TOPIK

Lembaga-Lembaga NRI Menurut UUD NRI 1945

(Tes Formatif)

Petunjuk:

16. Berdoalah sebelum mengerjakan Soal
17. Pilihlah jawaban yang menurut anda tepat dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban, A, B, C, D, atau E yang tersedia.
18. Kerjakan secara mandiri
19. Dilarang membuka buku catatan, buku teks atau sumber informasi lainnya dalam menjawab kuis, dan bertanya kepada orang lain.

SOAL

1. Secara etimologis, istilah Desentralisasi berasal dari kata *Centerum*, artinya
 - A. Lepas
 - B. Pusat
 - C. Daerah
 - D. Sentral
 - E. Otonom
2. Perhatikan pernyataan dibawah ini !
 1. Desentralisasi Politik
 2. Desentralisasi Sosial
 3. Desentralisasi Fungsional
 4. Desentralisasi Kebudayaan

Menurut Amran Muslimin (2009:120), Desentralisasi dibedakan atas 3 bagian yaitu...

- A. 1,2,3
- B. 1,2,4
- C. 1,3,4
- D. 2,3,4
- E. 1,2,3,4

3. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan....

- A. Sentralisasi.
- B. Desentralisasi.
- C. Daerah otonom.
- D. Otonomi daerah.
- E. Tugas pembantuan

4. Perhatikan pernyataan berikut ini !

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
3. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.

Yang termasuk kelebihan dari Desentralisasi adalah...

- A. 1,2,3
- B. 1,2,4
- C. 1,3,4
- D. 2,3,4
- E. 1,2,3,4

5. Suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah adalah....

- A. Dekonsentrasi
- B. Desentralisasi**
- C. Sentralisasi
- D. Otonomi Daerah
- E. Devolusi

6. Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah...

- A. Nomor 20 tahun 2005.
- B. Nomor 3 tahun 2006.
- C. Nomor 12 tahun 2006.
- D. Nomor 9 tahun 2015**
- E. Nomor 32 tahun 2014.

7. Keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi adalah...

- A. Dekonsentrasi
- B. Sentralisasi
- C. Otonomi Daerah**
- D. Desentralisasi
- E. Daerah Otonom

8. Berikut yang termasuk kedalam lima prinsip penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Kecuali..

- A. Prinsip Kesatuan
- B. Prinsip Penyebaran
- C. Prinsip Keserasian
- D. Prinsip Persatuan**

E. Prinsip Pemberdayaan

9. Yang termasuk salah satu dari 3 fungsi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah

- A. Fungsi Aduan
- B. Fungsi Layanan**
- C. Fungsi Kesatuan
- D. Fungsi Perencanaan
- E. Fungsi Pemekaran

10. Perhatikan pernyataan berikut ini !

- 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2. Memperhatikan pemerataan dan keadilan.
- 3. Meningkatkan Kompetisi antar daerah
- 4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.

Yang termasuk Tujuan diberikannya Kewenangan Kepada Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah....

- A. 1,2,3
- B. 1,2,4**
- C. 1,3,4
- D. 2,3,4
- E. 1,2,3,4

Kunci Jawaban

Nomor 1 = B

Nomor 2 = C

Nomor 3 = D

Nomor 4 = A

Nomor 5 = B

Nomor 6 = D

Nomor 7 = C

Nomor 8 = D

Nomor 9 = B

Nomor 10 = B

SKOR = JUMLAH BETUL 10 X 10

LAMPIRAN 5

Instrumen penilaian sikap spiritual

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Adi)	(misal: Suka rela memimpin doa saat sebelum pelajaran dimulai)	(misal: percaya diri)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas kesukarelaannya memimpin berdoa sebelum pelajaran dimulai)

LAMPIRAN 6

Instrumen penilaian sikap sosial

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Rechel)	(misal: aktif membantu teman-teman sekelasnya membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)	(misal: Gotong Royong)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas keaktifannya daalm membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)

LAMPIRAN 7

Instrumen Penilaian Keterampilan

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / Satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Nama peserta didik / nama kelompok	Skor untuk				Jumlah Skor	Nilai
		Pendahuluan	Inti	Penutup	Penyusunan hasil telaah		
1							
2							
3							

Mengetahui
Guru Pembimbing

Yustinus Suharjana, S.Pd.
NIP 19660908 200701 1 01

Sleman, 25 Oktober 2017

Guru PLT Mata Pelajaran

Deni Widiyatmoko
14401241024

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Tahun Pelajaran : 2017/ 2018

Nama Sekolah	:	SMK Negeri 1 Tempel		
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Nomor RPP	04
Kelas	:	X (sepuluh)	Semester	Ganjil
Materi Pokok	:	Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah		
Kriteria Ketuntasan Minimal / KKM	:	75	(Tujuh puluh lima)	
Alokasi Waktu	:	4 x 45 menit		
Pertemuan ke	:	3 dan 4		
Topik pertemuan ini	:	1. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah 2. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah		

F. Kompetensi Inti (KI)

Kelas X

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi.

No.	Kompetensi Dasar	No.	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.4	Menghormati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		1.4.2	Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.4	Menunjukkan nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2.4.2	Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.4	Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengidentifikasi Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat. Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
4.4	Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4.1 4.4.2	Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ke 1 dan 2

Kompetensi sikap Spiritual

11. Peserta didik menampilkan sikap religius dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah serta Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah menurut agama masing-masing dengan khusyu'.
12. Peserta didik dapat menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah serta Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tulus.

Kompetensi Sikap Sosial

21. Peserta didik mampu menampilkan sikap tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran.
22. Peserta didik dapat menampilkan sikap kerja keras dan menyelesaikan setiap tugas pembelajaran dengan semangat pantang menyerah.
23. Peserta didik mampu melaksanakan gotong-royong dalam menyelesaikan tugas bersama dengan penuh kebersamaan.
24. Menampilkan sikap peduli terhadap teman yang membutuhkan bantuan dengan tulus.

Kompetensi Pengetahuan

15. Peserta didik mampu menguraikan Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah dengan baik dan benar.
16. Peserta didik mampu menguraikan Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah dengan baik dan benar.

Kompetensi Keterampilan

13. Peserta didik mampu menelaah hasil telaah isi analisis tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah dengan tepat dan sistematis
14. Peserta didik mampu menyaji hasil analisis tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah dengan penuh semangat dan tanggung jawab

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini terbagi menjadi tiga jenis, antara lain Materi Pembelajaran Reguler, Materi Pembelajaran Pengayaan, dan Materi Pembelajaran Remedial.

16. Materi Pembelajaran Reguler

Materi Pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran reguler adalah sebagai berikut:

- i. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
- j. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

17. Materi Pembelajaran Remedial

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang belum atau kesulitan menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- k. Menyajikan kembali pengertian dari Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah dan Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
- l. Membuat pertanyaan mengenai bagian dari Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah dan Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah yang dianggap sulit dimengerti atau dikuasai, kemudian cari informasi, bertanya kepada teman atau ahli untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun tersebut (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 3).

18. Materi Pembelajaran Pengayaan

Materi/tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi pembelajaran reguler, antara lain sebagai berikut:

- k. Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa dari kewenangan pemerintah Daerah berdasarkan hasil elaborasi peserta didik.
- l. Menganalisis bagaimana makna dari Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2).

E. Pendekatan, Model dan Metode

16. Pendekatan : Saintifik

17. Model : Discovery Learning dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok

18. Metode : Diskusi, Presentasi

F. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar

11. Media Pembelajaran

Power Point, Gambar & Video terkait pembelajaran

12. Alat dan Bahan Pembelajaran

Laptop, LCD, Spidol, Penghapus, *Whiteboard*.

G. Sumber Belajar :

26. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014 Pendidikan Pancasila dan

27. Kewarganegaraan Buku Peserta Didik SMA/MA/SMK/MAK Kelas X , Jakarta .

28. R.M Setiadi dkk, 2012 Pendidikan Kewarganegaraan , Erlangga

29. Bambang Tri Purwanto dkk, 2010 Kewarganegaraan kelas X ,Platinum Tiga Serangkai

30. Sekretariat Jendral MPR .RI, 2007 Materi sosialisasi UUD NRI tahun 1945, Jakarta

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan ke 1 :

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	<p>Kegiatan Pendahuluan</p> <p>22. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar.</p> <p>23. Guru memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar siswa.</p> <p>24. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan sub materi yang sudah diberikan pertemuan sebelumnya tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks NKRI”</p>	15 menit

	<p>25. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. <i>(Terlampir)</i></p>	
<p>2.</p>	<p>Kegiatan Inti</p> <p>z. Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik memperhatikan guru dalam menjelaskan mengenai materi Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah • Peserta Didik mengamati Video terkait dengan materi Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh Guru <p>aa. Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Didik mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin diketahui setelah mengamati sub bab materi mengenai Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah yang telah dijelaskan oleh Guru didepan kelas. • Peserta Didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan setelah mengamati video yang ditampilkan oleh Guru <p>bb. Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membentuk 8 kelompok masing-masing berjumlah 4 orang kemudian guru membagikan tema diskusi untuk perkelompok sesuai dengan materi yang telah disampaikan. • Peserta didik mencari informasi secara kelompok melalui sumber-sumber informasi yang relevan, 	<p>60 menit</p>

	<p>antara lain buku, jurnal, koran, dan surat kabar.</p> <p>cc. Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menalar atau menyusun jawaban atau alternatif pemecahan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dari buku atau internet; video, media sosial lainnya. <p>dd. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara random (perwakilan kelompok) hasil dari diskusi kelompok dengan dibimbing oleh guru. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil pekerjaan peserta didik. 	
3.	<p>Penutup</p> <p>u. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah”.</p> <p>v. Dengan bimbingan guru Peserta Didik membuat Kesimpulan mengenai materi “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah” yang telah di bahas, sebagai refleksi.</p> <p>w. Guru memberikan tugas untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah”</p> <p>x. Guru mengakhiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.</p>	15 menit

Pertemuan ke 2 :

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	<p>Kegiatan Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar. 6. Guru memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. 7. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan sub materi yang sudah diberikan pertemuan sebelumnya tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah” 8. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. (<i>Terlampir</i>) 	15 menit
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Mengamati <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik memperhatikan guru dalam menjelaskan mengenai materi “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah”. • Peserta Didik mengamati Gambar terkait dengan materi “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah” yang ditampilkan oleh Guru c. Menanya <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Didik mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin diketahui setelah mengamati sub bab materi mengenai Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat yang telah dijelaskan oleh Guru 	60 menit

	<p>didepan kelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan setelah mengamati Gambar yang ditampilkan oleh Guru <p>f. Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membentuk 8 kelompok masing-masing berjumlah 4 orang kemudian guru membagikan tema diskusi untuk perkelompok sesuai dengan materi yang telah disampaikan. • Peserta didik mencari informasi secara kelompok melalui sumber-sumber informasi yang relevan, antara lain buku, jurnal, koran, dan surat kabar. <p>g. Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menalar atau menyusun jawaban atau alternatif pemecahan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dari buku atau internet; video, media sosial lainnya. <p>h. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara random (perwakilan kelompok) hasil dari diskusi kelompok dengan dibimbing oleh guru. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil pekerjaan peserta didik. 	
3.	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Hubungan Struktural dan Fungsional 	15 menit

	<p>Pemerintah Pusat dan Daerah”</p> <p>f. Dengan bimbingan Guru peserta didik membuat kesimpulan terkait materi “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah” yang telah di bahas, sebagai refleksi.</p> <p>g. Guru memberikan tugas untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika”</p> <p>h. Guru mengakhiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.</p>	
--	---	--

Penilaian

16. Teknik Penilaian.

u. Sikap Spiritual

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 5	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran

v. Sikap Sosial

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
----	--------	------------------	-----------------	-------------------	------------

1.	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran 6	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran
----	-----------	--------	---------------------	-------------------------------------	--

w. Pengetahuan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Tertulis	Soal Pilihan Ganda (<i>Multiple Choice</i>)	Lihat Lampiran 4	Setelah pembelajaran usai	Penilaian pencapaian pembelajaran

x. Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Praktik	Tugas (Keterampilan)	Lihat Lampiran 7	Saat Pembelajaran berlangsung	Penilaian pencapaian pembelajaran

17. Pembelajaran Remedial

Bagi peserta didik yang kesulitan dan memperoleh nilai kurang baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas remedial berupa pembelajaran ulang. Tugas pembelajaran remedial secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 3.

18. Pembelajaran Pengayaan

Bagi peserta didik yang memperoleh nilai baik dalam soal kuis, maka akan mendapatkan tugas pengayaan berupa Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa dari kewenangan

pemerintah Daerah berdasarkan hasil elaborasi peserta didik dan menganalisis bagaimana makna dari Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2). Tugas pembelajaran pengayaan secara lebih jelasnya terlampir pada lampiran 2.

LAMPIRAN 1

MATERI PEMBELAJARAN REGULER

Materi pertemuan 1 :

C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerahdaerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan. Artinya, gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan (medebewind) adalah Keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.

Tugas pembantuan (medebewind) dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal berikut.

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan.
3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja.

Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut.

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penaggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.

11. Pelayanan pertanahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom adalah meliputi bidangbidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan, serta penerangan.

Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k) Melestarikan lingkungan hidup.
- l) Mengelola administrasi kependudukan.
- m) Melestarikan nilai sosial budaya.
- n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Kewenanganpemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut.

- a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional.
- b. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata.
- c. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap -sikap sebagai berikut.

- i. Kapabilitas (kemampuan aparatur),
- ii. Integritas (mentalitas),
- iii. Akseptabilitas (penerimaan), dan
- iv. Akuntabilitas (kepercayaan dan tanggung jawab)

2. Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh (Nangroe Aceh Darussalam) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

a. Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
5. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.
7. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan pada sejarah dan hak asal-usul. Kewenangan Istimewa DIY adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pengakuan keistimewaan Provinsi DIY juga didasarkan pada peranannya dalam sejarah perjuangan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012, keistimewaan DIY meliputi (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang.

Di antara keistimewaan DIY salah satunya adalah dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta.

c. Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah NAD menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada NAD dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. Tambahan kewenangan kabupaten/kota dalam hal menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum. Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

d. Otonomi Khusus Papua

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

1. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.
2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang bercirikan sebagai berikut.
 - a) Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.
 - b) Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
 - c) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
- 4) Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

3. Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya

mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas.

Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas berikut.

- a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
- c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam

menjalankan tugasnya DPRD memiliki alat kelengkapan terdiri atas pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antarkedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung. Bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

5. Proses Pemilihan Kepala Daerah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden dalam sebuah sidang DPRD provinsi. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur atas nama presiden dalam sebuah sidang DPRD kabupaten atau kota.

6. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan peraturan daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan sebagai berikut.

- 1) Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan.
- 2) Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.
- 3) Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah

sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Pendapatan daerah lain yang sah.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh

gubernur paling lambat tiga hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan

Daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama tiga hari disampaikan kepada

gubernur untuk dievaluasi. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Materi pertemuan 2:

D. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara Pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hirarkinya di daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom.

Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

- 1) Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
- 2) Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.

- 3) Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

2. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada dasarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah.

Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lam, dan

sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dan menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

LAMPIRAN 2

TUGAS PENGAYAAN

- K. Menyajikan kembali dan menambahkan satu atau beberapa dari kewenangan pemerintah daerah berdasarkan hasil elaborasi peserta didik.**
- L. Menganalisis bagaimana makna dari Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah**

LAMPIRAN 3

TUGAS REMIDIAL

Untuk membantu memahami kembali materi Kedudukan warga Negara dan penduduk Indonesia, kerjakanlah tugas berikut ini!

11. Menyajikan kembali pengertian dari Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah dan Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
12. Buatlah pertanyaan mengenai bagian dari materi Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah dan Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah yang menurutmu sulit dipahami dan dikuasai, kemudian carilah sumber informasi, atau bertanya kepada teman maupun ahli untuk membantu menyusun jawaban dari pertanyaan yang telah disusun. Tuangkanlah dalam format berikut ini!

No	Pertanyaan	Sumber Informasi	Jawaban
1	(misal: buku, harus dituliskan judul buku, penulis/pengarang dan penerbit.) (Jika ahli atau teman, tuliskan identitas temanmu dan jawaban/tanggapan yang diberikan) (diisi jawaban yang telah disusun berdasar pemikiranmu dan dari sumber informasi.)
2

LAMPIRAN 4

KUIS TOPIK

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah dan Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

(Tes Formatif)

Petunjuk:

20. Berdoalah sebelum mengerjakan Soal
21. Kerjakan secara mandiri
22. Dilarang membuka buku catatan, buku teks atau sumber informasi lainnya dalam menjawab soal, dan bertanya kepada orang lain.

SOAL

1. Jelaskan penerapan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia!
2. Apa makna hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah?

SKOR = JUMLAH BETUL 2 X 50

LAMPIRAN 5

Instrumen penilaian sikap spiritual

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Adi)	(misal: Suka rela memimpin doa saat sebelum pelajaran dimulai)	(misal: percaya diri)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas kesukarelaannya memimpin berdoa sebelum pelajaran dimulai)

LAMPIRAN 6

Instrumen penilaian sikap sosial

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
1						
2						
3	(misal: 5/2/2017)	(misal: Rechel)	(misal: aktif membantu teman-teman sekelasnya membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)	(misal: Gotong Royong)	+	(misal: Diberi apresiasi/pujian atas keaktifannya daalm membersihkan sampah yang terdapat dalam kelas)

LAMPIRAN 7

Instrumen Penilaian Keterampilan

Nama Satuan Pendidikan : SMKN 1 TEMPEL

Tahun Pelajaran :

Kelas/Semester : X / Satu

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Nama peserta didik / nama kelompok	Skor untuk				Jumlah Skor	Nilai
		Pendahuluan	Inti	Penutup	Penyusunan hasil telaah		
1							
2							
3							

Mengetahui
Guru Pembimbing

Yustinus Suharjana, S.Pd.
NIP 19660908 200701 1 01

Sleman, 3 November 2017

Guru PLT Mata Pelajaran

Deni Widiyatmoko
14401241024

6. SILABUS KELAS X

SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Satuan Pendidikan : SMK/MAK
 Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas : X (sepuluh)

Kompetensi Inti :

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR	IPK	MATERI POKOK	PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER BELAJAR
1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat						Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Jakarta: Kementerian

						Pendidikan dan Kebudayaan,. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X
1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.						UUD NRI tahun 1945 Amandemen
2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara						
2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.						PKn X / SMA / SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara						

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam)						
2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.						
2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.						PKn X / SMA / SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2.6 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks						

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).						
--	--	--	--	--	--	--

KOMPETENSI DASAR	IPK	MATERI POKOK	PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER BELAJAR
3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	3.1.1. Menganalisis sistem Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia	Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia	<i>Problem-based Learning</i>	Tes tulis Pilihan Ganda	6	PKn X / SMA / SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
	3.1.2. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia Dan lembag pemerintahan non departemen	Kedudukan dan fungsi Kementerian negara dan lembaga pemerintah non departemen.				UUD NRI tahun 1945 Amandemen
	3.1.3. Menganalisis Nilai-	Nilai-nilai Pancasila				

	nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.	dalam penyelenggaraan pemerintahan				
4.1. Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	4.1.1. Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	Mendemonstrasikan pelaksanaan keputusan penyelenggaraan pemerintahan negara	<i>Problem-based Learning</i>			
	4.1.2. Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	Mendemonstrasikan dalam pengambilan keputusan	<i>Problem-based Learning</i>			PKn X / SMA / SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ulangan Harian 1					2	

<p>3.2. Mengkategorikan Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan</p>	<p>3.2.1 Mengidentifikasi Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia .</p>	<p><i>Problem-based Learning</i></p>	<p>Tertulis isay</p>	<p>8</p>	
	<p>3.2.2 Membedakan Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.</p>	<p>Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia</p>				
	<p>3.2.3. Menganalisis kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia.</p>	<p>Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia</p>				<p>PKn X / SMA / SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>
	<p>3.2.4. Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan</p>	<p>Sistem pertahanan dan keamanan RI.</p>				

	Republik Indonesia.					
4.2 Menyaji hasil analisis tentang isi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan	4.2.1. Menyaji hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk agama dan kepercayaan, Serta pertahanan dan keamanan.	Mempresentasikan analisis tentang isi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan	<i>Problem Based Learning</i>			
	4.2.2. Mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan					

	penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.					
Ulangan Tengah Semester					2	
Ulangan Harian 2					2	
3.3 Mensintesis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.3.1. Mengidentifikasi Suprastruktur Sistem Politik Indonesia.	Supra struktur infrastruktur politik di Indonesia		Tes tertulis Esay	6	
	3.3.2. Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945..	Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945	Discovery Learning			Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,. Untuk SMA/MA/SMK/MA

						K Kelas X
	3.3.3 Menganalisis Impeachment dalam Ketatanegaraan RI.	Pengangkatan dan pemberhentian Presiden				PKn X / SMA / SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	3.3.4. Menganalisis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik				
	3.3.5. Menunjukkan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik RI.	Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia				
4.3 Mendemonstrasika n hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3.1 Menyajikan tugas dan wewenang lembaga negara	Mengkomunikasikan n tugas dan wewenang lembaga negara				
	4.3.2					

	Menyajikan tata kelola pemerintah yang baik.					
3.4 Mengkreasikan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.4.1 Menganalisis Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	Konsep Desentralisasi atau Otonomi Daerah	Problem Based Learning	Tes tertulis Esay	8	UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
	3.4.2 Mengidentifikasi Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat	Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat.				Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,. Untuk SMA/MA/SMK/MA K Kelas X
	3.4.3 Mengidentifikasi Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah.	Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah				UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Penugasan					2	
	3.4.4 Menampilkan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.	Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah				
4.4 Menyaji hasil penalaran tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4.1 Menyajikan penalaran tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD NRI Tahun 1945	Menyajikan hasil penalaran tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Problem Based Learning			PKn X / SMA / SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ulangan harian 3					2	
Ulangan Umum semester 1					2	
Jumlah					44 Jam	
Dengan Rincian						

Pembelajaran Teori					28	
Ulangan Harian 3 kali					6	
PLS					2	
Pekan Pengembangan diri					2	
Ulangan Tengah semester					2	
Ulangan Akhir semester					2	
Penugasan					2	
Total					44	

7. PROGRAM SEMESTER KELAS X

No. Dokumen	F/751/WKS1/3
Revisi	3
Tgl. Berlaku	1 Juli 2014

MAPPING ANALISIS PROGRAM PEMBELAJARAN SEMESTER
Tahun Pelajaran 2017/2018

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Tempel
 Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
 Kompetensi Keahlian : AK, AP, PM dan TKJ

Mata Pelajaran : PPKn
 Standar Kompetensi :
 Kelas / Semester : X / 1

No	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Alokasi Waktu	Waktu Pelaksanaan (Minggu Efektif ke)																				Ket.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara		6																				PLS + PGD 4 Jam	
		A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia		2																				
		B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-			2																			

No	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Alokasi Waktu	Waktu Pelaksanaan (Minggu Efektif ke)																				Ket.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Kementerian																						
		C. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan				2																		
	Ulangan Harian 1						2																	
2	Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara		8																					
		A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia					2																	
		B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia						2																
		C. Kemerdekaan Beragama dan								2														

No	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Alokasi Waktu	Waktu Pelaksanaan (Minggu Efektif ke)																				Ket.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Berkepercayaan di Indonesia																						
		D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia																						
3.	Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		6																					
		A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik																						
		B. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945																						
		C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																						

No	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Alokasi Waktu	Waktu Pelaksanaan (Minggu Efektif ke																				Ket.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia																						
	Ulangan Harian 2																							
	<i>UTS</i>																							
4	Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah		8																					
		A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negar Kesatuan Republik Indonesia																						
		B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat																						

No	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Alokasi Waktu	Waktu Pelaksanaan (Minggu Efektif ke)																				Ket.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah																			2			
		D. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah																				2		
	Ulangan Harian 3																						2	
	Ujian akhir Semester 1																							2
	Perbaikan																							2
	Jumlah jam Teori	6 + 8 + 6 + 8 = Pembelajaran Teori (28)																						
	Ulangan Harian	PLS + Pengembangan Diri = 4 Ulangan Harian = 6 MIT (ulangan tengah semester) = 2 Kenaikan Kelas = 2 Cadangan / perbaikan = 2																						
	TOTAL	28 + 6 + 6 = 40 (44 Jam)																						

Tempel, 20 juli 2017

Mengetahui:

Kepala SMK Negeri 1 Tempel,

WKS 1,

Guru/Instruktur,

Dra. Nuning Sulastri, M.M.
NIP 19610828 198803 2 010

Dra. Rr. Ratna Wiwara N.
NIP 19681005 199412 2 006

Yustinus Suharjana, S.Pd.
NIP 19660908 200701 1 011

8. KALENDER AKADEMIK



PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
SMK NEGERI 1 TEMPEL

• Teknik Komputer dan Jaringan • Pemasaran • Administrasi Perkantoran • Akuntansi
Jalan Magelang Km 17, Jlegongan, Margorejo, Tempel Sleman, Yogyakarta 55552
Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869068
Website : www.smkn1tempel.sch.id, e-mail: smkn1tempel@gmail.com

KALENDER PENDIDIKAN

Tahun Pelajaran 2017/2018



No. : F1/U04/KBM/06.3

Tgl. : 11 August 2016

	Jul-17	Agust-17	Sep-17	Okt-17
Minggu	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
Senin	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
Selasa	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
Rabu	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
Kamis	6 13 20 27	3 10 17 24	7 14 21 28	5 12 19 26
Jumat	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
Sabtu	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28

	Nop-17	Des-17	Jan-18	Feb-18
Minggu	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25
Senin	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26
Selasa	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27
Rabu	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	7 14 21 28
Kamis	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29
Jumat	3 10 17 24 31	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30
Sabtu	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24

	Mar-18	Apr-18	Mei-18	Jun-18
Minggu	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24
Senin	5 12 19 26	9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
Selasa	6 13 20 27	10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
Rabu	7 14 21 28	11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
Kamis	1 8 15 22 29	12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
Jumat	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
Sabtu	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30

	Jul-18
Minggu	1 8 15 22 28
Senin	2 9 16 23 30
Selasa	3 10 17 24 31
Rabu	4 11 18 25
Kamis	5 12 19 26
Jumat	6 13 20 27
Sabtu	7 14 21 28

- : Libur Semester
- : PPDB
- : HUT SMK Tpl ke-53
- : PLS
- : Pesantren Ramadhan
- : Libur awal Ramadhan
- : Libur akhir Ramadhan
- : Libur Idul Fitri *)

- : PTS 1 dan 2
- : UKK Kls. X & XI
- : PAS/PAT
- : Perbaikan Nilai
- : Pekan Pengemb. Diri
- : Penerimaan LHB
- : Kunjungan Industri
- : UPK Kelas XII
- : Ujian Praktik Kls XII
- : Ujian Nasional Utama
- : Persiapan Prakerin Kelas XI
- : Hardiknas
- : Audit Internal
- : Managemen Review
- : Audit Eksternal
- : Libur Umum
- : Libur Khusus 01 Februari - 30 April 2018
- : Keg. Haornas
- : Peringatan Hari Kartini
- : PHBI Idul Adha
- : Hari Jadi Kab. Sleman

29 Mei 2017
Kepala Sekolah,
SMKN 1 TEMPEL
Dra. NUNING SULASTRI, M.M.
NIP. 19610828 198803 2 010

Semester Gasal (1) : Kls. X, XI & XII 22 minggu efektif
Semester Genap (2) : Ksl. X & XI 23 minggu efektif
Semester Genap (2) : Kls XII 14 minggu efektif

**KETERANGAN KALENDER PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 TEMPEL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Semester	No.	Tanggal	Kegiatan
Gasal	1	19 Juni - 1 Juli 2017	Hari libur Ramadhan (akhir bln Ramadhan)
	2	3 - 15 Juli 2017	Libur Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2016/2017
	3	5 s.d. 11 Juli 2017	PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018
	4	17 - 19 Juli 2017	Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)
	5	25 - 26 Juli 2017	Audit Internal
	6	01 Agustus 2017	HUT SMK Negeri 1 Tempel ke 53
	7	17 Agustus 2017	HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
	8	30 - 31 Agustus 2017	Management Review
	9	31 Agustus 2017	Hari Keistimewaan Yogyakarta
	10	01 September 2017	Hari Besar Idul Adha 1437 H
	11	02 September 2017	PHBI Idul Adha 1437 H
	12	09 September 2017	Kegiatan Hari Olahraga Nasional
	13	21 September 2017	Tahun Baru Hijryah 1439 H
	14	25 Sept. - 30 Sept. 2017	Penilaian Tengah Semester 1
	15	25 - 26 Oktober 2017	Audit Eksternal
	16	02 - 03 Nopember 2017	Kunjungan Industri Kelas XI
	17	22 - 28 November 2017	UKK Kelas X dan XI
	18	25 November 2017	Hari Guru Nasional
	19	29 Nov. - 6 Des. 2017	Penilaian Akhir Semester
	20	1 Desember 2017	Libur Maulid Nabi Mubammad SAW 1437 H
	21	7 - 12 Desember 2017	Perbaikan Nilai Penilaian Akhir Semester
	22	13 - 15 Desember 2017	Pekan Pengembangan Diri dan Porsenitas
	23	16 Desember 2017	Penerimaan Laporan Hasil Belajar
	24	18 - 30 Desember 2017	Libur Semester Gasal
	25	25 Desember 2017	Hari Natal 2017
	26	01 Januari 2018	Tahun Baru 2018
Genap	27	02 Januari 2018	Hari Pertama Masuk Sekolah
	28	29 - 31 Januari 018	Pembekalan Prakerin Kelas XI
	29	01 Februari s.d. 30 April 2018	Prakerin Kelas XI
	30	5 - 10 Februari 2018	Ujian Sekolah Praktik Kelas XII
	31	16 Februari 2018	Tahun baru Imlek 2569
	32	19 - 22 Februari 2018	UPK Kls XII
	33	26 Feb. - 3 Maret 2018	Penilaian Tengah Semester 2
	34	17 Maret 2018	Hari Raya Nyepi 1940
	35	19 - 26 Maret 2018	Ujian Sekolah Kelas XII

9. JADWAL MENGAJAR

Jam		RABU																										
ke-	X Ak1	X Ak2	X Ak3	X AP1	X AP2	X AP3	X Pm1	X Pm2	X TKJ	XI Ak1	XI Ak2	XI Ak3	XI AP1	XI AP2	XI AP3	XI Pm1	XI Pm2	XI TKJ	XII Ak1	XII Ak2	XII Ak3	XII AP1	XII AP2	XII AP3	XII Pm1	XII Pm2	XII Pm3	
0	DOA BERSAMA, TADARUS DAN LITERASI																											
1	13 R	26 A	43 PP	29 V	12 M	11 J	52 MB	16	58 KB	14 2A	39 2B	53 2C	24 G	15 OR	34 LAF	27 S	25 U	54 LTK	28 F	7 MS	44 KC	37 Q	31 K	30 KA	20 N	10 O	50 P	
2	13 R	26 A	43 PP	29 V	12 M	11 J	52 MB	16	58 KB	14 2A	39 2B	53 2C	24 G	15 OR	34 LAF	27 S	25 U	54 LTK	28 F	7 MS	44 KC	37 Q	31 K	30 KA	20 N	10 O	50 P	
3	7 MS	46 A	43 PP	29 V	16 OR	12 L	13 PI	54 MB	26 U	14 2A	25 2B	22 2C	11 G	34 M	27 R	49 S	15 OR	58 LTK	31 F	44 KC	39 J	32 LAP	37 KA	10 K	48 N	28 O	50 P	
4	7 MS	46 A	18 PP	35 Q	16 OR	36 L	13 PI	54 MB	26 U	24 2A	25 2B	22 2C	11 G	34 M	27 R	49 S	15 OR	56 KB	31 F	44 KC	39 J	32 LAP	37 KA	10 K	48 N	28 O	51 P	
5	7 MS	46 A	13 PP	35 Q	59 LAF	36 L	48 S	27 2B	29 U	24 2A	45 KC	14 2C	17 RM	34 M	37 R	31 MB	6 V	56 KB	42 F	28 G	39 J	20 K	12 O	16 OR	47 N	30 KA	51 P	
6	26 I	7 MS	11 PP	35 Q	59 LAF	54 PI	48 S	27 2B	58 LTH	40 2A	45 KC	10 2C	17 RM	49 M	14 R	31 MB	6 V	56 KB	42 F	28 G	39 J	20 K	12 O	16 OR	47 N	30 KA	51 P	
7	26 I	18 RM	11 PP	7 MS	21 A	54 PI	48 S	23 L	58 LTH	40 2A	42 H	10 2C	34 2B	49 M	14 R	51 U	50 V	56 KB	24 F	53 G	39 J	12 K	19 LB	32 LAF	17 N	52 MB	30 KA	
8	41 I	18 RM	36 PP	7 MS	54 A	21 P	27 O	23 L	58 LTH	11 2A	42 H	45 KC	34 2B	59 R	35 Q	10 U	50 V	56 KB	24 F	53 G	39 J	12 K	19 LB	32 LAF	29 N	52 MB	30 KA	
9	41 I	18 RM	36 PP	7 MS	54 A	21 P	27 O	23 L	58 LTH	11 2A	14 H	45 KC	34 2B	59 R	35 Q	10 U	50 V	56 KB										

Jam		KAMIS																										
ke-	X Ak1	X Ak2	X Ak3	X AP1	X AP2	X AP3	X Pm1	X Pm2	X TKJ	XI Ak1	XI Ak2	XI Ak3	XI AP1	XI AP2	XI AP3	XI Pm1	XI Pm2	XI TKJ	XII Ak1	XII Ak2	XII Ak3	XII AP1	XII AP2	XII AP3	XII Pm1	XII Pm2	XII Pm3	
0	DOA BERSAMA, TADARUS DAN LITERASI																											
1	54 PP	11 A	41 F	16 OR	7 MS	18 RM	29 Pg	13 R	55 LTH	49 S	45 KC	14 G	21 N	59 LAF	15 OR	27 2A	36 2B	58 KB	10 H	26 I	24 J	32 Q	34 L	12 M	30 KA	31 O	28 P	
2	54 PP	11 A	41 F	16 OR	7 MS	18 RM	29 Pg	13 R	55 LTH	49 S	45 KC	14 G	21 N	59 LAF	15 OR	27 2A	36 2B	58 KB	10 H	26 I	24 J	32 Q	34 L	12 M	30 KA	31 O	28 P	
3	21 PP	41 A	54 PI	36 J	7 MS	18 RM	29 Pg	11 R	55 LTH	45 KC	14 F	17 G	31 P	27 U	59 LAF	10 2A	49 2B	6 I	42 H	16	30 KB	28 K	34 L	32 KA	24 N	52 ME	15 OR	
4	29 PP	41 A	54 PI	36 J	35 Q	25 V	18 RM	11 R	55 LTH	45 KC	14 F	17 G	31 P	27 U	59 LAF	10 2A	49 2B	6 I	42 H	16	30 KB	28 K	26 L	32 KA	24 N	52 ME	15 OR	
5	29 PP	7 A	16 OR	12 Pg	35 Q	25 V	18 RM	50 R	55 LTH	17 S	25 F	45 KC	11 O	46 U	34 LAF	48 2A	54 2B	15 OR	53 H	42 I	10 J	24 K	26 L	37 M	31 N	13 P	52 MB	
6	29 PP	7 A	16 OR	12 Pg	35 Q	33 KA	18 RM	50 R	55 KB	17 S	25 F	45 KC	11 O	46 U	34 LAF	48 2A	54 2B	15 OR	53 H	42 I	10 J	24 K	26 L	37 M	31 N	13 P	52 MB	
7	44 KC	21 A	46 PP	12 Pg	18 RM	33 KA	23 V	52 R	55 KB	17 S	25 F	14 G	37 N	35 Q	34 LAF	50 2A	51 2B	13 LTK	20 H	29 I	42 J	31 K	26 L	22 M	49 ME	19 LB	26 P	
8	44 KC	21 A	46 PP	25 N	18 RM	35 LAF	23 V	52 R	58 KB	6 S	54 F	39 G	34 KA	37 Q	14 U	50 2A	51 2B	55 LTK	20 H	17 I	42 J	31 K	29 L	22 M	49 ME	19 LB	26 P	
9	44 KC	21 A	46 PP	25 N	18 RM	35 LAF	23 V	52 R	58 KB	6 S	54 F	39 G	34 KA	37 Q	14 U	50 2A	51 2B	55 LTK										

KETERANGAN JAM PEMBELAJARAN :**Jam Pembelajaran hari Senin**

- 1 06.55 - 08.00
- 2 08.00 - 08.45
- 3 08.45 - 09.30
Istirahat 15'
- 4 09.45 - 10.30
- 5 10.30 - 11.15
- 6 11.15 - 12.00
Istirahat 30'
- 7 12.30 - 13.15
- 8 13.15 - 14.00
- 9 14.00 - 14.45
- 10 14.45 - 15.30

Jam Pembelajaran hari Selasa - Kamis

- 0 06.55 - 07.15
- 1 07.15 - 08.00
- 2 08.00 - 08.45
- 3 08.45 - 09.30
Istirahat 15'
- 4 09.45 - 10.30
- 5 10.30 - 11.15
- 6 11.15 - 12.00
Istirahat 30'
- 7 12.30 - 13.15
- 8 13.15 - 14.00
- 9 14.00 - 14.45

Jam Pembelajaran hari Jumat

- 1 06.55 - 08.15
- 2 08.15 - 09.00
- 3 09.00 - 09.45
Istirahat 15'
- 4 10.00 - 10.45
- 5 10.45 - 11.30

Jam Pembelajaran hari Sabtu

- 0 06.55 - 07.15
- 1 07.15 - 08.00
- 2 08.00 - 08.45
- 3 08.45 - 09.30
Istirahat 15'
- 4 09.45 - 10.30
- 5 10.30 - 11.15
- 6 11.15 - 12.00
Istirahat 30'
- 7 12.30 - 13.15
- 8 13.15 - 14.00

KETERANGAN KODE GURU :

- 1 Dra. Nuning Sulastri, M.M.
- 2 Titik Setyani, S.Pd.
- 3 Sri Lestari, S.Pd., M.M.
- 4 Etik Romdioniyati, S.Pd.
- 5 Anna Zahrotun Noor, S.Psi.
- 6 Sriyono, S.Ag., M.Pd.
- 7 Mohammad Amir Firdaus, S.Pd.I.
- 8 Gregorius Sugestiawan
- 9 Tusia, S.Pak.
- 10 R. Agus Kuncoro, S.Pd.
- 11 Yustinus Suharjana, M.Pd.
- 12 Dra. Diah Rosmanidar, M.M.

- 13 Lusi Idawati, S.Pd., M.M.
- 14 R. Dani Nurcahyo Trimastoyo, S.Pd.
- 15 Dra. Lilik Sumaryati
- 16 Drs. Budi Suharto
- 17 Pramuhasuti, S.Pd., M.M.
- 18 Shofa Ardiansyah Alhadi, S.Pd.
- 19 Dra. Rr. Ratna Wiwara Nugrahaningsih, M.M.
- 20 Suprpto, S.Pd., M.M.
- 21 Agus Yulianta Nugraha, S.Pd.
- 22 Juni Astuti, S.Pd.
- 23 Suratmi, S.Pd.
- 24 Dra. Sri Windaryati, M.M.

- 25 Prih Yunanta, S.Pd., M.M.
- 26 Tutik Isyuwanti, S.Si., M.M.
- 27 Finka Fitri Astika, S.Pd.
- 28 Dra. Ch. Dasarath SESS
- 29 Dra. Suratminiati
- 30 Ahmad Arief Arifianto, S.T.
- 31 Dra. Ngatni
- 32 Dra. Eny Pujiasri, M.M.
- 33 Badrus Suryadi, S.Pd., M.M.
- 34 Sri Widayati, S.Pd., M.M.
- 35 Rini Ambarwati, S.Pd.
- 36 Dra. Endang Wahyuningsih

- 37 Drs. Sumaryono
- 38 Dita Rizqi Dewinta Sari, M.Pd.
- 39 Dra. Sri Sugiharti
- 40 Dra. Yatimatun Naff'ah, M.M.
- 41 Drs. Sudirman, M.M.
- 42 Binti Chomsiatin, S.E., M.M.
- 43 Sumiyati, S.Pd., M.M.
- 44 Drs. Sudarto
- 45 Suwartini, S.Pd.
- 46 Ch. Ety Patmi Hartati, S.Pd.
- 47 Murdiyati, S.E.
- 48 Murdiyati Rochminingtyas, S.E., M.M.

KETERANGAN RUANG :

- A - V : Ruang Kelas
- KA : R. Lab. Komputer A
- KB : R. Lab. Komputer B
- KC : R. Lab. Komputer C
- MB : R. Mesin Bisnis
- OR : Olah Raga
- PP : R. Pembukuan
- LB : R. Lab. Bahasa
- LAP : R. Lab. Adm. Perkantoran
- RM : Ruang Musik
- Pt : R. Perpustakaan
- MB : Lab. Mesin Bisnis
- MS : Mushola
- Pg : Panggung
- LTK : Lab. TKJ

- 49 Drs. Suparna, M.M.
- 50 Dra. Intarti Sulistiyani
- 51 Binti Mahtumah, S.Pd.
- 52 Ely Arinawati, S.Pd.
- 53 Suprahwana Wahyu Diharja, S.S.
- 54 Beti Rahmasari Utami, M.Pd
- 55 Purwoko Haryadi Santoso, M.Pd.
- 56 Andi Martanto, S.T.
- 57 Drs. Cahyo Wibowo, M.M.
- 58 Tresnani Inaperminavia, S.Kom.
- 59 Fasikha, S.Sos.

Tempel, 22 September 2017

Kepala SMK Negeri 1 Tempel,

Dra. NUNING SULASTRI, M.M.
Pembina, IV/a
NIP. 19710828 198803 2 010

10. Soal UTS
11. Kunci Jawaban UTS



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

SMK NEGERI 1 TEMPEL

• Teknik Komputer dan Jaringan • Pemasaran • Administrasi Perkantoran • Akuntansi

Jalan Magelang Km 17, Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta, 55552

Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869-068

Website : www.smkn1tempel.sch.id , E-mail: smkn1tempel@gmail.com



No. : F1/U04/EVA/04.0

Tgl. : 19 Jul 2016

ULANGAN TENGAH SEMESTER

SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Mata Pelajaran : PPKn
Kompetensi Keahlian : Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi
Tata Kelola Perkantoran, Bisnis Daring dan
Pemasaran, Teknik Komputer dan Jaringan .
Kelas / Semester : X / Ganjil
Hari, Tanggal : Selasa, 26 September 2017
Waktu : 09.30 – 10.30
Guru Mata Pelajaran : Y. Suharjana

Petunjuk Umum :

1. Berdo'alah sebelum dan sesudah mengerjakan soal
2. Periksa dan bacalah setiap perintah soal sebelum menjawab
3. Norma penilaian :
Jumlah skor 10 + 5 + 10 + 15 + 10 + 5 + 15 + 10 + 10 + 10 = N

10

I. Kerjakan soal berikut ini dengan benar !

1. Jelaskan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ! (10)
2. Jelaskan Perbedaan tugas MA dan MK ! (5)
3. Sebutkan 3 nilai Sila Ke – 3 dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ? (10)
4. Jelaskan konsep hukum laut tahun 1982 dan isi UU. No.17 tahun 1985 ! (15)
5. Bagaimana upaya memanfaatkan dan melestarikan sumber kekayaan yang ada di Indonesia ? (10)
6. Jelaskan perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara ! (5)
7. Mengapa seseorang dapat dikatakan bipatride dan apatride, dan bagai mana seseorang tersebut nantinya dapat memiliki status kewarganegaraan ? (15)
8. Sebutkan asas- asas kewarganegaraan yang sesuai dengan UU. No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan ? (10)
9. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan hak opsi dan hak repudiasi ! (10)
10. Jelaskan perbedaan antara naturalisasi istimewa dengan natiralisasi biasa ! (10)

Selamat mengerjakan semoga sukses!

Kunci Jawaban UTS Ganjil 2017/2018 (PPKn)

1. Konsep Pembagian kekuasaan di Indonesia (10)

a. Secara Horisontal :

1) Konstitutif

2) Eksekutif

3) Legislatif

4) Yudikatif

5) Eksaminatif

6) Moneter

b. Secara Vertikal : pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya sesuai

pasal 18 ayat 1

- 1) Tingkat pusat
- 2) Tingkat daerah

2. Tugas MA dan MK (5)

MA : mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah UU

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum

MK : mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat Final, menguji UU dibawah UUD

Menylesaikan permasalahan yang berkaitan dengan politik

3. Nilai Sila Ke 3 dalam penyelenggaraan pemerintahan (10)

- 1) Nasionalisme
- 2) Cinta bangsa dan tanah air
- 3) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
- 4) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
- 5) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan

4. Konsep Hukum Laut 1982 (UU No. 17 tahun 1985) (15)

Indonesia suatu negara kepulauan dengan luas 5.180.053 km²

Darat 1.922.570 km² dan lautan 3.257.483 km².

- a. Laut Teritorial : 12 Mil
- b. Zone landas kontinen : kedalamannya kurang dari 150 m
- c. ZEE : 200 mil ke arah laut terbuka

5. Upaya pelestarian SDA (10)

- a. Memanfaatkan SDA untuk kemakmuran rakyat
- b. Menjamin dan melindungi segala hak – hak Rakyat
- c. Mencegah tindakan yang bertujuan merusak orang banyak

6. Perbedaan Penduduk dan bukan penduduk (5)

Perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara

Penduduk : bertempat tinggal di wilayah dan menetap

Bukan penduduk : tidak menetap : tugas belajar

Warga negara : terikat hak dan kewajiban di suatu negara

Bukan warga negara : tidak terikat oleh tata tertib di negara yang ditinggali
(warga negara lain Wisatawan DLL)

7. Seseorang dapat dikatakan Bipatride dan apatride dan bagaimana cara mendapatkan status kewarganegaraan (15)

Bipatride : anak yang berasal dari suatu negara yang menganut ius sanguinis dan lahir di negara yang berdasar asas ius soly untuk mendapatkan kewarganegaraan dengan hak repudiasi (tanpa tindakan hukum menolak salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya)

Apatride : Anak yang berasal dari negara yang menganut ius soly terlahir di negara yang menganut ius sanguinis untuk mendapatkan status kewarganegaraan dengan hak opsi (mengajukan permohonan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan dimana dia tinggal)

8. Asas kewarganegaraan menurut UU. No 12 Tahun 2006 (10)

- a. Ius Sanguinis
- b. Ius soly
- c. Asas kewarga negaraan tunggal
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas

9. Hak opsi : hak untuk memilih salah satu kawarganegaraan (10)

Hak repudiasi : hak untuk menolak salah satu kewarganegaraan

10. Naturalisasi istimewa : seseorang mendapatkan status kewarganegaraan tanpa melakukan tindakan hukum dengan sendirinya karena dinilai berjasa / membawa nama baik bangsa dan negara dimana dia tinggal (10)

Naturalisasi biasa : proses mendapatkan status kewarganegaraan dengan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan / persyaratan yang berlaku

12. Soal Penilaian Harian Kelas X
13. Jawaban Penilaian Harian Kelas X



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

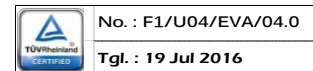
SMK NEGERI 1 TEMPEL

•TeknikKomputerdanJaringan•Pemasaran•AdministrasiPerkantoran•Akuntansi

Jalan Magelang Km 17 , Jlegongan, Margorejo,Tempel, Sleman, Yogyakarta, 55552

Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869-068

Website : www.smkn1tempel.sch.id , E-mail:smkn1tempel@ymail.com



PENILAIAN HARIAN

SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Mata Pelajaran : PPKn

Kompetensi Keahlian : Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi

Tata Kelola Perkantoran, Bisnis Daring dan

Pemasaran , Teknik Komputer dan Jaringan .

Kelas / Semester : X / Ganjil

PetunjukUmum :

- 4. Berdo'alah sebelum dan sesudah mengerjakan soal**
- 5. Periksa dan bacalah setiap perintah soal sebelum menjawab**
- 6. Norma penilaian :**

Jumlah skor 10 +5 +20 +10 +10 +10 +15 +20 = N

10

II.Kerjakan soal berikut ini dengan benar !

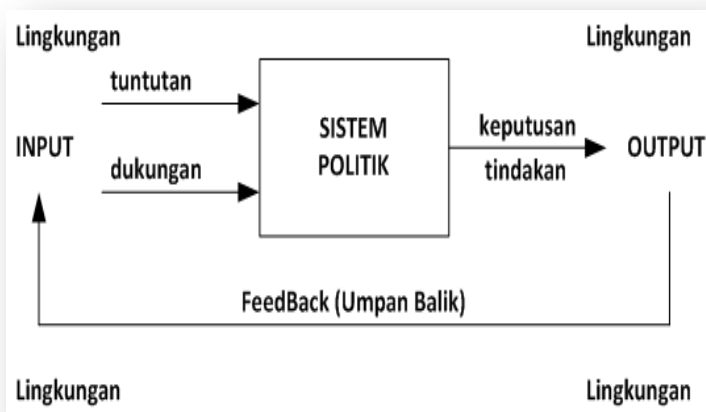
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik?
2. Apa saja yang termasuk kedalam Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik ?

3. Gambarkan dan jelaskan analisa sistem politik menurut David Easton !
4. Bagaimana tatakelola pemerintahan yang baik menurut pendapat anda ?
5. Sebutkan Ciri/karakteristik tatakelola pemerintahan yang baik menurut Laode Ida!
6. Apa yang dimaksud dengan partisipasi Politik menurut pendapat anda?
7. Sebutkan contoh partisipasi atau perilaku politik yang ada di :
 - a. Lingkungan Sekolah
 - b. Lingkungan Masyarakat
 - c. Lingkungan Negara
8. Sebutkan tugas atau kewenangan dari :
 - a. Presiden
 - b. DPR
 - c. MPR
 - d. MA dan MK

Selamat mengerjakan semoga sukses!

JAWABAN :

1. suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif.
2. Yang termasuk kedalam suprastruktur : kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative, kekuasaan yudikatif (MPR, PRESIDEN, DPR, BPK, MA, MK, KY, DPD)
Yang termasuk kedalam infrastruktur : parpol, kelompok penekan, kelompok kepentingan, media komunikasi politik
3. Gambar :



4. Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
5. Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi
 - b) Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas
 - c) Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), dimana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi
 - d) Keseimbangan kekuatan (balance of force), di mana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama
 - e) Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

6. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

7. 1. Di lingkungan sekolah

Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui:

- a. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
- b. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti
- c. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah

2. Di lingkungan masyarakat

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain:

- a. Forum warga
- b. Pemilihan ketua RT, RW, Kepala Desa, Ketua organisasi Masyarakat dan sebagainya
- c. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya

3. Di lingkungan negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya melalui kegiatan:

- a) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan Presiden
- b) Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkadal)
- c) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun

8. Tugas dan wewenang :

a) Presiden

- Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
- Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))
- Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal 10)
- Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)
- Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
- Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
- Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1))
- Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2))
- Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
- Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16)
- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)
- Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

b) DPR

- memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**];
- mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**];
- pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)**];
- persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****];
- pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*];

- pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*];

c) MPR

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37 ****];
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/*];
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/*];
- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****];

d)

MA

- Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang

MK :

- Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
- Memutus pembubaran partai politik
- Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)

- Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

14. LAMPIRAN NILAI KELAS X

No	Nama Peserta Didik	KD. 1 : 3.4										Predikat		
		PENUGASAN					PH							
Induk	Kelas : X-AK1	T-1	T-2	T-3	T-4	Rata2 Tugas	Nilai	Ket. NPH	Remidi/Pengayaan		Nil. PH KD.1	Ket. PH	Nil. KD.1	
		1	2	1	2									
11081	Amanda Egi Adisti	83	80	100		88	85	Tnts			85	Tnts	87	B
11082	Anggita Dwi Cahyaningrum	80	80	70		77	85	Tnts			85	Tnts	81	B
11083	Ani Nur Velani	80	80	90		83	85	Tnts			85	Tnts	84	B
11084	Asri Nur Fidiyawati	80	83	90		84	84	Tnts			84	Tnts	84	B
11085	Desinta Ramadha Ajeng Setyawati	80	80	80		80	85	Tnts			85	Tnts	83	B
11086	Desy Savitri	83	80	100		88	80	Tnts			80	Tnts	84	B
11087	Dita Nur Shabrina	80	80	80		80	85	Tnts			85	Tnts	83	B
11088	Echa Jessica Putri	80	80	80		80	85	Tnts			85	Tnts	83	B
11089	Fajarini Isha Sulistyowati	83	83	90		85	84	Tnts			84	Tnts	85	B
11090	Febriana Mega Utami	80	81	90		84	85	Tnts			85	Tnts	85	B
11091	Findiana Tri Astuti	80	80	90		83	85	Tnts			85	Tnts	84	B
11092	Fylma Cantik	83	80	80		81	84	Tnts			84	Tnts	83	B
11093	Indah Septiana	80	82	90		84	85	Tnts			85	Tnts	85	B
11094	Indrayani	80	80	90		83	85	Tnts			85	Tnts	84	B
11095	Iswati	83	81	90		85	86	Tnts			86	Tnts	86	A
11096	Juli Rachmawati	80	80	100		87	86	Tnts			86	Tnts	87	A
11097	Karen Alda Afraliana	80	80	60		73	84	Tnts			84	Tnts	79	B
11098	Kurnia Sari	83	81	80		81	84	Tnts			84	Tnts	83	B
11099	Lailatun Nihayah	80	80	60		73	84	Tnts			84	Tnts	79	B
11100	Laras Siti Nurhayati	80	80	90		83	85	Tnts			85	Tnts	84	B
11101	Linda Tri Astuti	80	80	80		80	84	Tnts			84	Tnts	82	B
11102	Meysa Nabila Sulistyowati	80	85	80		82	85	Tnts			85	Tnts	84	B
11103	Mia Rahmawati	83	82	80		82	84	Tnts			84	Tnts	83	B
11104	Nina Annisa	80	82	80		81	84	Tnts			84	Tnts	83	B
11105	Novitasari Putri Iswahyudi	80	83	80		81	84	Tnts			84	Tnts	83	B
11106	Putri Neva Sasa Khoirinda	80	83	70		78	84	Tnts			84	Tnts	81	B
11107	Rani Dea Safitri	80	80	90		83	84	Tnts			84	Tnts	84	B
11108	Riska Septyani	80	80	80		80	86	Tnts			86	Tnts	83	A
11109	Uzzatul Qarinah	80	83	70		78	84	Tnts			84	Tnts	81	B
11110	Wulan Fitri Rahayu	85	80	80		82	84	Tnts			84	Tnts	83	B
11111	Yuliana Liska Savitri	80	81	80		80	84	Tnts			84	Tnts	82	B
11112	Zeni Pupita Sari	80	80	100		87	86	Tnts			86	Tnts	87	A

15. Kartu Bimbingan PLT



KARTU BIMBINGAN PLT
PUSAT PENGEMBANGAN PPL DAN PKL
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) UNY
 TAHUN.....

F04
 UNTUK MAHASISWA

Nama Sekolah / Lembaga : *SMK N 1 Tempel*
 Alamat Sekolah : *Jl. Magelang km 17, Tempel, Sleman, Yk* Fax / Telp. Sekolah : *0274 869 / 0274 069 - 060*
 Nama DPL PLT : *Dr. Samudra, S.P.d, N. Ag*
 Prodi / Fakultas DPL PLT : *PXU / FIS*
 Jumlah Mahasiswa PLT : *2 Orang*

No	Tgl. Kehadiran	Jml Mhs	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan DPL PLT
			<i>Penglat APP</i>		<i>[Signature]</i>
			<i>Publikasi Pembelajaran</i>		
			<i>Pemngan Laporan PLT</i>		
			<i>Laporan PLT</i>		

PERHATIAN :
 * Kartu bimbingan PLT ini dibawa oleh mhs PLT (1 kartu utk 1 prodi).
 * Kartu bimbingan PLT ini harus diisi materi bimbingan dan dimintakan tanda tangan dari DPL PLT setiap kali bimbingan di lokasi.
 * Kartu bimbingan PLT ini segera dikembalikan ke PP PPL & PKL UNY paling lambat 3 (tiga) hari setelah penarikan mhs PLT untuk keperluan administrasi.

Mengetahui,
 Kepala PP PPL DAN PKL,
 Dr. Sulis Triyono, M.Pd
 NIP. 19580506 198601 1 001


 Mengetahui,
 Kepala Sekolah Lembaga
Dr. Atmaja Salath, M.M.
 NIP. 19610 828 198803 2010

.....
 Ketua Kelompok PLT
[Signature]

16. JADWAL PIKET MAHASISWA

JADWAL PIKET HARIAN

HARI	NAMA MAHASISWA
SENIN	1. Fadhillah Khoirurosyid 2. Irena Puspitaningratri
SELASA	1. Ari Sucipto 2. Deni Widiyatmoko 3. Ananda Misael Ardika
RABU	1. Tiyas Sari Martiyaningsih 2. Aditya Harist Ari F
KAMIS	1. Dwiky Puspita W 2. Fransisca Vera Damartha
JUMAT	1. Isna Nur Khasanah 2. Siti Khotimah
SABTU	1. Ulfa Nur Ikawati 2. Noviana Nur Vatoni

JADWAL PIKET SIMPATIK

HARI	NAMA MAHASISWA
SENIN	<ol style="list-style-type: none">1. Fadhillah Khoirurosyid2. Deni Widiyatmoko3. Aditya Harist Ari F
SELASA	<ol style="list-style-type: none">1. Irena Puspitaningratri2. Siti Khotimah
RABU	<ol style="list-style-type: none">1. Ananda Misael Ardika2. Noviana Nur Vatoni
KAMIS	<ol style="list-style-type: none">1. Dwiky Puspita W2. Ulfa Nur Ikawati
JUMAT	<ol style="list-style-type: none">1. Fransisca Vera Damartha2. Isna Nur Khasanah
SABTU	<ol style="list-style-type: none">1. Ari Sucipto2. Tiyas Sari Martiyaningsih

JADWAL PRAMUKA

HARI	NAMA MAHASISWA
SABTU I	<ol style="list-style-type: none">1. Irena Puspitaningratri2. Siti Khotimah3. Fransisca Vera Damartha4. Ananda Misael Ardika
SABTU II	<ol style="list-style-type: none">1. Isna Nur Khasanah2. Deni Widiyatmoko3. Tiyas Sari Martiyaningsih4. Dwiky Puspita W5. Fadhillah Khoirurosyid
SABTU III	<ol style="list-style-type: none">1. Ari Sucipto2. Aditya Harist Ari F3. Noviana Nur Vatoni4. Ulfa Nur Ikawati
SABTU IV	<ol style="list-style-type: none">1. Noviana Nur Vatoni2. Fransisca Vera Damartha3. Ananda Misael Ardika4. Isna Nur Khasanah5. Fadhillah Khoirurosyid
SABTU V	<ol style="list-style-type: none">1. Ari Sucipto2. Irena Puspitaningratri3. Siti Khotimah4. Dwiky Puspita W
SABTU VI	<ol style="list-style-type: none">1. Deni Widiyatmoko2. Ulfa Nur Ikawati3. Tiyas Sari Martiyaningsih4. Aditya Harist Ari F

17. DOKUMENTASI MAHASISWA

LAMPIRAN FOTO :



1. Membantu Inventaris Buku Perpus



2. Melaksanakan Jaga Piket



3. Menjadi Pengawas UTS

4. Persiapan sebelum UTS



5. Kegiatan Pramuka



6. Piket Simpatik



7. Praktek Mengajar



8. Kamis Pahing



9. Senam



10. kerja bakti pembuatan Biopori

18. VISI DAN MISI SMKN 1 TEMPEL

VISI, MISI, DAN TUJUAN SMK NEGERI 1 TEMPEL

A. Visi SMK Negeri 1 Tempel :

**MENGHASILKAN TAMATAN YANG KOMPETEN,
BERKARAKTER DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

B. Misi SMK Negeri 1 Tempel sampai dengan tahun 2020 :

- Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan *scientific learning*;
- Menciptakan semangat meraih prestasi secara kompetitif dan komparatif;
- Membentuk tamatan yang inovatif, kreatif dan responsif;
- Menanamkan jiwa disiplin, mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia;
- Meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan;
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan Institusi Pasangan dalam pengembangan sekolah;
- Menanamkan adat budaya Jawa, kebangsaan, gemar membaca, pola hidup bersih dan sehat serta peduli terhadap lingkungan alam sekitar dengan merawat tanaman, mengelola sampah, menghemat air, energi dan kertas, serta melaksanakan 3 R (*Reuse, Reduce, Recycle*).

C. Tujuan SMK Negeri 1 Tempel :

- Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan teknologi dengan pendekatan *scientific learning* sesuai dengan kompetensi keahliannya;
- Membangun warga sekolah agar mempunyai semangat meraih prestasi secara kompetitif dan komparatif dalam meningkatkan kualitas/mutu sekolah;
- Membentuk peserta didik untuk menjadi tamatan yang inovatif, kreatif dan responsif;
- Menyiapkan peserta didik agar memiliki jiwa disiplin, mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari;
- Membiasakan dan memberikan tauladan yang baik sesuai dengan adat budaya Jawa, kebangsaan, gemar membaca, perilaku hidup bersih dan sehat serta peduli terhadap lingkungan alam sekitar dengan perawatan tanaman, pengelolaan sampah, penghematan air, energi dan kertas, serta pelaksanaan 3 R (*Reuse, Reduce, Recycle*).



Tempel, 29 Mei 2017
Kepala SMK Negeri 1 Tempel,

Dra. Nuning Sulastri, M.M.
19610828 198803 2 010